SINERGi

Edisi 6 | Oktober 2026



EDISI KHUSUS
BIMTEKNAS PKS
2026

Menggeser Paradigma Kebijakan Publik:

Dari Viral Ke Berdampak

EDISI UPDATE VERSI DIGITAL



Kepada seluruh atlet, pelatih,
official, dan tim pendukung
Asian Games Nagoya 2026

Terima Kasih

atas perjuangan, kerja sama,
dan dedikasi luar biasa.
Kalian telah menjadi
kebanggaan dan inspirasi
bagi bangsa



11	5	23
Perak	Emas	Perunggu

DAFTAR ISI

3 Daftar isi

4 **BAGIAN 1: PENGANTAR DAN ARAH KEBIJAKAN**

5 Tajuk Redaksi: Dari Panggung Viral Menuju Meja Kebijakan

13 Arah Kebijakan : Ketua BP3U DPP PKS: Menimbang Mutu Kebijakan Pejabat Publik

18 **BAGIAN 2: FONDASI PEMIKIRAN**

19 Refleksi Presiden PKS : Politik Berdaya, Kebijakan yang Menyejahterakan

25 Catatan Ketua Majelis Syura PKS : Menjaga Kemurnian Khidmah di Ruang Kekuasaan

33 Kepemimpinan Pejabat Publik: Demarkasi Moral dan Struktural

41 Kajian Ideologis: Keadilan Distributif dan Maqashid Syariah dalam Tata Kelola Anggaran

49 **BAGIAN 3: ANALISIS STRUKTURAL & KEBIJAKAN**

50 Kerangka Struktural Kebijakan: Anatomi Inovasi Daerah

59 Analisis Sektoral Daerah I: Pendidikan Dan Sumber Daya Manusia

68 Analisis Sektoral Daerah II: Infrastruktur dan Konektivitas Rakyat

76 Analisis Sektoral Daerah III: Inklusi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

85 Analisis Sektoral Multi-wilayah: Transparansi Parlemen Dan Reformasi Pokir

97 **BAGIAN 4: LAPORAN UTAMA**

98 Laporan Utama Bagian A: "Negara yang Bekerja": Menguji Janji Pejabat di Bawah Audit Nasib Rakyat

112 Laporan Utama Bagian B: Pilar Domestik Penegak Amanah Publik

132 **BAGIAN 5: KIPRAH LAPANGAN & PARLEMEN**

133 Artikel 1: Ketukan Palu dan Jejak Kaki di Tanah Flores

137 Artikel 2: Memperjuangkan Ruang Kelas dari Senayan

141 Artikel 3: Di Balik Kepungan Asap Pekat Sumatra dan Kalimantan

145 Artikel 4: Keringat di Celah Batu Cangkang Gunung Talang

150 **BAGIAN 6: PENUTUP**

151 Menanam Pohon Yang Menolak Mati: Warisan Kepemimpinan Melampaui Masa Jabatan

TIM PENGARAH: ● Presiden PKS ● Sekjen PKS ● Ketua BP3U ● Ketua Fraksi PKS DPR RI ● Ketua KSP. ● Ketua Bidang Komdigi **TIM PENGARAH KONTEN** ● Ketua BP3U Dr. H. Haru Suandharu, S.Si., M.Si. ● Sekretaris BP3U dr. H. Pamungkas Hendra Kusuma ● Wakil Sekretaris BP3U Arief Rahman Hakim, S.I.Kom ● Deputi Pembinaan Pejabaf Publik: Teddy Rusmawan, AT., MM. ● Deputi Data Perencanaan: dr. Helmi Budiman, MM. ● Deputi Monev: Dr. H. Agung Budi Margono, ST., MT. ● Deputi Pembinaan Keluarga Pejabat Publik: Hj. Nevi Zaurina ● Deputi Sistem Pendukung : H. Riza Falepi, ST., MT. **TIM REDAKSI** ● Chairoman J. Putro, B.Eng., M.Si. ● Dr. Apiatno, SE, MSi ● Daud Abdullah, STP **TIM PRODUKSI** ● Hafidz Muftisany ● Adiela ● Lisa Epriani ● Faiz Ayyas ● Boy Hamidy

1

Pengantar dan Arah Kebijakan

Dari Panggung Viral Menuju Meja Kebijakan

Mengapa Sensasi Harus Berhenti dan Tata Kelola Harus Dimulai

"Kekuasaan yang bermartabat tidak diukur dari riuh tepuk tangan di panggung media sosial, melainkan dari keberanian mengikat diri pada tertib hukum, keadilan anggaran, dan keluhuran moral."

Ilusi Optik di Era Algoritma

Ada sebuah ironi yang muram di balik lanskap ruang publik kita hari ini. Di atas layar kaca berukuran enam inci yang digenggam jutaan jemari warga, politik kerap kali hadir bukan sebagai orkestrasi peradaban, melainkan sekadar rentetan fragmen tontonan. Kita menyaksikan seorang pemimpin daerah yang menyinsingkan lengan kemeja, melompat ke kubangan lumpur, menunjuk-nunjuk lubang jalan dengan mimik muka geram, lalu beberapa jam kemudian potongan video tersebut dibubuhi musik berdegup kencang dan bertengger megah di puncak linimasa. Ribuan komentar pujian berhamburan; puluhan ribu tanda suka *(likes)* dikumpulkan.

Namun, ketika gawai pintar dimatikan dan algoritma beralih ke tren berikutnya, realitas yang telanjang tetap

tak bergeming.

Ketika musim penghujan berikutnya tiba, lubang jalan yang ditambal secara tergesa demi rekaman lensa kamera itu kembali menganga —bahkan jauh lebih dalam. Truk-truk pengangkut kubis dan bawang milik petani desa kembali terperosok; anak-anak sekolah yang menaiki sepeda ontel tetap harus berkubang dalam lumpur; dan ongkos logistik pangan rakyat tidak bergeser satu desimal pun.

Inilah jebakan ontologis yang kita sebut sebagai tirani politik viral.

Di bawah hegemoni media sosial dan jurnalisme warga (*citizen journalism*), panggung politik kita terancam mengalami reduksi akut. Pemerintahan—yang sejatinya merupakan seni mengelola kompleksitas kelembagaan demi mewujudkan maslahat publik—dikecilkan menjadi sekadar panggung dramaturgi personal. Aksi kedermawanan individu atau kemarahan teatrikal di depan publik sering kali dirayakan secara gegabah seolah-olah telah mewakili sebuah terobosan tata kelola.

Secara sosiologis dan epistemologis, kita sedang menyaksikan percampuradukan yang fatal antara output visual yang serba instan dengan outcome struktural yang berjangka panjang. Dalam disiplin ilmu administrasi publik modern, seorang pejabat yang membagikan seratus pasang sepatu atau membagikan amplop bantuan dari



Gambar: Menpan.go.id

saku gajinya sendiri mungkin patut diapresiasi sebagai insan berakhlak mulia. Akan tetapi, kedermawanan personal (*individual philanthropy*) bukanlah kebijakan publik (public policy). Tindakan sosial semacam itu memiliki demarkasi ontologis yang teramat tegas dengan ikhtiar merekayasa sistem negara.

Kedermawanan pribadi bergantung pada kemurahan hati seorang figur; ia terbatas oleh isi dompet individu, bersifat sukarela, tidak membebankan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dinas teknis, dan rentan menguap tanpa bekas begitu figur tersebut turun dari takhta. Sebaliknya, kebijakan publik lahir dari mandat kedaulatan rakyat. Ia menuntut pengerahan ratusan miliar rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berakar pada naskah akademik yang kokoh, diundangkan lewat Peraturan Daerah (Perda), dieksekusi oleh mesin birokrasi profesional, dan dijamin keberlanjutannya bagi puluhan ribu anak bangsa—terlepas dari siapa pun yang tengah memegang kendali kekuasaan.

Jika para pengambil kebijakan kita lebih gandrung mengoleksi tepuk tangan virtual ketimbang duduk berjam-jam menelaah postur neraca anggaran, maka negara sedang mereduksi dirinya menjadi panggung sirkus. Sensasi visual semacam itu harus dihentikan. Ruang tata kelola yang sejati harus segera dimulai.

Jika para pengambil kebijakan kita lebih gandrung mengoleksi tepuk tangan virtual ketimbang duduk berjam-jam menelaah postur neraca anggaran, maka negara sedang mereduksi dirinya menjadi panggung sirkus

Anatomi Tata Kelola dan Pembuktian Kausalitas

Menolak tirani viralitas bukan berarti alergi terhadap inovasi. Justru sebaliknya: penolakan tersebut merupakan panggilan moral untuk mengembalikan istilah "inovasi" ke habitat ilmiah dan yuridisnya yang paling murni.

Hukum tata negara dan peraturan perundang-undangan kita sebenarnya telah memasang pagar pembatas yang sangat jernih. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, negara mendefinisikan inovasi bukan sebagai kehebohan sensasional, melainkan sebagai segala bentuk pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terikat pada lima parameter fundamental: mengandung unsur kebaruan, mendatangkan kemanfaatan umum, tidak mengakibatkan benturan kepentingan, tidak menimbulkan



kerugian keuangan negara, serta memiliki rancang bangun yang dapat direplikasi secara kelembagaan.

Standar tersebut semakin diperkokoh oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI melalui instrumen Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Sebuah kebijakan baru berhak menyandang predikat inovatif dan bermutu apabila ia lolos uji kelayakan dalam empat kuadran terpadu:

1. **Kualitas Perencanaan Berbasis Bukti (evidence-based policy):** bukan sekadar desakan impulsif atau komoditas elektoral;
2. **Kesesuaian Implementasi Tata Kelola:** didukung struktur kelembagaan, regulasi pelaksana, serta alokasi anggaran yang berkelanjutan;
3. **Ketajaman Evaluasi Dampak Pasca-Pelaksanaan (ex-post measurement):** sebagaimana diinstruksikan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, agar ukuran keberhasilan tidak mandek pada laporan administratif serapan dana belaka; dan
4. **Partisipasi Publik yang Bermakna (meaningful participation):** menghormati hak masyarakat untuk didengar (right to be heard), dipertimbangkan (right to be con-sidered), dan diberikan penjelasan transparan (right to be explained).

Ketika kacamata audit ini kita kenakan ke berbagai wilayah tanah air,

> “Integritas publik dan kehangatan domestik harus berjalan dalam satu tarikan napas: menegakkan amanah anggaran di kantor pemerintahan, sembari memelihara rasa cukup (qana’ah) dan kesahajaan di bilik keluarga.

kita akan menemukan benang merah yang tajam antara kerja teknokratis yang sunyi dan kerja pencitraan yang bising.

Mari kita menengok tanah Sulawesi Tengah. Program beasiswa "Berani Cerdas" di bawah kepemimpinan Anwar Hafid melesat bukan karena kepiawaian merangkai retorika di panggung kampanye, melainkan karena keberanian melakukan rekayasa fiskal APBD secara masif—melonjak dari Rp84,93 miliar pada 2025 menuju Rp351 miliar pada 2026. Angka fantastis tersebut tidak dihamburkan sebagai santunan tunai karitatif, melainkan dialir-kan secara terukur untuk membiayai lebih dari 30.000 mahasiswa aktif, mencetak dokter spesialis per desa melalui skema ikatan dinas, membiayai sertifikasi uji kompetensi siswa SMK manufaktur dan tambang, hingga menghubungkan sekolah terpencil di pulau-pulau 3T dengan stasiun internet satelit. Di sana, data diverifikasi silang melalui Dapodik dan DTSEN guna menghapus jejaring klientelisme dan titipan politik.

Mari kita tengok pula Kabupaten Purbalingga. Ketika Bupati Fahmi Muhammad Hanif dielu-elukan publik karena menyumbangkan gajinya untuk membagikan sepatu anak sekolah, kita patut mencatat tindakan itu sebagai kepekaan empati seorang pemimpin muda. Namun, dalam timbangan kebijakan publik, capaian terbesarnya justru terletak pada keberanian politik anggarannya: merealokasikan pos APBD sebesar Rp90 miliar hingga Rp122 miliar di tengah penyusutan ruang fiskal daerah guna merekonstruksi lebih dari seratus ruas jalan utama melalui program "Alus Dalane". Mengapa? Karena seratus pasang sepatu tidak akan mampu menyelamatkan ekonomi desa apabila jalan penghubung sentra hasil bumi hancur tergerus air bah. Mutu aspal berstandar padat, drainase beton yang presisi, dan penurunan biaya angkut logistik pertanian adalah indikator nyata dari negara yang hadir melindungi warganya.

Kita pun menyaksikan bagaimana DPRD Provinsi Jawa Timur merombak paradigma belas kasihan (charity-based) menjadi paradigma hak asasi (rights-based) melalui pengesahan Perda Inisiatif Disabilitas. Regulasi ini bukan sekadar janji manis; ia mengunci kuota kerja formal 2% di Pemda/BUMD, mewajibkan bantuan hukum cuma-cuma, serta memandatkan pembentuk-

an Komisi Disabilitas Daerah di mana 50% komisionernya wajib berasal dari kalangan difabel itu sendiri—menegakkan adagium luhur nihil de nobis, sine nobis (tiada keputusan tentang kami tanpa keterlibatan kami). Demikian pula di Kulon Progo, keberanian membatasi ekspansi ritel raksasa lewat Perda Perlindungan Pasar Tradisional dan merger Toko Milik Rakyat (ToMiRa) berhasil memastikan bahwa 20–30% etalase toko modern diisi oleh peluh keringat perajin lokal, sementara sisa hasil usaha (SHU) mengalir kembali ke kas koperasi warga.

Inovasi-inovasi di atas memiliki kesamaan watak: semuanya berakar pada keberanian mengubah regulasi dan mengunci komitmen anggaran. Mereka tidak membiarkan nasib rakyat digantungkan pada suasana hati seorang pemimpin, melainkan diikat kokoh dalam mekanisme birokrasi yang terus bekerja melampaui masa jabatan pencetusnya.

Garis Sikap Editorial Sinergi Edisi 07

Majalah SINERGI Edisi 07 hadir ke ruang baca Anda—para pembuat kebijakan, legislator, kepala daerah, akademisi, dan kader perkhidmatan di seluruh penjuru Indonesia—bukan untuk menambah riuh panggung pujian artifisial. Majalah ini merupakan Edisi Khusus terkait Pelaksanaan BIMTEK NASIONAL PKS yang bertema INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK.

Kami hadir untuk meletakkan



Gambar: tempo.co

sebuah standar baru.

Di hadapan tim redaksi, seluruh klaim keberhasilan pembangunan daerah diuji di bawah audit nasib rakyat. Kami menolak memperlakukan publikasi hubungan masyarakat (humas) pemda sebagai kebenaran mutlak. Sebaliknya, kami menyandingkan laporan serapan anggaran dengan data lapangan BPS, catatan audit kepatuhan BPK, pengawasan integritas pencegahan korupsi MCP KPK, serta suara lirih masyarakat miskin yang kerap terlewat dalam agregasi statistik pembangunan.

Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang memosisikan diri sebagai partai dakwah dan partai kader, ujian kekuasaan di ranah eksekutif dan legislatif adalah ujian moralitas tingkat tertinggi. Dalam khazanah fiqih siyasah, tindakan penguasa atas rakyatnya wajib bertumpu sepenuhnya pada kemaslahatan umum:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

(Tasharruful imām 'alar ra'iyyah manūthun bil mashlahah).

Kemaslahatan tersebut tidak dapat dicapai dengan retorika. la menuntut pengawalan terhadap lima perlindungan universal (*kulliyatul khams*): menjaga nyawa dan keselamatan warga (*hifdzun nafs*) lewat infrastruktur jalan dan fasilitas medis keliling; menjaga kecerdasan dan masa depan generasi (*hifdzul aql*) lewat investasi beasiswa perguruan tinggi massal; serta menjaga harta rakyat (*hifdzul mal*) dari kanibalisme oligopoli melalui perlindungan koperasi dan pasar tradisional.

Lebih dari itu, Edisi 07 ini menyajikan laporan investigasi yang menembus panggung paling sunyi dari kepemimpinan publik: ekosistem keluarga pejabat publik. Berdasarkan Naskah Akademik yang dirumuskan secara mendalam oleh BP3U DPP PKS, kami menegaskan bahwa benteng moralitas seorang pemimpin tidak dibangun di atas podium sidang paripurna, melainkan di atas meja makan rumah tangganya yang bersahaja.

Di era ketika jurnalisme warga mampu menembus bilik ruang privat, pemisahan antara etika panggung depan *(front stage)* dan panggung belakang *(back stage)* telah runtuh. Gaya hidup pamer kemewahan *(flexing),* penyalahgunaan akses dinas oleh pasangan atau anak, serta godaan melahirkan "aristokrasi politik baru" adalah racun yang sanggup meruntuhkan murwah kepemimpinan publik seketika. Integritas publik dan kehangatan domestik harus berjalan dalam satu tarikan napas: menegakkan amanah anggaran di kantor pemerintahan, sembari memelihara rasa cukup (qana'ah) dan kesahajaan di

> “Tutup kamera ponsel yang sekadar mengejar algoritma; buka lembaran naskah akademik, periksa draf peraturan daerah, cermati setiap rupiah alokasi belanja modal, dan pastikan pintu rumah kita tetap tertutup rapat dari fitnah materi kekuasaan.



Gambar: istimewa

bilik keluarga.

Melalui halaman-halaman edisi khusus ini, kami mengajak para pejabat publik di mana pun berada untuk menyudahi politik drama. Tutup kamera ponsel yang sekadar mengejar algoritma; buka lembaran naskah akademik, periksa draf peraturan daerah, cermati setiap rupiah alokasi belanja modal, dan pastikan pintu rumah kita tetap tertutup rapat dari fitnah materi kekuasaan.

Sebab pada akhirnya, sejarah peradaban tidak akan pernah mencatat berapa juta penonton yang menyaksikan atraksi seorang pejabat. Sejarah hanya akan mengenang satu hal: apakah kebijakan yang Anda putuskan mampu memartabatkan hidup rakyat kecil ketika jabatan telah lama Anda tanggalkan.

Selamat membaca. Tabik.

— Dewan Redaksi Majalah Sinergi

ARAH KEBIJAKAN

Dr. H. Haru Suandharu, S.Si., M.Si.
Ketua BP3U DPP PKS



Menimbang Mutu Kebijakan Pejabat Publik

Parameter Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Bersih, dan Berdaya Saing

"Kekuasaan bukanlah tahta kemuliaan pribadi, melainkan mandat pengorbanan (*ri'ayatus siyasah*). Ukuran keberhasilan seorang pejabat publik tidak dihitung dari seberapa megah ia beretorika di podium politik, melainkan seberapa presisi kebijakannya membalik nasib rakyat kecil dari derita menjadi sejahtera."

BAGIAN I: MENOLAK JEBAKAN RUTINITAS DAN ILUSI FISKAL

Ketika seorang kader dilantik menjadi kepala daerah atau mengucap sumpah sebagai pimpinan dan anggota parlemen daerah, ia sesungguhnya tidak sedang melangkah ke sebuah singga-sana kenikmatan. Ia sedang melangkah masuk ke dalam ruang hisab kenegaraan yang teramat berat. Di pundaknya, terpancang amanah jutaan jiwa warga yang menggantungkan asa: petani yang menanti air irigasi mengalir lancar, anak-anak pelosok desa yang bermimpi duduk di bangku kuliah kedokteran, hingga buruh harian yang cemas menatap masa depan keluarganya.

Sebagai Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (BP3U) DPP PKS, saya



Gambar: Portal Media Kota Banjar

memandang perlu menegaskan garis haluan fundamental: partai dakwah masuk ke ruang kekuasaan bukan untuk menjadi penonton pasif apalagi larut dalam arus kompromi pragmatis. Kita hadir di cabang eksekutif dan legislatif untuk mendisrupsi kebiasaan lama dan meletakkan standar mutu baru dalam tata kelola pemerintahan daerah (*good public governance*).

Selama lebih dari dua dekade pelaksanaan otonomi daerah, kita menyaksikan penyakit menahun yang terus menggerogoti birokrasi lokal. Pertama, jebakan rutinitas administratif. Banyak daerah merasa telah berhasil mengelola APBD semata-mata karena telah menyerap anggaran di atas 90 persen dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Padahal, serapan anggaran yang tinggi dan kepatuhan administratif hanyalah syarat kepatutan formal (necessary condition), bukan bukti keberhasilan substantif (*sufficient condition*). Sebuah daerah bisa saja meraih predikat WTP seratus persen, namun angka stunting warganya tetap melonjak, jalan poros desanya hancur berkubang lumpur, dan ketimpangan ekonomi antarkelas semakin menganga.

Kedua, ketergantungan fiskal yang rapuh. Ruang gerak otonomi daerah kerap tercekik oleh struktur belanja yang tidak sehat. Porsi belanja pegawai dan operasional rutin birokrasi sering kali menelan lebih dari separuh postur APBD, menyisakan porsi belanja modal publik yang teramat kerdil. Di saat yang sama, kemampuan menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) berjalan lamban, menyisakan ketergantungan kronis terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ketika

penerimaan negara berkontraksi, program-program kerakyatan seketika lumpuh.

Di sinilah BP3U DPP PKS memancangkan doktrin operasionalnya: setiap pejabat publik binaan PKS diwajibkan melakukan rekayasa fiskal berbasis keadilan distributif. Menghadapi keterbatasan APBD, kita menuntut keberanian politik untuk memangkas pos-pos seremonial dinas, menghentikan studi banding tak berdampak, dan mengalihkan puluhan miliar rupiah belanja modal ke sektor vital: jalan poros produksi, beasiswa generasi prasejahtera, dan perlindungan pasar rakyat. Inovasi sejati bukan terletak pada seberapa banyak aplikasi digital yang Anda ciptakan, melainkan seberapa berani Anda merombak neraca anggaran demi memuliakan kaum dhuafa dan mustadh'afin.

Kita menolak klientelisme bansos. Bantuan beasiswa, jaminan kesehatan, dan modal usaha mikro tidak boleh disandera oleh kartu keanggotaan partai atau jejaring tim sukses. Layanan publik harus mengalir bening atas dasar hak kewargaan (*citizenship rights*), bukan transaksi patron-klien.

BAGIAN II: STANDARDISASI MUTU KEBIJAKAN DAN PAGAR INTEGRITAS

Untuk memastikan bahwa seluruh inisiatif kepala daerah dan fraksi parlemen PKS berdaya tahan tinggi serta melampaui masa jabatan politik, BP3U menetapkan tiga pilar standardisasi kebijakan yang wajib dioperasionalkan di seluruh tingkatan wilayah:

1. Perencanaan Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy)

Kita menginstruksikan seluruh kepala daerah dan fraksi DPRD PKS untuk menghentikan program karitatif impulsif yang lahir dari desakan elektoral sesaat. Setiap perumusan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), hingga Pokok Pikiran (Pokir) dewan wajib bersandar pada naskah akademik yang solid dan data tunggal yang terverifikasi—mengintegrasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Dapodik, serta Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Kita menolak klientelisme bansos. Bantuan beasiswa, jaminan kesehatan, dan modal usaha mikro tidak boleh disandera oleh kartu keanggotaan partai atau jejaring tim sukses. Layanan publik harus mengalir bening atas dasar hak kewargaan (*citizenship rights*), bukan transaksi patron-klien.

2. Kepatuhan Parameter Yuridis dan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) LAN RI

Setiap kebijakan pembaruan daerah harus lolos uji kelayakan lima parameter

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah: mengandung unsur kebaruan, mendatangkan kemanfaatan umum, bebas dari benturan kepentingan, tidak merugikan keuangan negara, serta memiliki cetak biru yang dapat direplikasi oleh sistem birokrasi.

Selaras dengan instrumen IKK LAN RI dan arahan BSKDN Kemendagri terkait pengukuran dampak pasca-implementasi (*ex-post measurement*), pejabat publik PKS dilarang berhenti pada laporan serapan anggaran (*output*). Keberhasilan beasiswa diukur dari angka kelulusan dan lompatan pendapatan keluarga miskin; keberhasilan jalan mantap diukur dari turunnya ongkos logistik pangan; dan keberhasilan perda perlindungan ekonomi diukur dari naiknya omzet pedagang pasar tradisional.

3. Penegakan Protokol Integritas Ekosistem Domestik

Kredibilitas kebijakan publik mustahil tegak jika ruang domestik keluarga pejabat publik rapuh. Melalui Deputi Pembinaan Keluarga Pejabat Publik BP3U yang bersinergi dengan Rumah Keluarga Indonesia (RKI), Forum ISPIMDA, dan Dewan Syariah Pusat (DSP), partai mengoperasionalkan sistem pendekatan ganda (*dual-system approach*).

Di satu sisi, kita menyediakan dukungan psikososial dan ruang konseling bagi keluarga pejabat dalam menghadapi tekanan protokoler. Namun di sisi lain, kita menegakkan disiplin pengawasan tanpa toleransi: melakukan audit keselarasan gaya hidup (*lifestyle audit*) yang dicocokkan dengan LHKPN, melarang keras campur tangan keluarga dalam proyek



Gambar: Pinterest

pengadaan barang dan jasa, serta mewajibkan penerapan kebersihan digital (*digital hygiene*) guna menangkal mentalitas hedonis dan bibit "aristokrasi politik baru". Integritas di meja kantor pemerintah daerah harus berakar dari kesahajaan (*qana'ah*) di meja makan keluarga.

RISALAH PERKHIDMATAN: TIGA PILAR GERAK TERPADU

Kepada seluruh kepala daerah, pimpinan dewan, legislator, dan jajaran struktur kepengurusan di seluruh pelosok nusantara, mari kita satukan langkah dalam orkestrasi perkhidmatan yang padu:

Sinergi Tiga Pilar
= Struktur Partai + Fraksi Parlemen
+ Keteladanan Pejabat Publik

1. **Struktur Partai:** Menjadi radar kepekaan nurani rakyat, menyerap rintihan warga miskin di akar rumput, dan menyuarakannya ke dalam agenda politik daerah.
2. **Fraksi Parlemen:** Menjadi mesin teknokratis di ruang sidang dewan, memperjuangkan perda inisiatif yang progresif, mengawal transparansi penganggaran via E-Pokir, dan mengawasi implementasi APBD tanpa kompromi rente.
3. **Pejabat Publik Eksekutif:** Menjadi eksekutor yang berani, bersih, profesional, dan berjiwa negarawan; meruntuhkan kebiasaan birokrasi lamban demi menghadirkan negara yang bekerja nyata bagi warganya.

> Inovasi sejati bukan terletak pada seberapa banyak aplikasi digital yang Anda ciptakan, melainkan seberapa berani Anda merombak neraca anggaran demi memuliakan kaum dhuafa dan mustadh'afin.

Kekuasaan akan purna pada waktunya. Gemuruh tepuk tangan di media sosial akan menguap ditelan pergantian algoritma. Namun, sebuah sistem kebijakan yang dirancang dengan landasan ilmu, diundangkan dengan keberanian nurani, dan dibentengi oleh keluhuran akhlak keluarga, akan terus mengalirkan kemaslahatan abadi bagi rakyat dan menjadi persembahan amal jariyah terindah di hadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Selamat berkhidmat. Luruskan niat, kuatkan ikhtiar, dan hadirkan kebijakan yang memartabatkan rakyat!

Badan Pembinaan dan Pengembangan
Pemerintahan Daerah (BP3U)
Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera

Dr. H. Haru Suandharu, S.Si., M.Si.
Ketua BP3U DPP PKS

2

Fondasi Pemikiran

REFLEKSI

Dr. Al Muzzammil Yusuf, M.Si.
Presiden PKS



Politik Berdaya, Kebijakan yang Menyejahterakan

Ikhtiar Menghadirkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat

"Kekuasaan dalam timbangan dakwah bukanlah trofi kemenangan elektoral, melainkan tuas rekayasa keadilan. Ukuran kemuliaannya tidak dinilai dari gemerlap karpet merah birokrasi, melainkan dari seberapa berani ia mendistribusikan kekayaan negara demi memuliakan martabat kaum *mustadh'afin*."

Makna Kekuasaan: Menolak Pragmatisme, Membela *Mustadh'afin*

Ada godaan laten yang selalu mengintai setiap gerakan politik ketika melintasi pintu gerbang kekuasaan: godaan untuk terbiasa, lalu berkompromi, dan akhirnya larut dalam irama oligarkis yang lamban. Ketika sebuah partai bertransfor

Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang memosisikan diri sebagai partai dakwah dan partai kader, kekuasaan tidak pernah dimaknai sebagai titik tujuan akhir *(ghayah)*. Kekuasaan semata-mata adalah instrumen *(wasilah)* untuk menegakkan keadilan *(iqamatul 'adalah)* dan melayani seluruh tumpah darah Indonesia

(*khidmah al-ummah*). Di tengah lanskap sosial-ekonomi kita yang masih dihantui oleh ketimpangan wilayah yang menganga—di mana kekayaan nasional kerap terkonsentrasi pada segelintir kelompok elit—panggilan moral kepemimpinan Islam menuntut keberpihakan yang tegas kepada kaum tertindas dan terpinggirkan (*al-mustadh'afin*).

Dalam timbangan etika siyasah kami, derajat kemuliaan politik selalu diukur dari perkalian erat antara kesucian amanah kekuasaan dan ketegasan menegakkan keadilan distributif, yang seluruh muara ikhtiarnya diabdikan tanpa syarat demi mengangkat harkat serta memuliakan kaum *mustadh'afin.*

Keberpihakan ini bukan slogan sentimental di podium kampanye. Keberpihakan ini menuntut pembongkaran terhadap doktrin ekonomi politik yang menganggap kemiskinan sekadar sebagai nasib buruk individu. Kemiskinan sering kali merupakan produk dari struktur kebijakan yang timpang: regulasi yang memfasilitasi kanibalisme pasar modal raksasa atas pedagang pasar tradisional, tata kelola fiskal yang memprioritaskan belanja seremonial birokrasi ketimbang jalan poros desa, serta akses pendidikan tinggi yang masih diperlakukan sebagai barang mewah bagi anak buruh dan petani. Di sinilah doktrin "Politik Berdaya" menemukan urgensi historis-nya: kita hadir di ruang kenegaraan untuk mendayagunakan instrumen otoritas publik demi membalik ketidak-adilan struktural tersebut menjadi kesejahteraan nyata.



Foto : Kompas.com

Tuas Rekayasa Keadilan Distributif

Kekuasaan politik memiliki instrumen paling konkret yang bernama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran negara pada hakikatnya adalah dokumen moral. Setiap angka, pasal, dan tabel pagu yang diketok palu dalam sidang paripurna parlemen mencerminkan ke mana arah keberpihakan moral penguasa sesungguhnya berlabuh.

Kita menolak dengan tegas pragmatisme sempit yang memandang anggaran daerah semata-mata sebagai ajang tawar-menawar konsesi politik atau bancakan rente antar-elit kekuasaan. Bagi kader PKS yang memegang mandat sebagai kepala daerah, pimpinan dewan, maupun anggota legislatif, neraca anggaran harus didorong menjadi tuas rekayasa redistribusi sosial.

Prinsip keadilan distributif *(distributive justice)* mewajibkan negara melakukan intervensi afirmatif secara terencana:

1. **Redistribusi Akses:** Memberikan lompatan fasilitas kepada kelompok yang paling tertinggal, bukan memperlebar fasilitas bagi mereka yang sudah mapan.
2. **Koreksi Asimetri Pasar:** Membatasi ekspansi modal predatoris melalui regulasi zonasi perdagangan guna melindungi daya hidup pelaku ekonomi mikro dan koperasi warga.
3. **Pemberdayaan Berkelanjutan:** Mengubah anggaran perlindungan sosial dari model bantuan santunan instan (*charity-based*) menjadi investasi produktif berbasis kemandirian ekonomi (*rights-based and capacity-building*).

> Dalam timbangan etika siyasah kami, derajat kemuliaan politik selalu diukur dari perkalian erat antara kesucian amanah kekuasaan dan ketegasan menegakkan keadilan distributif, yang seluruh muara ikhtiarnya diabdikan tanpa syarat demi mengangkat harkat serta memuliakan kaum ***mustadh'afin.***

Ketika seorang bupati atau gubernur PKS menandatangani pos anggaran pendidikan atau infrastruktur, ia tidak sedang menyalurkan belas kasihan pribadi. Ia sedang mengembalikan hak konstitusional rakyat yang sah. Keberanian memangkas puluhan miliar rupiah pos perjalanan dinas fiktif dan seminar seremonial untuk dialihkan ke pembangunan ruas jalan sentra pertanian atau beasiswa kedokteran anak pelosok adalah wujud konkret dari keberanian ideologis menegakkan amanah konstitusi.

Pelayanan Inklusif: Mengintegrasikan Platform Dakwah dan Kebangsaan

Sebagai partai yang berakar pada nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin,* PKS memandang seluruh warga negara sebagai entitas yang setara di hadapan negara. Di ruang tata kelola pemerintahan, kita menolak segala bentuk diskriminasi primordial berbasis suku, agama, ras, maupun latar belakang afiliasi politik.

Pelayanan publik yang dihadirkan oleh kader PKS di eksekutif dan legislatif harus mengalir jernih laksana air: dinikmati oleh siapa saja tanpa memandang apakah warga tersebut memilih kita dalam pemilu atau tidak. Prinsip kewargaan (*citizenship rights*) adalah fondasi etika birokrasi modern. Ketika jalan dibangun mulus, jalan itu dilalui oleh anak-anak sekolah dari berbagai latar belakang keyakinan. Ketika fasilitas puskesmas diperbaiki dan dokter spesialis menjangkau pelosok desa, obat dan pemeriksaan diberikan kepada setiap insan yang membutuhkan tanpa pernah menanyakan kartu keanggotaan partai.



Foto : pks.id

Inilah jembatan emas yang menghubungkan platform dakwah dan visi kebangsaan. Dakwah politik PKS tidak diukur dari seberapa banyak kita menyeragamkan identitas masyarakat, melainkan dari seberapa nyata nilai-nilai keadilan (*al-'adalah*), kejujuran (ash-shidq), dan kasih sayang (ar-rahmah) membumi dalam sistem pelayanan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kita membuktikan bahwa kepemimpinan berlandaskan nilai Islam adalah kepemimpinan yang paling gigih merawat persatuan nasional, menegakkan hak asasi manusia, serta menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dimandatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Partai Sebagai Think-Tank Teknokratis

Niat baik dan integritas moral adalah modal awal, namun moralitas belaka tidak cukup untuk mengurai kerumitan tata kelola publik kontemporer. Birokrasi modern membutuhkan kecakapan teknokratis, pemahaman yuridis yang presisi, serta arsitektur kebijakan yang solid. Tanpa kapasitas teknis, niat luhur politisi akan kandas di meja birokrasi

atau terjebak dalam program populis yang rapuh.

Oleh karena itu, Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS menempatkan partai bukan sekadar sebagai mesin pemenangan pemilu (*vote-getting machine*), melainkan sebagai pusat keunggulan pemikiran kebijakan (*policy think-tank*). Melalui Badan Pembinaan dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (BP3U), partai membangun standardisasi mutu bagi seluruh kepala daerah dan fraksi parlemen di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota:

- **Standardisasi Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif**: Setiap perda inisiatif yang diusung Fraksi PKS wajib ber-basis bukti (evidence-based), memiliki naskah akademik komprehensif, dan memenuhi uji parameter Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) LAN RI serta PP No. 38/2017 tentang Inovasi Daerah.
- **Integrasi Data Tunggal:** Menginstruksikan integrasi basis data sasaran kebijakan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) guna mematikan celah klientelisme dan titipan tim sukses.
- **Pengawalan Fungsi Budgeting:** Mengawal digitalisasi aspirasi konstituen melalui E-Pokir yang terintegrasi dengan SIPD dan instrumen pencegahan korupsi MCP KPK, memastikan anggaran parlemen 100 persen berorientasi pada kemaslahatan warga.

Partai bertanggung jawab menyuplai kerangka kerja analitis, modul simulasi anggaran, dan bimbingan teknis yang berkelanjutan agar setiap pejabat binaan PKS memiliki daya tawar konseptual yang kokoh saat berhadapan dengan teknokrasi birokrasi maupun kekuatan politik lainnya.

> Pelayanan publik yang dihadirkan oleh kader PKS di eksekutif dan legislatif harus mengalir jernih laksana air: dinikmati oleh siapa saja tanpa memandang apakah warga tersebut memilih kita dalam pemilu atau tidak. Prinsip kewargaan (***citizenship rights)*** adalah fondasi etika birokrasi modern

Ujian Legasi: Melampaui Sorotan Kamera dan Masa Jabatan

Pada akhirnya, kepemimpinan publik adalah perlombaan membangun jejak peradaban (*legacy*), bukan perlombaan mengoleksi pujian sesaat. Algoritma media sosial dapat melambungkan nama seorang pejabat dalam hitungan menit lewat video-video dramatis yang dirancang sedemikian rupa. Namun sejarah kepemimpinan bangsa ini tidak



pernah mencatat berapa juta tanda suka yang dikumpulkan seorang pemimpin di dunia maya.

Sejarah hanya mencatat satu hal: apakah sistem yang dibangun mampu terus bekerja menyejahterakan rakyat ketika sang pemimpin telah meletakkan jabatannya?

Sebuah inovasi sejati tidak boleh mengidap sindrom ketergantungan figur (*strong leader dependency syndrome*). Terobosan kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dikodifikasi ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat, diintegrasi-kan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), didukung mekanisme anggaran yang berkelanjutan, serta diinternalisasikan ke dalam budaya birokrasi. Dengan demikian, ketika masa dinas berakhir dan mobil jabatan ditarik, program beasiswa tetap berjalan, jalan poros produksi tetap terpelihara, dan perlindungan pasar rakyat tetap kokoh melindungi pedagang kecil.

Di atas fondasi itulah kita melangkah. Kepada seluruh kader yang tengah mengemban amanah di eksekutif maupun legislatif, tegakkan kepala Anda, luruskan niat dakwah, dan pertajam kecakapan teknokratis. Mari buktikan bahwa politik PKS adalah politik yang memberdayakan, dan kekuasaan di tangan kita adalah rahmat yang menghadirkan kesejahteraan abadi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dr. Al Muzzammil Yusuf, M.Si.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera

CATATAN KETUA MAJELIS SYURA PKS

H. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D.



Menjaga Kemurnian Khidmah di Ruang Kekuasaan:

Tawadhu' dalam Jabatan, Teguh dalam Prinsip Kemaslahatan

"Kekuasaan adalah ujian rohani terberat bagi seorang penyeru kebaikan. Pada hari ketika tepuk tangan riuh terdengar dan pintu-pintu kemudahan terbuka lebar, di saat itulah kerendahan hati harus dilipatgandakan. Sebab di hadapan timbangan Ilahi, takhta tidak pernah diukur dari kemegahannya, melainkan dari air mata rakyat kecil yang berhasil diusap dalam kesunyian."

Gravitasi Ruhani: Amanah Antara Kemuliaan dan Penyesalan

Bila kita merenungi sejarah peradaban dan risalah kenabian, kekuasaan politik sesungguhnya adalah pedang bermata dua yang menuntut kewaspadaan tingkat tertinggi. Di satu sisi, ia adalah karunia yang memungkinkan seorang hamba menorehkan tinta emas kebajikan—membuka jalan bagi jutaan anak bangsa untuk bersekolah, mengalirkan air ke sawah-sawah yang retak mengering, serta membentengi kaum dhuafa dari cengkeraman kezaliman. Namun di sisi lain, kekuasaan menyimpan daya hisap yang luar biasa pekat untuk melenakan hati nurani dan membius kesadaran spiritual sang

pemegang mandat.

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah meletakkan garis demarkasi psikologis dan teologis yang sangat tegas tatkala mengingatkan sahabat terkasihnya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu 'anhu:

"Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau ini lemah, dan sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Dan pada hari kiamat kelak, ia hanya akan menjadi kehinaan dan penyesalan (khizyun wa nadamah), kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan kewajiban yang terpikul di dalamnya." (HR. Muslim).

Peringatan nabawi ini bukan fatwa untuk menjauhi ruang kepemimpinan publik secara apolitis, melainkan sebuah doktrin kehati-hatian (*mura'at al-amanah*). Jabatan publik bukanlah trofi kehormatan keluarga, bukan tanda bahwa derajat martabat kita telah melampaui orang lain, apalagi lisensi untuk menikmati privilese negara. Bagi seorang kader dakwah, setiap langkah kaki memasuki gedung parlemen, kantor bupati, balai kota, maupun kementerian, harus dipandang sebagai langkah memasuki mahkamah pertang-gungjawaban yang maha dahsyat.

Di hadapan hisab Ilahi kelak, kita tidak akan ditanya berapa kali wajah kita terpampang di baliho jalanan atau berapa juta pasang mata yang memuji pidato kenegaraan kita. Yang akan dihisab hingga ke butir terkecil adalah: apakah ada hak fakir miskin yang



tercecer di balik pos anggaran yang kita setujui? Apakah ada suara jeritan rakyat yang kita abaikan demi meloloskan kompromi elit yang nyaman?

Kesadaran eskatologis ini merupakan gravitasi ruhani yang wajib menjadi jangkar bagi seluruh pejabat publik PKS. Tanpa jangkar spiritual ini, kapal kepemimpinan kita akan terombang-ambing, mudah terseret oleh badai pragmatisme, dan perlahan karam dalam palung kompromi moralitas kekuasaan.

Jerat Narsisme dan Jebakan Algoritma

Kita hari ini hidup di sebuah era yang ditandai oleh pergeseran budaya yang amat cepat. Di era keterbukaan digital dan hegemoni algoritma media sosial, panggung kekuasaan sering kali berubah watak menjadi panggung dramaturgi yang bising. Kehadiran gawai pintar di tangan jutaan warga melahirkan sebuah godaan baru yang sangat halus namun mematikan bagi keikhlasan: godaan narsisme politik dan jebakan riya' institusional.

Dalam khazanah tazkiyatun nafs, riya' adalah racun yang sanggup melenyapkan pahala amal laksana debu yang ditiup angin kencang. Hari ini, batas antara melaporkan kinerja publik secara akuntabel dengan memamerkan kesalehan diri demi akumulasi tanda suka di media sosial menjadi kian tipis dan kabur. Seorang pejabat dapat dengan mudah tergoda untuk merancang skenario penderitaan rakyat menjadi komoditas visual: air mata seorang ibu lansia disorot kamera beresolusi tinggi, amplop santunan diserahkan dengan senyum yang dipoles, lalu diunggah dengan iringan musik yang mengaduk-aduk emosi pemilih.

> Bila seorang pejabat publik binaan PKS mulai merasa gelisah tatkala konten video-nya sepi penonton, namun merasa tenang-tenang saja ketika ratusan anak di pelosok daerahnya putus sekolah akibat keterbatasan beasiswa, maka di titik itulah kompas moralnya telah mengalami disorientasi yang parah.

Ini adalah bentuk komodifikasi kemiskinan yang mencederai martabat kaum mustadh'afin. Kita harus mengingatkan diri kita sendiri: kemiskinan rakyat bukan latar panggung bagi pentas teatrikal seorang pemimpin. Kaum dhuafa tidak membutuhkan pejabat yang sekadar pandai menangis di depan lensa kamera; mereka membutuhkan pemimpin yang tangguh dan cerdas di meja perumusan kebijakan, yang berani

mengalirkan puluhan miliar rupiah anggaran belanja modal daerah untuk membedah akar struktural derita mereka.

Popularitas semu di ruang digital adalah ilusi optik. Algoritma media sosial dirancang untuk memuaskan kepuasan sesaat (*instant gratification*), bukan untuk membangun ketahanan sosial jangka panjang. Bila seorang pejabat publik binaan PKS mulai merasa gelisah tatkala konten videonya sepi penonton, namun merasa tenang-tenang saja ketika ratusan anak di pelosok daerahnya putus sekolah akibat keterbatasan beasiswa, maka di titik itulah kompas moralnya telah mengalami disorientasi yang parah.

Tawadhu' menuntut kita untuk mencintai kerja-kerja sunyi yang berdampak besar ketimbang kerja-kerja bising yang nir-makna. Kebijakan publik yang paling mulia sering kali adalah kebijakan yang paling sedikit disorot lampu kamera: ketekunan meneliti tabel naskah akademik peraturan daerah hingga larut malam, ketegasan memangkas biaya operasional birokrasi yang mubazir, serta keberanian menolak titipan proyek rente dari pemodal gelap. Itulah jihad kebijakan yang sesungguhnya—sebuah khidmah yang tidak mengejar riuh tepuk tangan manusia, melainkan mengejar ridha Allah Yang Maha Menyaksikan.

> Keteladanan moral seorang pejabat publik harus bertransformasi menjadi jangkar regulasi. Artinya, nilai kejujuran, keadilan, dan kesahajaan yang hidup dalam diri sang pemimpin harus dilembagakan ke dalam aturan main birokrasi yang mengikat secara yuridis.

Hakikat Khidmah: Menomorsatukan Hak Kaum Tertinggal

Dalam doktrin perjuangan PKS, pelayanan kepada masyarakat (*khidmah al-ummah*) bukan sekadar instrumen taktis pemenangan elektoral menjelang hari pemungutan suara. Khidmah adalah manhaj hidup, panggilan iman, dan wujud konkret dari cinta kita kepada bangsa dan negara.

Ketika seorang kader dakwah dipercaya rakyat menduduki tampuk eksekutif maupun legislatif, makna khidmah tersebut harus mengalami eskalasi kualitas: dari aksi sosial individual menjadi transformasi sosial yang berdaya jangkau massal melalui instrumen negara. Di ruang kekuasaan, hakikat khidmah adalah menomorsatukan pemenuhan hak-hak kaum paling tertinggal di atas seluruh kenyamanan dan privilese pejabat.

Seorang bupati, wali kota, atau gubernur tidak boleh merasa nyaman beristirahat di rumah dinas yang megah



Foto : pks.id

apabila jalan-jalan penghubung desa di wilayahnya masih berkubang lumpur dan mematikan urat nadi ekonomi petani. Seorang pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah tidak boleh bangga menyetujui anggaran kunjungan kerja ke luar daerah apabila ribuan anak-anak buruh harian di daerah pemilihannya terancam putus kuliah karena ketiadaan alokasi beasiswa.

Dalam tradisi kepemimpinan Islam yang dicontohkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu,* ukuran kesejahteraan seorang pemimpin berbanding terbalik dengan rakyatnya. Tatkala musim paceklik melanda Madinah pada Tahun Ramadah, Umar bersumpah untuk tidak menyantap minyak samin dan daging segar sampai seluruh rakyat jelata dapat memakannya kembali. Tubuhnya mengurus, kulitnya menghitam, dan ia terjaga di keheningan malam menyusuri kemah-kemah pengungsi. Umar memahami bahwa pemimpin adalah perisai pelindung yang harus paling pertama merasakan perihnya derita rakyat, dan paling terakhir menikmati hasil kemakmuran negeri.

Etos keugahari inilah yang harus berdenyut di dalam dada setiap pejabat publik PKS. Kita menolak keras mentalitas aristokrat baru yang gila hormat, haus protokoler berlebihan, dan membangun jurang pemisah sosial dengan rakyat yang memilihnya. Pintu kantor dan telinga para pemimpin harus senantiasa terbuka lebar bagi rintihan

orang-orang kecil. Kedudukan politik tidak boleh sedikit pun mereduksi kehangatan silaturahmi kita dengan akar rumput. Di atas pundak kepemimpinan kita, hak rakyat untuk hidup bermartabat adalah hutang peradaban yang harus dilunasi melalui rancang bangun kebijakan yang adil dan inklusif.

Uswah Hasanah Sebagai Jangkar Regulasi

Sering kali kita menyaksikan perdebatan: mana yang lebih menentukan dalam keberhasilan sebuah pemerintahan, keteladanan moral (*uswah hasanah*) sang pemimpin ataukah kehebatan sistem kelembagaan birokrasi?

` Bagi kami, keduanya bukanlah dua kutub yang bertentangan, melainkan dua sayap yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Integritas pribadi tanpa kecakapan merumuskan sistem kebijakan hanya akan melahirkan kepemimpinan yang rapuh dan mudah diperdaya oleh mafia birokrasi. Sebaliknya, sistem regulasi yang secanggih apa pun akan segera kehilangan wibawanya apabila para perumusnya tidak memiliki keteladanan akhlak dan mudah disuap oleh kepentingan materi.

Keteladanan moral seorang pejabat publik harus bertransformasi menjadi jangkar regulasi. Artinya, nilai kejujuran, keadilan, dan kesahajaan yang hidup dalam diri sang pemimpin harus dilembagakan ke dalam aturan main birokrasi yang mengikat secara yuridis. Akhlak pemimpin harus menjelma menjadi *Standard Operating Procedure* (SOP) pengadaan barang dan jasa yang transparan, peraturan daerah yang membatasi *privilese* oligopoli, serta pakta integritas yang membatasi kesewenang-wenangan aparat.

Ketika seorang pejabat PKS menolak gratifikasi dan membentengi keluarganya dari proyek-proyek APBD, ia tidak sedang membangun monumen kesalehan individu. Ia sedang menegakkan wibawa hukum di hadapan jajaran birokrasi. Bawahan tidak akan berani bermain mata dengan anggaran jika melihat pimpinannya hidup bersahaja dan menolak kompromi rente. Keberanian moral di meja kerja inilah yang memicu efek getar (resonansi kebaikan) ke seluruh penjuru tata kelola daerah.

Dengan cara demikian, kepemimpinan kita menghadirkan keadilan yang

> Kehormatan seorang pejabat publik tidak ditentukan oleh kemewahan rumah pribadi, jenama pakaian, atau deretan kendaraan dinasnya. Kehormatan sejati terletak pada kebersihan suapan makanan yang kita bawa pulang ke meja makan keluarga

melembaga—sebuah tata kelola pemerintahan yang tidak bergantung pada suasana hati seorang figur (*strong leader dependency)*, melainkan kokoh bertumpu pada arsitektur sistem yang bersih, profesional, dan akuntabel. Ketika kelak sang pemimpin purna-tugas dan meletakkan jabatannya, sistem tata kelola yang bermartabat tersebut akan terus hidup dan melindungi nasib rakyat melintasi generasi.

Wasiat Ruhani: Kesucian Rezeki dan Keberkahan Negeri

Sebagai penutup dari catatan per-khidmatan ini, saya ingin menyampaikan wasiat ruhani yang mendalam kepada seluruh saudara-saudaraku yang hari ini mengemban amanah di cabang eksekutif maupun legislatif, beserta keluarga yang mendampingi di rumah:



Foto : detik.com

Pertama, **jagalah kesucian rezeki keluarga dari syubhat dan fitnah materi kekuasaan.** Ketahuilah, kehormatan seorang pejabat publik tidak ditentukan oleh kemewahan rumah pribadi, jenama pakaian, atau deretan kendaraan dinasnya. Kehormatan sejati terletak pada kebersihan suapan makanan yang kita bawa pulang ke meja makan keluarga. Jangan pernah biarkan ada satu rupiah pun uang rakyat yang masuk secara haram ke dalam perut pasangan dan anak-anak kita. Daging yang tumbuh dari harta yang haram hanya akan mengeraskan hati nurani, menjauhkan doa dari pengkabulan Ilahi, dan membakar keberkahan rumah tangga. Bangunlah kultur qana'ah (merasa cukup) dan basathah (kesederhanaan) di bilik keluarga kita. Jadikan rumah tangga kita sebagai benteng moral terdepan yang menolak segala bentuk suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan.

Kedua, **teguhkan niat dakwah dan luruskan orientasi perkhidmatan.** Jangan biarkan riak dinamika politik dan gemerlap kursi kekuasaan mencemari kemurnian niat awal kita melangkah. Politik bagi kita hanyalah wasilah; kemaslahatan rakyat dan tegaknya



Gambar: www.marketeers.com

keadilan adalah cita-cita; dan ridha Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah muara akhir dari seluruh perjumpaan. Jagalah kedisiplinan tilawah Al-Qur'an, tegakkan shalat malam di keheningan fajar, dan basahi lisan dengan istighfar. Kekuatan seorang pemimpin tidak terletak pada kelihaian diplomasinya semata, melainkan pada keintiman hubungannya dengan Sang Pemilik Kekuasaan Yang Hakiki.

Ketiga, pastikan setiap tetes kebijakan membawa keberkahan bagi seluruh tumpah darah Indonesia.

Ingatlah selalu bahwa sumpah jabatan yang kita ucapkan disaksikan oleh langit dan bumi. Hadirkanlah kebijakan yang melindungi anak-anak negeri, merawat kerukunan antarwarga, memajukan pendidikan, dan memartabatkan kaum *mustadh'afin* tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan golongan. Bila amanah ini kita pikul dengan kerendahan hati, kejujuran akal, dan keteguhan iman, insya Allah kekuasaan di tangan kita tidak akan berubah menjadi kehinaan dan penyesalan di hari kiamat. Ia akan berubah menjadi timbangan amal jariyah yang teramat berat, mengalirkan keberkahan abadi bagi bangsa Indonesia, dan mengantarkan kita ke pintu keselamatan di hadapan *Rabbul 'Alamin.*

Selamat berjuang. Luruskan niat, rapatkan barisan, dan istiqamahlah dalam jalan perkhidmatan!

H. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D.
Ketua Majelis Syura
Partai Keadilan Sejahtera

Kepemimpinan Pejabat Publik

Demarkasi Moral dan Struktural: Membedakan Filantropi Pribadi Pejabat dari Tanggung Jawab Fiskal Kebijakan Publik

"Kedermawanan seorang pejabat dari kantong pribadinya adalah kemuliaan akhlak individual. Namun, hak rakyat atas pendidikan yang layak, jalan yang mantap, dan kesehatan yang terjamin tidak boleh digantungkan pada isi dompet seorang pemimpin, melainkan dijamin mutlak oleh ketukan palu anggaran negara."

Kilau Kedermawanan dan Jebakan Personalisasi Kuasa

Di tengah ruang publik yang kian riuh oleh dinamika media sosial, batas antara kebaikan hati seorang individu dan kewajiban konstitusional seorang aparatur negara sering kali mengalami pengaburan yang mencemaskan. Publik kerap disuguhi pemandangan yang mengharukan: seorang kepala daerah muda menyingsingkan lengan baju, menyerahkan amplop atau membelikan ratusan pasang sepatu bagi anak-anak sekolah dasar di pelosok desa, lalu mengumumkan kepada khalayak bahwa seluruh biaya tersebut dipotong langsung dari gaji dan tunjangan pribadinya selama menjabat.

Peristiwa semacam ini, sebagaimana yang sempat mengemuka dalam sorotan publik di Kabupaten Purbalingga melalui gerakan pembagian sepatu sekolah dari gaji bupati, secara spontan memantik gelombang simpati masyara-

kat. Warganet berdecak kagum, kolom komentar dibanjiri doa, dan sang figur seketika dinobatkan sebagai pemimpin teladan yang dermawan.

Secara etika personal dan kebajikan individual, tindakan menyedekahkan pendapatan pribadi demi meringankan beban warga prasejahtera tentu patut diapresiasi. Dalam tradisi moral apa pun, kerelaan berkorban demi orang lain adalah manifestasi luhur dari keluhuran budi pekerti. Namun demikian, ketika kacamata evaluasi digeser dari ranah etika individual menuju ranah administrasi publik dan filsafat kenegaraan, kita dituntut untuk bersikap kritis dan jernih: apakah tindakan filantropis personal tersebut layak dikategorikan sebagai inovasi kebijakan publik?
Jawabannya adalah tidak.

Mereduksi masalah publik menjadi ajang pertunjukan kedermawanan pribadi membawa risiko sistemik yang berbahaya bagi pendewasaan demokrasi. Apabila kesadaran kritis masyarakat tumpul, kita akan terjebak dalam ilusi kepemimpinan mesianik—sebuah cara pandang keliru yang menganggap derita jutaan warga miskin dapat diselesaikan melalui kemurahan hati segelintir elit, bukan melalui perombakan tata kelola negara yang adil.

Pejabat publik yang terpilih dalam mandat elektoral tidak disumpah untuk menjadi seorang sinterklas politik. Mereka disumpah di atas kitab suci untuk menjalankan undang-undang,



gambar : pks.id

> Pejabat publik yang terpilih dalam mandat elektoral tidak disumpah untuk menjadi seorang sinterklas politik. Mereka disumpah di atas kitab suci untuk menjalankan undang-undang, mengelola sumber daya fiskal daerah, dan merekayasa mesin birokrasi agar hak-hak dasar rakyat terpenuhi secara adil dan merata.

mengelola sumber daya fiskal daerah, dan merekayasa mesin birokrasi agar hak-hak dasar rakyat terpenuhi secara adil dan merata. Mengacaukan batas antara dompet pribadi dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) berpotensi melahirkan pengalihan perhatian publik dari problem struktural yang sesungguhnya tengah melanda sebuah wilayah.

Garis Demarkasi Ontologis:
Belas Kasih versus Mandat Konstitusi

Guna membangun kejelasan nalar kebijakan, kita perlu menarik garis demarkasi ontologis yang tegas antara dua entitas yang sangat berbeda wataknya: tindakan karitatif individual (individual philanthropy) di satu sisi, dan kebijakan publik terlembaga (public policy) di sisi lain. Keduanya berdiri di atas fondasi hukum, kapasitas anggaran, serta paradigma pertanggungjawaban yang bertolak belakang.

Tindakan filantropi personal berakar pada belas kasihan sukarela *(charity-based approach)*. Sumber dananya murni berasal dari kantong pribadi sang figur. Karakter utama dari skema ini adalah keterbatasan volume dana dan ketiadaan ikatan hukum yang memaksa. Di Indonesia, gaji pokok resmi seorang bupati atau wali kota diatur secara ketat oleh regulasi pemerintah pusat pada kisaran angka jutaan rupiah, ditambah tunjangan jabatan dan biaya operasional yang memiliki pos pertanggungjawaban spesifik.

Bila seorang kepala daerah menyumbangkan seratus persen gaji pokoknya selama setahun penuh, akumulasi dana tersebut hanya mampu menjangkau ratusan pasang sepatu atau membiayai puluhan anak sekolah. Angka ini teramat kerdil bila disandingkan dengan realitas empiris di lapangan, di mana sebuah kabupaten kerap dihuni oleh puluhan ribu anak prasejahtera yang terancam putus sekolah akibat keterbatasan sarana pendidikan.

Lebih dari itu, bantuan yang keluar dari saku pribadi pejabat tidak membebankan Indikator Kinerja Utama (IKU) kepada kepala dinas pendidikan, tidak tertulis dalam dokumen perencanaan daerah, dan tidak dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yang paling krusial:

program karitatif ini memiliki kerentanan eksistensial yang akut—ia akan musnah dan terlupakan seketika begitu masa jabatan sang pejabat berakhir atau tatkala isi dompet pribadinya telah terkuras habis.

Sebaliknya, kebijakan publik berpijak pada paradigma pemenuhan hak-hak warga negara (rights-based approach) sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 31 UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pemenuhan perlengkapan belajar bagi anak miskin bukanlah hadiah dari kebaikan hati seorang penguasa, melainkan hak asasi konstitusional warga yang wajib dilunasi oleh negara.

Instrumen kebijakan publik tidak digerakkan oleh saku pribadi, melainkan oleh otoritas anggaran publik bernilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah di dalam APBD. Kebijakan publik diikat oleh produk hukum yang sah—berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)—serta dieksekusi oleh ribuan aparatur sipil negara secara profesional. Kebijakan publik tidak boleh bergantung pada suasana hati (mood) seorang pemimpin; sistem tersebut dirancang untuk terus mengalirkan manfaat bagi anak-anak bangsa melintasi pergantian generasi kepemimpinan.

Jebakan Patronase Baru dan Pelemahan Nalar Birokrasi

Mengapa para perumus kebijakan dan akademisi tata kelola pemerintahan


Gambar: freepik.com

begitu cemas terhadap maraknya aksi kedermawanan personal pejabat yang dibesar-besarkan di media massa? Kekhawatiran tersebut berakar pada ancaman sosiologis lahirnya relasi patronase baru yang melumpuhkan daya kritis rakyat dan merusak profesionalitas birokrasi.

Tatkala seorang pemimpin membiasakan warganya menerima bantuan langsung dari kantong pribadinya, secara sadar atau tidak, ia tengah memelihara relasi patron-klien feodal. Rakyat diposisikan sebagai pemohon santunan yang pasif, yang harus menengadahkan tangan dan memuji kebaikan sang penguasa agar nasibnya terselamatkan. Pola interaksi semacam ini mereduksi kedaulatan

warga negara merdeka menjadi budak rasa terima kasih. Warga kehilangan kesadaran untuk menuntut akuntabilitas negara, sebab mereka merasa telah "berhutang budi" secara personal kepada sang bupati, wali kota, atau gubernur.

Pada saat yang sama, personalisasi bantuan semacam ini bekerja laksana anestesi yang mematikan kinerja birokrasi lokal. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)—seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, atau Dinas Pendidikan—dapat dengan mudah berlindung di balik kedermawanan sang pimpinan daerah. Pejabat dinas teknis tidak lagi tertantang untuk memutar otak merancang program beasiswa afirmatif, meneliti data anak putus sekolah, atau memperbaiki alokasi anggaran belanja modal pendidikan, karena lubang kelemahan birokrasi mereka telah ditutupi sementara waktu oleh aksi heroik sang kepala daerah di media sosial.

Ini adalah bentuk kemunduran tata kelola (*governance regression*). Birokrasi yang sehat tidak dibangun di atas aksi sporadis seorang pemimpin, melainkan di atas mekanisme kerja kelembagaan yang baku, terukur, dan berkesinambungan. Ketika energi seorang kepala daerah habis terkuras untuk merancang agenda pembagian bantuan personal dari satu kecamatan ke kecamatan lain demi mengejar sudut rekaman video publikasi, ia sesungguhnya tengah menelantarkan tugas utamanya di meja pemerintahan: mengurai kebuntuan koordinasi lintas sektor, membedah inefisiensi pengadaan barang dan jasa, serta memastikan setiap rupiah pajak yang ditarik dari keringat rakyat kembali dalam bentuk pelayanan publik berkualitas tinggi.

Proporsionalitas Tata Kelola: Menyalurkan Kedermawanan, Menggerakkan APBD

Menolak glorifikasi filantropi personal pejabat tentu tidak bermakna bahwa seorang pemimpin publik dilarang bersedekah atau berbagi harta pribadinya. Islam secara tegas

> Kebijakan publik berpijak pada paradigma pemenuhan hak-hak warga negara (***rights-based approach***) sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 31 UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pemenuhan perlengkapan belajar bagi anak miskin bukanlah hadiah dari kebaikan hati seorang penguasa, melainkan hak asasi konstitusional warga yang wajib dilunasi oleh negara.


Gambar: pks.id

menganjurkan infak, sedekah, dan kedermawanan sosial. Namun, dalam ruang ketatanegaraan yang beradab, penempatan etika dan proporsionalitas peran menjadi kunci utama agar niat suci tidak tergelincir menjadi syahwat politik pencitraan.

Para pemimpin publik muslim binaan PKS dituntut untuk memahami arsitektur tata kelola yang lurus:

Pertama, **Sterilkan ruang dinas dari aksi karitatif mandiri.**
Bila seorang kepala daerah, wakil rakyat, atau menteri memiliki kelapangan rezeki dan berhasrat menyedekahkan sebagian atau seluruh gajinya, salurkanlah kekayaan tersebut melalui kanal filantropi Islam dan institusi sosial resmi yang terverifikasi—seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) terakreditasi, atau nazhir wakaf produktif yang independen. Biarkan lembaga amil profesional tersebut yang menyalurkannya secara objektif berdasarkan skala prioritas mustahik, tanpa embel-embel stiker wajah pejabat, tanpa seremoni pengibaran bendera politik, dan tanpa sorotan kamera dinas humas pemerintah daerah. Dengan cara demikian, kesucian niat amal terlindungi dari racun riya', martabat penerima terjaga, dan prasangka publik mengenai politik uang terselubung dapat dipadamkan sejak dini.

Kedua, **pusatkan seluruh energi kepemimpinan untuk merekayasa APBD.**
Tugas moral terakbar seorang pejabat publik binaan partai dakwah di ruang eksekutif dan legislatif adalah menggerakkan tuas fiskal resmi negara. Jika seorang bupati merasa terenyuh melihat anak-anak di pelosok desanya mengenakan sepatu robek melintasi jalan tanah yang licin, tangisan empati

tersebut tidak boleh berhenti pada pembelian seratus pasang sepatu dari dompet pribadinya. Tangisan nurani itu harus bertransformasi menjadi keberanian politik anggaran di meja perumusan APBD.

Pemimpin tersebut harus memanggil kepala Bappeda, kepala Badan Keuangan Daerah, dan jajaran dinas terkait untuk melakukan perombakan pos belanja daerah. Pangkas anggaran perjalanan dinas aparatur sipil negara yang berlebihan, hapus pos pengadaan mobil dinas baru pimpinan, batalkan proyek renovasi gedung seremonial yang mubazir, lalu alihkan puluhan miliar rupiah pagu anggaran tersebut menjadi dua pilar struktural yang saling mengunci

1. Rekonstruksi puluhan kilometer jalan poros antar-desa agar urat nadi pergerakan anak sekolah dan angkutan hasil bumi mulus tanpa kubangan lumpur (seperti semangat program rekonstruksi infrastruktur "Alus Dalane").
2. Pengalokasian pos beasiswa penuh dan pengadaan perlengkapan belajar terpadu yang diintegrasikan secara yuridis ke dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga hak belajar puluhan ribu anak prasejahtera terkunci secara permanen di dalam sistem APBD setiap tahunnya.

Inilah wujud kepemimpinan publik yang sejati: kepemimpinan yang tidak memanfaatkan kemiskinan warga demi memoles citra kedermawanan diri, melainkan kepemimpinan yang mendayagunakan seluruh wewenang hukum negara untuk memerdekakan rakyat dari belenggu ketidakadilan struktural.

> Tatkala seorang pemimpin membiasakan warganya menerima bantuan langsung dari kantong pribadinya, secara sadar atau tidak, ia tengah memelihara relasi patron-klien feodal.

Mengonversi Kepekaan Nurani Menjadi Kelembagaan Permanen

Sebagai panduan operasional bagi seluruh kepala daerah, pimpinan dewan, dan anggota legislatif yang bernaung di bawah panji dakwah, BP3U DPP PKS meletakkan sebuah kerangka uji kelayakan kepemimpinan (*governance checklist*). Lembar uji ini berfungsi sebagai panduan teknokratis untuk mengonversi kepekaan nurani pribadi menjadi instrumen kebijakan publik yang terinstitusionalisasi dan tahan uji:

- Parameter Legalitas Kebijakan: Apakah terobosan bantuan sosial yang kita gagas telah diikat dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang sah, sehingga tetap wajib dilaksanakan oleh birokrasi siapapun yang memimpin kelak?

- Parameter Skalabilitas Sasaran: Apakah penerima manfaat program ditentukan secara objektif melalui verifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Dapodik guna menghapus preferensi relawan politik, alih-alih dibagikan secara sporadis di lokasi kunjungan kerja?
- Parameter Kausalitas Struktural: Apakah intervensi yang dirancang sanggup menyelesaikan akar persoalan (misalnya membuka akses jalan produksi dan menjamin SPP sekolah), bukan sekadar membagikan komoditas konsumtif sesaat yang habis dalam hitungan bulan?
- Parameter Efisiensi dan Ketahanan Fiskal: Apakah alokasi program bersumber dari realokasi belanja birokrasi yang tidak produktif ke dalam pos belanja modal publik yang memiliki daya ungkit ekonomi jangka panjang?
- Parameter Pelembagaan SOP Birokrasi: Apakah mekanisme pelayanan telah dibakukan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) lintas instansi kedinasan, dilengkapi indikator kinerja yang terukur, serta diaudit secara transparan?

Bila lima pertanyaan audit ini berhasil dijawab dengan pembuktian empiris di lapangan, maka seorang pejabat publik telah berhasil melompat keluar dari jebakan dangkal politik personalitas. Ia telah membuktikan dirinya bukan sekadar seorang politisi dermawan yang mencari panggung, melainkan seorang negarawan sejati yang mewakafkan kecakapan intelektual dan keberanian moralnya demi membangun sistem negara yang melindungi dan memartabatkan seluruh rakyat Indonesia.



Gambar: freepik.com

Keadilan Distributif

dan *Maqashid Syariah* dalam Tata Kelola Anggaran: Menakar Kebijakan Publik Berbasis Maslahat

"Kekuasaan dalam genggaman kepemimpinan Islam bukanlah instrumen dominasi, melainkan amanah perkhidmatan. Setiap rupiah dalam neraca kas negara adalah titipan suci kaum mustadh'afin, yang wajib dialirkan melalui timbangan keadilan distributif demi menjaga martabat kemanusiaan di hadapan hukum dan peradaban."

Menimbang Kaidah Siyasah: Mandat Kesejahteraan Umum

Dalam belantara pemikiran politik Islam klasik hingga modern, relasi antara pemegang kekuasaan dan rakyat diikat oleh doktrin mandat moral yang sangat ketat. Di ranah fiqih siyasah, para ulama meletakkan sebuah kaidah agung yang menjadi batu uji bagi seluruh produk regulasi kenegaraan: *Tasharruful imam 'alar ra'iyyah manuthun bil maslahah*— segala tindakan, kebijakan, dan diskresi seorang pemimpin atas rakyatnya wajib bertumpu dan terikat secara mutlak pada kemaslahatan umum.

Kaidah ini meruntuhkan ilusi kedaulatan mutlak penguasa. Seorang bupati, wali kota, gubernur, menteri, maupun anggota parlemen tidak memiliki kebebasan arbitrer untuk mengalokasikan sumber daya publik demi kepentingan kelompok elit, pemodal pemenangan elektoral, atau kenikmatan birokrasi semata.

Kewenangan anggaran (*budgetary power*) adalah wewenang fidusia: kekuasaan yang dipinjamkan oleh rakyat dan diawasi oleh Sang Pencipta.

Kemaslahatan (*al-maslahah*) dalam tata kelola pemerintahan bukanlah konsep abstrak yang dapat ditafsirkan semau penguasa. Maslahat menuntut pembuktian empiris di lapangan. Ia hadir manakala kebijakan fiskal daerah sanggup mengikis jurang ketimpangan, mengembalikan hak-hak kaum tertindas (*al-mustadh'afin*), serta membebaskan warga negara dari jebakan kemiskinan multidimensi. Mengukur keberpihakan ideologis seorang pejabat publik muslim tidak cukup dengan menyimak lantunan kutipan ayat di atas podium, melainkan dengan membedah ke mana lembaran-lembaran pagu anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diketuk palu.

Perlindungan Jiwa dan Harta: *Dimensi Fiskal Hifdzun Nafs dan Hifdzul Mal*

Doktrin *kulliyatul khams* (lima perlindungan universal) dalam *Maqashid Syariah* kerap dibahas dalam ruang diskursus hukum pidana dan perdata Islam, namun sering kali diabaikan dalam arena kebijakan fiskal. Padahal, arsitektur APBD sesungguhnya adalah manifestasi paling konkret dari penjagaan maqashid tersebut.

Pertama, perlindungan atas jiwa dan keselamatan raga *(Hifdzun Nafs).* Tanggung jawab negara melindungi jiwa rakyat tidak berhenti pada penyediaan aparat keamanan dari ancaman kriminalitas. Dalam realitas sosiologis pedesaan, jiwa seorang ibu hamil yang hendak melahirkan terancam melayang bukan karena tindak kejahatan, melainkan karena ambulans desa terperosok ke dalam kubangan jalan



Gambar: antara

lumpur yang hancur tak beraspal. Jiwa anak-anak petani terancam manakala mereka harus menyeberangi jembatan gantung lapuk yang nyaris putus demi mencapai ruang kelas sekolah.

Oleh karena itu, ketika sebuah pemerintah daerah merekonstruksi ratusan kilometer jalan poros antar-desa melalui program jalan mantap dan memperkuat infrastruktur dasar, tindakan teknokratis tersebut sejatinya adalah ibadah peradaban untuk menegakkan *Hifdzun Nafs.* Anggaran infrastruktur bukan proyek semen dan aspal mati; ia adalah jaminan hak hidup dan mobilitas aman bagi rakyat jelata.

Kedua, perlindungan atas hak kepemilikan dan perputaran ekonomi warga (*Hifdzul Mal*). Al-Qur'an menggariskan peringatan keras agar perputaran kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja (*kay la yakuna dulatan baynal aghniya'i minkum*). Dalam tata kelola daerah, penegakan prinsip ini mewujud pada keberpihakan APBD dalam menjaga ketahanan pangan dan kestabilan ekonomi subsisten warga. Belanja modal daerah yang diarahkan untuk normalisasi saluran irigasi sawah tersier, perbaikan lantai jemur gabah kelompok tani, dan penyediaan resi gudang komoditas lokal adalah instrumen konkret untuk melindungi aset penghidupan kaum dhuafa dari jerat tengkulak dan spekulan pasar.

> Ekspansi modal besar perlahan mematikan warung dan pasar rakyat serta menguras dana desa ke korporasi kota. Pejabat yang membiarkannya atas nama modernisasi telah mengkhianati mandat kerakyatan.

Perlindungan Intelektual: Dimensi *Hifdzul Aql* dan Pemutusan Kemiskinan

Pilar ketiga dari *maqashid syariah* yang memiliki korelasi langsung dengan mobilitas vertikal bangsa adalah pemeliharaan kapasitas nalar dan kecerdasan generasi muda (*Hifdzul Aql*).

Dalam diskursus sosiologi kemiskinan, transmisi kemiskinan antargenerasi (*intergenerational poverty trap*) berlangsung secara berkesinambungan karena anak-anak keluarga buruh harian dan petani marjinal tidak pernah memiliki akses terhadap pendidikan tinggi berkualitas. Tanpa bekal keahlian sains, teknologi, kedokteran, dan manufaktur modern, anak-anak kaum dhuafa ditakdirkan untuk kembali menjadi tenaga kerja kasar bergaji murah di tanah kelahirannya sendiri, sementara posisi-posisi strategis peradaban dan industri

dikuasai oleh mereka yang lahir dari keluarga berada.

Di sinilah mandat syar'i *Hifdzul Aql* menemukan bentuk radikalnya di meja anggaran: negara wajib mengintervensi realitas ketimpangan ini melalui rekayasa fiskal investasi modal manusia skala penuh.

Penyediaan beasiswa perguruan tinggi massal yang dibiayai APBD—mulai dari jenjang diploma terapan, sarjana teknik, hingga dokter spesialis per desa—bukanlah sekadar kebijakan populis pemanis janji elektoral. Kebijakan ini adalah kewajiban ideologis untuk memotong rantai pembodohan struktural. Ketika ribuan mahasiswa dari keluarga prasejahtera dikirim ke kampus-kampus terbaik tanpa dipungut biaya sepeser pun, negara tengah melakukan pemulihan harkat kemanusiaan secara massal. Kecerdasan anak bangsa dimerdekakan agar kelak mereka kembali mengangkat martabat ekonomi keluarganya, membangun daerahnya, dan menjadi benteng kedaulatan sains bagi bangsa Indonesia.

Kritik Ideologis atas Neoliberalisasi Tata Kelola Daerah

Kajian ideologis ini menuntut ketajaman kritis untuk membongkar hegemoni paradigma neoliberal yang diam-diam menyusup ke dalam tata kelola birokrasi daerah di era otonomi. Paradigma neoliberal memandang pelayanan publik semata-mata dari kacamata korporatis: efisiensi anggaran diukur dari seberapa cepat negara dapat melepaskan tanggung jawab penyediaan barang publik kepada mekanisme pasar bebas.

> Keadilan kebijakan mustahil terwujud bila dirumuskan secara elitis dan tertutup. Islam meletakkan musyawarah sebagai fondasi epistemologis dan legitimasi kekuasaan, bukan sekadar tata krama politik.

Kita menyaksikan dampak destruktif dari cara pandang ini di berbagai penjuru tanah air. Sarana-sarana publik dikomersialisasi; akses pendidikan tinggi diperlakukan laksana barang dagangan di bawah kedok privatisasi kampus; tarif layanan air bersih dan kesehatan dasar dinaikkan tanpa mempertimbangkan daya beli kelompok rentan; dan yang paling mencemaskan, pintu investasi daerah dibuka seluas-luasnya bagi jaringan korporasi ritel raksasa modern hingga menusuk ke pelosok-pelosok desa terpencil.

Ekspansi modal besar yang kanibalistik ini secara perlahan mematikan warung kelontong tradisional, menggulung pedagang pasar rakyat, dan menguras likuiditas dana masyarakat desa menuju rekening induk korpo-



Gambar: Kompas

rasi di ibu kota metropolitan. Pejabat publik yang membiarkan invasi pasar bebas memangsa ekonomi rakyat jelata dengan dalih modernisasi sesungguhnya telah melakukan pengkhianatan ideologis terhadap mandat kerakyatan.

Dalam timbangan nilai dakwah, pasar tidak boleh dibiarkan menjadi rimba belantara hukum di mana pemodal besar bebas memakan pedagang kecil. Kekuasaan regulasi negara hadir justru untuk menjadi wasit yang adil: memasang batas zonasi geografis yang ketat, melindungi eksistensi pasar rakyat, dan memaksa konglomerasi ritel bermitra di bawah kepemilikan koperasi masyarakat lokal. Modernisasi tata kelola harus tunduk pada kemaslahatan sosial, bukan sebaliknya.

Keadilan Sosial (*Al-'Adalah Al-Ijtima-'iyyah)* dan Kebijakan Fiskal Inklusif

Prinsip keadilan sosial dalam Islam (*al-'adalah al-ijtima'iyyah*) berakar pada pemahaman bahwa setiap manusia diciptakan setara sebagai hamba Allah (*khalifatullah fil ardh*), dan kepemilikan mutlak atas seluruh sumber daya alam berada di tangan Sang Pencipta. Manusia hanya memegang hak kelola yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial.

Dalam instrumen fiskal daerah, prinsip keadilan sosial ini dioperasionalkan melalui kebijakan pendapatan dan belanja yang bersifat progresif dan afirmatif:

Pertama, kebijakan tarif dan retribusi yang proporsional. Negara tidak boleh menerapkan penyeragaman beban pungutan yang buta terhadap

disparitas ekonomi warganya. Kebijakan pembebasan atau subsidi iuran pelayanan publik—seperti pembebasan retribusi sampah rumah tangga prasejahtera atau subsidi air bersih pedesaan—merupakan perwujudan konkret dari prinsip bahwa mereka yang memiliki daya ekonomi lemah harus diringankan bebannya oleh perlindungan negara. Sebaliknya, kelompok industri dan entitas bisnis bermodal besar wajib menanggung kewajiban kontribusi retribusi yang adil sesuai kapasitas ekonominya.

Kedua, koreksi asimetri fasilitas publik. Keadilan distributif menolak pola pembangunan yang memusatkan gemerlap fasilitas di kawasan elit perkotaan sementara wilayah pelosok dibiarkan gelap gulita dan terisolasi. Pembangunan taman kota yang megah di pusat pemerintahan kehilangan nilainya di hadapan nurani kemaslahatan manakala desa-desa di lingkar terluar kabupaten belum menikmati aliran listrik stabil dan jaringan internet pendidikan. APBD yang berkeadilan adalah APBD yang mendahulukan perbaikan nasib mereka yang paling tertinggal di barisan paling belakang.

Pelembagaan partisipasi bermakna menolak teknokrasi arogan yang merasa tahu kebutuhan rakyat tanpa bertanya. Pejabat publik PKS dituntut mendengar kaum marjinal dan menyusun regulasi bersama rakyat, bukan sekadar untuk rakyat.

Doktrin Syura: Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Regulasi

Keadilan kebijakan mustahil tercapai apabila proses perumusannya dilakukan secara elitis dan tertutup di balik tembok tebal gedung pemerintahan. Islam meletakkan doktrin musyawarah *(wa amruhum syura baynahum)* bukan sekadar sebagai anjuran tata krama politik, melainkan sebagai fondasi epistemologis dan legitimasi kekuasaan.

Di era hukum modern, doktrin syura menemukan padanan hukum substantifnya dalam konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Sebagaimana ditegaskan oleh yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi bermakna menuntut aparatur negara memenuhi tiga hak konstitusional warga secara kumulatif:

1. Hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard*): Masyarakat, khususnya kelompok rentan, buruh tani, penyandang disabilitas, dan pelaku usaha mikro, harus diberikan ruang resmi dan akses yang mudah untuk menyampaikan suara jeritan hidup mere-

ka ke hadapan perumus kebijakan.

2. Hak untuk dipertimbangkan pandangannya (*right to be considered*): Masukan dan kritik publik dalam forum dengar pendapat tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai formalitas pelengkap daftar hadir administratif, melainkan wajib dibedah dan didebatkan secara sungguh-sungguh dalam rapat perumusan pasal-pasal peraturan daerah.
3. Hak untuk mendapatkan penjelasan (*right to be explained*): Pemerintah daerah dan parlemen memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menerangkan secara transparan kepada publik mengenai alasan mengapa suatu masukan diterima atau ditolak di dalam naskah akhir kebijakan.

Pelembagaan partisipasi bermakna ini menolak keras kultur teknokratik arogan yang merasa paling mengetahui apa yang dibutuhkan rakyat tanpa pernah bertanya kepada mereka yang menjalani penderitaan. Pejabat publik binaan PKS dituntut untuk menjadi pendengar yang tekun, membuka pintu ruang sidang bagi kaum marjinal, dan merumuskan regulasi bersama rakyat, bukan sekadar untuk rakyat.

Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Akuntabilitas Hisab Anggaran

Di dalam tradisi Islam, doktrin amar ma'ruf nahi munkar (menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran) sering kali dipersempit pada wilayah moralitas individual. Padahal, medan pertarungan terakbar dari amar ma'ruf nahi munkar sesungguhnya berlangsung di ruang-ruang perumusan kebijakan publik dan penganggaran negara.

> Ketakutan spiritual akan siksa akhirat harus bertransformasi menjadi integritas adminis-tratif yang kedap suap, kebal gratifikasi, dan pantang berkompromi dengan korupsi.

Kemungkaran di ruang kekuasaan jarang sekali hadir dalam bentuk kekerasan fisik kasat mata; ia hadir dalam bentuk yang jauh lebih halus namun berdaya rusak masif: pos anggaran fiktif, pembengkakan biaya perjalanan dinas birokrasi, tawar-menawar proyek pokok pikiran parlemen di bawah meja, serta persekongkolan rente pengadaan barang dan jasa yang merampok hak fakir miskin.

Menegakkan amar ma'ruf di meja pemerintahan menuntut keberanian melakukan pembongkaran sistemik:

- Mengunci transparansi alokasi belanja daerah melalui digitalisasi perencanaan terpadu yang dapat dipantau oleh publik setiap saat.
- Melakukan audit silang secara ketat

terhadap rekam jejak usulan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) agar tidak disalip oleh kepentingan transaksional calo anggaran.

- Membuka hasil laporan kinerja dan audit keuangan secara jujur ke hadapan publik tanpa ada temuan yang disembunyikan.

Keterbukaan data dan transparansi sistem ini adalah perwujudan kesadaran hisab kenegaraan. Seorang pejabat publik yang beriman meyakini bahwa setiap koma, setiap mata anggaran, dan setiap rupiah yang disetujui dalam lembaran APBD akan dipertanggungjawabkan di hadapan mahkamah hisab Ilahi di hari kiamat. Ketakutan spiritual akan siksa akhirat harus bertransformasi menjadi integritas administratif yang kedap suap, kebal gratifikasi, dan pantang berkompromi dengan korupsi.

Sintesis Konseptual: Peta Jalan Menuju Pemerintahan Berbasis Maslahat

Sebagai muara dari telaah ideologis ini, kita merangkum sebuah peta jalan kepemimpinan publik modern yang menyatukan keluhuran nilai wahyu dengan kecakapan tata kelola kontemporer. Model pemerintahan berbasis maslahat bertumpu pada keselarasan tiga dimensi yang saling menguatkan:

Pertama, fondasi spiritualitas yang kokoh. Pemimpin memandang jabatan sebagai ujian amanah dan ladang jihad perkhidmatan, di mana kehormatan diri dijaga lewat kesederhanaan hidup, kebersihan rezeki keluarga, dan penolakan mutlak atas segala bentuk privilese haram kekuasaan.

Kedua, ketajaman teknokratis dan legalitas. Niat luhur dakwah tidak dibiarkan menguap dalam slogan retoris, melainkan dikonversikan secara presisi ke dalam naskah akademik peraturan daerah, dialokasikan dalam pos belanja modal APBD bernilai ratusan miliar rupiah, serta dikawal melalui indikator kinerja utama birokrasi yang terukur secara kuantitatif.

Ketiga, keberpihakan nyata pada kaum mustadh'afin. Ukuran kemuliaan sebuah rezim pemerintahan tidak dilihat dari seberapa megah gedung perkantoran dinas yang dibangun atau seberapa riuh tepuk tangan di media sosial, melainkan dari seberapa nyata beban hidup rakyat termiskin di pelosok desa berhasil diangkat menuju kehidupan yang mulia, merdeka, dan bermartabat.

Inilah haluan perjuangan politik perkhidmatan PKS: mendayagunakan seluruh wewenang konstitusional negara demi menghadirkan keadilan distributif yang membumi, melunasi janji kemerdekaan bangsa, dan mewujudkan tatanan masyarakat madani yang adil, makmur, serta dinaungi keberkahan Ilahi.

3

Analisis Struktural & Kebijakan

Kerangka Struktural Kebijakan

Anatomi Inovasi Daerah: Mengoperasionalkan PP No. 38/2017 dan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) LAN RI

"Inovasi sejati bukanlah letupan kembang api yang memukau sesaat lalu lenyap meninggalkan jelaga kegelapan. Inovasi kebijakan publik adalah pelembagaan akal budi ke dalam mesin hukum dan anggaran negara, memastikan bahwa perlindungan atas martabat rakyat terus bekerja tanpa jeda, melampaui usia kekuasaan para penggagasnya."

Menyingkap Tabir Inovasi: Antara Transformasi dan Kosmetika Politik

Di dalam panggung politik lokal kontemporer, kata "inovasi" telah menjelma menjadi salah satu kosakata yang paling sering diobral sekaligus paling kerap disalahpahami. Hampir setiap peluncuran aplikasi telepon pintar oleh dinas daerah, setiap pergantian nama program santunan, atau setiap aksi teatrikal seorang kepala daerah yang turun langsung ke parit dan kubangan jalan, serta-merta dilabeli dengan stempel megah: terobosan inovasi pelayanan publik.

Namun, ketika tirai publisitas diturunkan dan sorotan kamera meredup, realitas kerap kali memperlihatkan ironi yang getir. Ratusan aplikasi digital yang dibangun dengan biaya miliaran rupiah dari kas daerah mangkrak tak terurus di peladen internet; pos-pos bantuan karitatif terhenti seketika begitu masa

kampanye usai; dan tatanan birokrasi kembali tertidur lelap dalam irama rutinitas lama yang lamban.

Kesenjangan mencolok ini menegaskan sebuah kebutuhan mendesak: kita memerlukan pagar metodologis dan yuridis yang tegas untuk membedakan antara pembaruan tata kelola yang substantif (*systemic innovation*) dengan sekadar kosmetika politik yang mempercantik citra penguasa (political vanity).

Dalam disiplin ilmu administrasi negara dan kebijakan publik modern, inovasi tidak pernah diukur dari seberapa riuh tepuk tangan yang ia timbulkan di jagat maya, melainkan dari seberapa dalam ia mampu merekayasa ulang cara negara menyelesaikan persoalan mendasar rakyatnya. Inovasi adalah perubahan struktural yang dapat diuji manfaatnya secara ilmiah, dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dipertahankan keberlanjutannya melintasi pergantian generasi kepemimpinan politik.

Pagar Yuridis Inovasi: Mengurai Norma Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017

Hukum tata negara Republik Indonesia sesungguhnya telah memancangkan standar yang sangat terang benderang guna menyaring klaim-klaim inovasi di tingkat daerah. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah didefinisikan secara yuridis sebagai semua bentuk pembaruan yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Lebih dari sekadar definisi



konseptual, regulasi ini memasang lima parameter uji kelayakan fundamental yang bersifat kumulatif:

Pertama, mengandung unsur kebaruan (*novelty*). Kebaruan di sini menolak praktik tambal sulam administratif. Mengganti nama program beasiswa lama dengan akronim baru yang disesuaikan dengan nama kepala daerah yang baru dilantik bukanlah inovasi; itu hanyalah daur ulang nomenklatur. Unsur kebaruan menuntut adanya perombakan mekanisme pelayanan, perubahan metode distribusi sumber daya, atau introduksi pendekatan teknologi dan kelembagaan yang belum pernah diterapkan sebelumnya untuk memecahkan kebuntuan birokrasi.

Kedua, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat (*public utility*). Sebuah terobosan baru berhak menyandang status inovasi apabila dan hanya apabila ia mendatangkan perbaikan terukur pada kualitas hidup rakyat jelata. Inovasi harus dibuktikan melalui penurunan angka kematian ibu dan bayi, memendeknya waktu tempuh angkutan hasil bumi, naiknya pendapatan riil buruh tani, atau terbukanya akses pendidikan tinggi bagi anak-anak keluarga prasejahtera. Tanpa adanya kemanfaatan nyata di akar rumput, sebuah ide secanggih apa pun hanyalah monumen kesia-siaan akademis.

Ketiga, tidak mengakibatkan benturan kepentingan (*absence of conflict of interest*). Inovasi daerah tidak boleh dirancang sebagai jubah penyamaran bagi kepentingan rente ekonomi keluarga pejabat, jejaring kroni pengusaha pemenang tender, atau konsolidasi patronase politik partai. Setiap rancang bangun kebijakan harus memiliki garis batas etika yang tebal, memastikan bahwa seluruh faedah material program mengalir murni kepada masyarakat yang berhak, bukan tersedot kembali ke rekening pribadi sang inisiator dan lingkar kekuasaannya.

Keempat, tidak menimbulkan kerugian keuangan negara. Keberanian berinovasi tidak boleh dijadikan alibi pembenaran atas kelalaian prosedur fiskal atau kesembronoan administratif yang membobol neraca kas daerah. Sebuah pembaruan tata kelola wajib tunduk pada tata tertib perbendaharaan negara, memiliki kalkulasi kelayakan

> Dalam disiplin ilmu administrasi negara dan kebijakan publik modern, inovasi tidak pernah diukur dari seberapa riuh tepuk tangan yang ia timbulkan di jagat maya, melainkan dari seberapa dalam ia mampu merekayasa ulang cara negara menyelesaikan persoalan mendasar rakyatnya.

anggaran (cost-benefit analysis) yang presisi, serta diaudit secara transparan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat pengawasan intern pemerintah.

Kelima, memiliki rancang bangun yang dapat direplikasi (*transferability and institutional replicability*). Inovasi kebijakan bukanlah atraksi sulap perseorangan yang rahasianya hanya diketahui oleh sang aktor. Ia harus memiliki cetak biru teknis yang tertulis rapi, *Standard Operating Procedure* (SOP) yang baku, serta indikator kinerja yang terang, sehingga mekanisme keberhasilannya dapat dipelajari, diadaptasi, dan diterapkan oleh pemerintah daerah lain dengan penyesuaian konteks lokal masing-masing.

Kelima parameter PP No. 38 Tahun 2017 ini selaras dengan kriteria Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) yang digawangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yang membedah setiap inisiatif kepemimpinan melalui pisau uji kebaruan, efektivitas, signifikansi keberlanjutan, dan daya transferabilitas kelembagaan.

Empat Kuadran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) LAN RI

Guna melengkapi kerangka yuridis tersebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI merumuskan instrumen evaluasi yang lebih komprehensif melalui Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Kerangka IKK menguji maturitas sebuah intervensi negara ke dalam empat kuadran terpadu yang saling mengunci:

> Hukum tata negara Indonesia menetapkan standar jelas untuk menyaring klaim inovasi daerah. PP No. 38/2017 tentang Inovasi Daerah mendefinisikannya sebagai segala pembaruan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

1. Kualitas Perencanaan Berbasis Bukti (Evidence-Based Planning)

Kebijakan yang bermutu menolak desakan impulsif yang lahir dari syahwat elektoral sesaat. Tahap perencanaan menuntut penelusuran data empiris yang sahih. Perumusan masalah publik tidak boleh bersandar pada asumsi subjektif pejabat di balik meja empuk kantor dinas, melainkan wajib ditopang oleh integrasi basis data terpadu—seperti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Kebijakan berbasis bukti menyajikan argumen kausalitas yang kokoh mengenai mengapa suatu intervensi fiskal dipilih


Gambar: pinterest

dan bagaimana intervensi tersebut secara tepat sasaran akan mengurai akar problem kemiskinan warga.

2. Ketepatan Implementasi Kelembagaan (*Institutional Implementation*)

Sebuah gagasan revolusioner akan mati suri apabila tidak ditopang oleh keandalan struktur birokrasi pelaksana. Dimensi ini menakar kesiapan regulasi turunan, kejelasan mandat pembagian kerja antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), alokasi anggaran operasional yang realistis dalam APBD, serta ketersediaan sistem pemantauan berkala. Kebijakan publik yang kuat memastikan aparatur sipil negara di garda terdepan memiliki panduan operasional yang jelas, kedap kebingungan, dan terbebas dari tumpang tindih kewenangan antar-dinas.

3. Ketajaman Evaluasi Dampak Pasca-Pelaksanaan (*Ex-Post Impact Measurement*)

Sebagaimana digariskan dalam arahan mutakhir Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, keberhasilan sebuah kebijakan dilarang keras berhenti pada laporan administratif mengenai serapan anggaran (*budget spending*) atau sekadar pencapaian keluaran fisik (output). Evaluasi pasca-implementasi menuntut pembuktian dampak substantif (*outcome dan impact*). Mengukur keberhasilan program jalan mantap bukan sekadar mencatat berapa kilometer aspal yang telah dihamparkan, melainkan meneliti apakah waktu tempuh armada logistik pangan petani berkurang, apakah angka kecelakaan lalu lintas menurun, dan apakah biaya perawatan kendaraan warga terpangkas. Demikian pula program beasiswa massal; keberhasilannya bukan diukur dari banyaknya kartu penerima yang dibagikan di atas panggung, melainkan dari tingkat

kelulusan tepat waktu para mahasiswa prasejahtera dan daya ungkit mobilitas ekonomi keluarganya pasca-kelulusan.

4. Kedalaman Transparansi dan Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation)

Kualitas sebuah produk hukum dan kebijakan publik berakar pada legitimasi proses deliberasinya. Mengacu pada doktrin hukum tata negara dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, partisipasi bermakna menuntut aparatur negara memenuhi tiga hak konstitusional warga negara secara terpadu: hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard)*, hak untuk dipertimbangkan pandangannya dalam perumusan pasal kebijakan (*right to be considered*), serta hak untuk memperoleh penjelasan transparan mengenai alasan mengapa suatu masukan diterima atau ditolak (*right to be explained*). Kebijakan yang berkualitas tinggi membuka pintu selebar-lebarnya bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, serikat petani, dan pelaku UMKM untuk ikut merancang masa depan daerahnya sendiri.

Garis Demarkasi: Inovasi Sistemik versus Populisme Karitatif

Memahami anatomi kebijakan publik menuntut ketajaman nalar untuk membedah jurang pemisah antara inovasi sistemik yang terlembaga dengan manuver populisme karitatif yang serba instan.

Dimensi Parameter	Inovasi Kebijakan Publik Sistemik	Populisme Karitatif dan Gestur Viralitas
Sumber Daya & Fiskal	Dibiayai melalui APBD resmi dengan pagu belanja modal/sosial yang diketok palu secara transparan bersama parlemen.	Mengandalkan saku pribadi pejabat, potongan gaji seremonial, atau dana taktis non-bujeter yang fluktuatif dan serba terbatas.
Basis Legalitas & Norma	Berlandaskan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Naskah Akademik, dan SOP birokrasi yang sah.	Bertumpu pada instruksi lisan, diskresi personal sesaat, atau kesepakatan informal tanpa kepastian hukum yang mengikat.
Kapasitas & Skalabilitas	Menggerakkan seluruh mesin birokrasi dan menjangkau puluhan ribu warga berbasis data terpadu daerah.	Bersifat sporadis, berskala mikro, dan terbatas pada sampel kecil warga di sekitar lokasi kehadiran lensa kamera pejabat.
Keberlanjutan Sistem	Terus beroperasi secara otomatis melintasi generasi kendati masa dinas politik sang pejabat telah purna.	Runtuh dan lenyap seketika begitu figur pejabat meletakkan jabatan atau tatkala isi dompet pribadinya telah terkuras.
Orientasi Paradigma	Menjamin hak-hak warga negara secara struktural (rights-based approach) demi memutus mata rantai kemiskinan.	Melanggengkan relasi kuasa patron-klien feodal yang menempatkan warga sebagai pemohon santunan belas kasihan (charity-based).

Tindakan seorang bupati atau wali kota yang menyedekahkan pendapatan pribadinya untuk membelikan puluhan pasang sepatu bagi anak-anak desa miskin adalah kemuliaan budi pekerti personal. Namun tindakan tersebut sama sekali bukan inovasi kebijakan publik. Kedermawanan pribadi tidak menciptakan kewajiban hukum bagi dinas pendidikan untuk mendata seluruh anak prasejahtera, tidak menetapkan indikator kinerja utama bagi birokrasi, dan teramat rapuh untuk memikul beban persoalan kemiskinan daerah yang melibatkan puluhan ribu anak bangsa.

Inovasi kebijakan menuntut kepala daerah tersebut memanggil kepala Bappeda dan tim anggaran, lalu menggunakan mandat kekuasaan negara untuk merekayasa pos belanja APBD: memangkas anggaran perjalanan dinas aparatur yang berlebihan, membatalkan pengadaan mobil dinas baru, lalu mengunci puluhan miliar rupiah anggaran tersebut menjadi peraturan daerah beasiswa dan perlengkapan sekolah gratis yang mengikat secara permanen. Itulah esensi kepemimpinan publik.

Menumbangkan Sindrom Ketergantungan Figur

Tantangan struktural paling kronis yang menghantui keberlanjutan inovasi di daerah-daerah Indonesia adalah apa yang diidentifikasi oleh para sosiolog politik sebagai sindrom ketergantungan figur (*strong leader dependency syndrome*).

Terlalu banyak kisah keberhasilan di tanah air yang berwatak fana. Selama seorang bupati atau gubernur karismatik berkuasa, sebuah program pembaruan tampak berjalan dengan gegap gempita. Namun, begitu lonceng masa jabatan berdentang dan terjadi pergantian kekuasaan dalam suksesi pilkada, program unggulan tersebut mendadak layu sebelum berkembang. Pejabat baru yang terpilih—didorong oleh ego politik diferensiasi dan keengganan melanjutkan panggung warisan pendahulu—segera menghentikan alokasi anggaran, menelantarkan sarana yang telah dibangun, atau mengganti nama program dengan akronim baru yang membingungkan aparatur pelaksana.

Kerapuhan ini berpangkal pada satu kegagalan fatal: inovasi tersebut hanya dilekatkan pada figur manusia, bukan diikatkan pada institusi negara.

Untuk menumbangkan sindrom ketergantungan figur ini, kepemimpinan publik menuntut strategi pelembagaan

> Kebijakan yang bermutu menolak desakan impulsif yang lahir dari syahwat elektoral sesaat. Tahap perencanaan menuntut penelusuran data empiris yang sahih

> Sebuah gagasan revolusioner akan mati suri apabila tidak ditopang oleh keandalan struktur birokrasi pelaksana.

tiga tingkat (*three-tier institutionalization*):

Pertama, **pelembagaan yuridis (*legal codification*).** Sebuah gagasan terobosan wajib dituangkan ke dalam produk hukum daerah berkekuatan mengikat tinggi, yakni Peraturan Daerah (Perda) inisiatif yang dibahas secara mendalam bersama legislatif, bukan sekadar bersandar pada Surat Keputusan (SK) bupati yang dapat dibatalkan dalam hitungan detik oleh penggantinya.

Kedua, **pelembagaan perencanaan (*planning integration*).** Inovasi daerah harus dikunci secara eksplisit ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis (Renstra) dinas-dinas teknis terkait. Dengan tercatatnya program dalam dokumen induk perencanaan, birokrasi karier memiliki mandat legal dan kewajiban profesional untuk terus mengalokasikan anggarannya dari tahun ke tahun.

Ketiga, **pelembagaan kultural (*cultural internalization*).** Nilai-nilai baru yang dibawa oleh inovasi harus ditransformasikan menjadi etos kerja harian aparatur sipil negara. Ketika birokrasi dan masyarakat telah merasakan langsung efisiensi dan keadilan dari suatu sistem tata kelola, mereka sendirilah yang akan menjadi benteng pertahanan pertama yang menolak pembatalan sistem tersebut tatkala tampuk politik berganti nahkoda.

Skema Ketahanan Fiskal: Urgensi Dana Abadi Daerah

Tantangan struktural kedua yang tidak kalah pelik adalah kerentanan kapasitas fiskal daerah. Sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih mengidap ketergantungan kronis terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, sementara ruang fiskal mandiri yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) teramat sempit.

Program-program inovasi yang berorientasi pada investasi jangka panjang—seperti pembiayaan beasiswa pendidikan tinggi massal multi-tahun atau penyediaan subsidi kesehatan komprehensif—membutuhkan kepastian likuiditas dana yang stabil. Apabila perekonomian nasional mengalami kontraksi atau penerimaan bagi hasil migas dan mineral anjlok, program-program investasi sosial ini kerap kali menjadi korban pertama yang anggarannya dipangkas demi menyelamatkan pos belanja rutin birokrasi.

Menghadapi jebakan ketidakpastian ini, tata kelola modern menuntut terobosan arsitektur fiskal melalui pembentukan Dana Abadi Daerah

(*Regional Endowment Fund*).

Sebagaimana diamanatkan dalam kerangka hukum desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan negara, pemerintah daerah yang memiliki keleluasaan fiskal pada masa-masa surplus komoditas diwajibkan menyisihkan sebagian dana cadangan ke dalam instrumen dana abadi yang diatur melalui peraturan daerah. Pokok dana abadi tersebut dikunci secara permanen dan tidak boleh dibelanjakan untuk urusan operasional rutin, melainkan diinvestasikan secara aman ke dalam portofolio berisiko rendah yang dijamin negara.

Hasil imbal hasil (*yield*) dari pengelolaan dana abadi inilah yang dialirkan secara khusus untuk membiayai program-program strategis generasi masa depan: menjamin SPP ribuan mahasiswa prasejahtera hingga wisuda, membiayai riset terapan komoditas lokal unggulan, serta mendanai pelatihan vokasi pemuda pedesaan. Dengan mengadopsi skema dana abadi, program pembangunan manusia tidak akan lagi terombang-ambing oleh pasang surut APBD tahunan ataupun fluktuasi siklus politik lima tahunan.

Melalui kepatuhan terhadap lima parameter PP No. 38/2017, internalisasi empat pilar IKK LAN RI, keberanian menanggalkan sindrom figuritas, serta penguatan benteng dana abadi daerah, kita meletakkan fondasi bagi hadirnya tata kelola pemerintahan daerah yang sejati: tata kelola yang tidak membius rakyat dengan ilusi sensasi, melainkan menghadirkan negara yang bekerja nyata, melindungi, dan memuliakan harkat seluruh warga negaranya.



Gambar: kompas.com

Analisis Sektoral Daerah I:

Pendidikan Dan Sumber Daya Manusia

Rekayasa Fiskal Modal Manusia: Menakar Terobosan dan Uji Keberlanjutan Program "Berani Cerdas" Sulawesi Tengah

"Inovasi sejati bukanlah letupan kembang api yang memukau sesaat lalu lenyap meninggalkan jelaga kegelapan. Inovasi kebijakan publik adalah pelembagaan akal budi ke dalam mesin hukum dan anggaran negara, memastikan bahwa perlindungan atas martabat rakyat terus bekerja tanpa jeda, melampaui usia kekuasaan para penggagasnya."

Paradoks Kekayaan Alam dan Lanskap Demografi Sulteng

Provinsi Sulawesi Tengah hari ini berdiri di persimpangan sejarah yang amat krusial. Dalam lanskap ekonomi makro nasional, jazirah ini kerap kali dielu-elukan sebagai episentrum pertumbuhan baru. Angka pertumbuhan produk domestik regional bruto melonjak tinggi, dipacu oleh deru mesin industri pengolahan nikel, hilirisasi mineral, serta ekspansi kawasan industri hilir yang menyedot modal raksasa dari dalam dan luar negeri.

Namun, di balik grafik statistik yang menjulang megah, tersimpan paradoks pembangunan yang getir. Di balik dinding pabrik-pabrik smelter yang berasap dan pelabuhan bongkar muat yang tak pernah tidur, sebagian besar warga lokal justru mendapati diri mereka terpinggirkan di tanah kelahirannya sendiri. Sebagian besar tenaga kerja lokal terserap hanya pada pos-pos pekerjaan

kasar berupah rendah dan berisiko tinggi. Sementara itu, jabatan insinyur metalurgi, geolog terapan, analis lingkungan, hingga manajer rantai pasok industri modern harus didatangkan dari luar wilayah atau bahkan tenaga kerja asing, dengan alasan klasik: ketimpangan kompetensi dan disparitas mutu pendidikan tinggi lokal.

Realitas struktural ini diperberat oleh dinamika sosiologis kependudukan. Dari sekitar 3,16 juta jiwa penduduk Sulawesi Tengah, lebih dari separuhnya—hampir 50 persen—merupakan representasi dari Generasi Z dan Generasi Milenial. Daerah ini tengah berada di bibir jendela peluang emas bonus demografi. Jika gelombang pemuda usia produktif ini tidak dibekali penguasaan sains, keahlian teknik, dan integritas profesional, maka jendela emas tersebut tidak akan melahirkan lompatan kemakmuran, melainkan bom waktu pengangguran terbuka, degradasi sosial, dan kekecewaan kolektif yang akut.

Di tengah kegelisahan struktural itulah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido meluncurkan inisiatif terobosan bertajuk Program "Berani Cerdas". Berbeda dari bantuan pendidikan konvensional yang kerap kali berwatak karitatif dan sporadis, program ini dirancang sebagai rekayasa fiskal terencana untuk mengubah lanskap modal manusia kawasan timur Indonesia.

Arsitektur Anggaran: Lompatan Fiskal di Meja Parlemen

Keseriusan sebuah kebijakan publik tidak pernah diukur dari seberapa syahdu orasi seorang pejabat di atas mimik panggung, melainkan dari keberanian mengalokasikan angka-angka riil di dalam neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di ranah ini, "Berani Cerdas" mencatatkan keberanian politik anggaran yang luar biasa agresif.

Pada tahun anggaran 2025, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp84,93 miliar yang berhasil menyentuh pembiayaan bagi 23.568 mahasiswa aktif asal Sulawesi Tengah di berbagai perguruan tinggi. Namun, menyadari bahwa disparitas akses ke perguruan tinggi masih membelenggu puluhan ribu anak

Keseriusan sebuah kebijakan publik tidak pernah diukur dari seberapa syahdu orasi seorang pejabat di atas mimik panggung, melainkan dari keberanian mengalokasikan angka-angka riil di dalam neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

keluarga prasejahtera dan kepulauan terpencil, alokasi tersebut mengalami eskalasi luar biasa pada tahun anggaran 2026. Pemerintah daerah bersama parlemen menyepakati kenaikan plafon anggaran sektor ini secara eksponensial hingga menembus angka Rp351 miliar—sebuah lonjakan alokasi lebih dari empat kali lipat.

Dari total postur fiskal tersebut, sekitar Rp264 miliar dialokasikan khusus untuk pembiayaan beasiswa perguruan tinggi lintas jenjang (Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, Doktoral, hingga Pendidikan Dokter Spesialis). Program ini diproyeksikan menjangkau lebih dari 30.000 mahasiswa aktif, mencakup mahasiswa penerima lanjutan maupun gelombang penerima baru dari keluarga prasejahtera yang tersebar di 13 kabupaten dan kota.

Namun, kekuatan arsitektur program ini tidak berhenti pada jenjang kampus semata. Peta alokasi belanja "Berani Cerdas" memperlihatkan rancang bangun intervensi yang saling mengunci antarsektor:

Pertama, Uji Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK sebesar Rp21,56 miliar. Kebijakan ini menyasar akar persoalan ketenagakerjaan vokasi. Alih-alih membiarkan lulusan sekolah menengah kejuruan lokal ditolak industri karena ketiadaan lisensi standar kerja, negara hadir membiayai sertifikasi berstandar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di sektor manufaktur, permesinan, dan pertambangan, sehingga sertifikat kompetensi mereka langsung memiliki daya tawar di gerbang industri hilirisasi.

> Salah satu titik paling rawan dalam tata kelola bantuan sosial pendidikan di Indonesia adalah praktik klientelisme politik: beasiswa disandera oleh tim sukses kepala daerah, dibagikan berdasarkan kedekatan keluarga pejabat, atau disalurkan kepada mereka yang memegang kartu anggota partai pendukung.

Kedua, Beasiswa Magister (S2) Guru Daerah Terpencil sebesar Rp2,48 miliar. Kualitas murid mustahil melompat jika kapasitas pendidiknya dibiarkan terbelakang. Bantuan ini difokuskan untuk menyekolahkan 99 guru yang mengabdi di wilayah terpencil, terdalam, dan kepulauan terluar (3T) melalui kerja sama perguruan tinggi terbuka, guna meningkatkan kompetensi pedagogik di garis depan pendidikan.

Ketiga, Afirmasi Perlengkapan dan Seragam Sekolah sebesar Rp1,75 miliar.

Pos ini menyasar anak-anak keluarga buruh harian dan petani miskin agar tidak ada satu pun anak usia sekolah yang putus belajar hanya karena rasa rendah diri akibat seragam yang compang-camping atau ketiadaan sepatu.

Keempat, Infrastruktur Konektivitas Satelit Digital sebesar Rp0,43 miliar. Disparitas geografis kepulauan Sulawesi Tengah—seperti di gugusan Banggai Laut, Kepulauan Togean, dan pulau-pulau kecil lainnya—kerap memutus akses informasi sekolah pedalaman. Dengan memasang jaringan internet satelit berkecepatan tinggi berbasis konstelasi satelit orbit rendah, sekolah-sekolah di pulau terluar memperoleh materi ajar dan kurikulum digital yang setara secara real-time dengan sekolah-sekolah unggulan di Kota Palu.

Empat Pilar Penguncian Kelembagaan

Banyak inisiatif beasiswa daerah di masa lalu layu sebelum berkembang atau terseret kasus hukum karena hanya bersandar pada instruksi personal kepala daerah tanpa tata kelola yang teruji. Program "Berani Cerdas" mencoba mematahkan kerentanan tersebut dengan memasang empat pilar penopang kelembagaan:

1. Klausul Ikatan Dinas dan Mitigasi Brain Drain

Penyakit kronis beasiswa daerah adalah hilangnya penerima manfaat pasca-kelulusan. Mahasiswa yang disekolahkan dengan uang rakyat kerap memilih menetap di kota-kota metropolitan Pulau Jawa atau luar negeri, sementara daerah asalnya tetap kekurangan



Progeam Berani Cerdas
gambar : bc.sultengprov.go.id/

tenaga terampil.

Untuk memutus siklus kebocoran modal manusia ini, program "Berani Cerdas"—khususnya pada jalur pembiayaan pendidikan kedokteran umum dan dokter spesialis—diikat secara ketat dengan klausul perjanjian ikatan dinas. Melalui target strategis "Satu Desa Satu Dokter", mahasiswa kedokteran yang dibiayai penuh oleh kas daerah menandatangani kontrak hukum yang mewajibkan mereka kembali mengabdi di puskesmas-puskesmas pembantu pedesaan dan fasilitas kesehatan terpencil Sulawesi Tengah minimal selama kurun waktu tertentu setelah menyelesaikan masa residensi. Kebijakan ini memastikan bahwa setiap rupiah pajak yang ditarik dari rakyat kembali menjadi perlindungan kesehatan bagi rakyat di pelosok desa.

2. Digitalisasi Terpadu dan Pemutusan Celah Klientelisme

Salah satu titik paling rawan dalam tata kelola bantuan sosial pendidikan di Indonesia adalah praktik klientelisme politik: beasiswa disandera oleh tim sukses kepala daerah, dibagikan berdasarkan kedekatan keluarga pejabat, atau disalurkan kepada mereka yang memegang kartu anggota partai pendukung.

Dalam "Berani Cerdas", mekanisme penerimaan dan verifikasi dipusatkan melalui portal daring terbuka (bc.sultengprov.go.id). Sistem ini mengintegrasikan data pendaftar dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikdasmen serta Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Integrasi data tunggal berbasis nomor induk kependudukan ini meminimalisir intervensi subyektif pejabat dinas, menyingkirkan pemohon yang berasal dari keluarga mapan, serta memastikan bahwa kuota afirmasi benar-benar jatuh ke tangan anak-anak keluarga pra-sejahtera dan yatim piatu yang membutuhkan.

Dalam "Berani Cerdas", mekanisme penerimaan dan verifikasi dipusatkan melalui portal daring terbuka (bc.sultengprov.go.id). Sistem ini mengintegrasikan data pendaftar dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikdasmen serta Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

3. Integrasi Pembiayaan Biaya Kuliah dan Fasilitas Pendukung

Inovasi ini menolak pola pikir administratif sempit yang memandang beasiswa sebatas pembayaran uang kuliah tunggal (tuition fee). Anak miskin

sering kali terpaksa berhenti kuliah bukan semata-mata karena SPP, melainkan karena biaya hidup, akses gawai belajar, dan literasi teknologi yang timpang. Dengan menyandingkan alokasi beasiswa perkuliahan dengan penuntasan infrastruktur digital satelit di sekolah asal mereka di kepulauan 3T, pemerintah daerah membangun sebuah jembatan ekosistem belajar yang menyeluruh sejak bangku sekolah menengah hingga jenjang sarjana.

4. Kepatuhan Yuridis dan Dialog Parlemen

Di meja legislatif, pengalokasian anggaran bernilai ratusan miliar rupiah tentu tidak berjalan di ruang hampa. Program ini sempat memicu perdebatan dialektis yang hangat dengan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah mengenai legalitas nomenklatur pos anggaran, mekanisme pertanggungjawaban hibah, dan kesiapan serapan dinas pendidikan.

Banyak inisiatif beasiswa daerah di masa lalu layu sebelum berkembang atau terseret kasus hukum karena hanya bersandar pada instruksi personal kepala daerah tanpa tata kelola yang teruji.

Respons pemerintah daerah yang menindaklanjuti perdebatan tersebut melalui penyiapan peraturan kepala daerah yang rigid, sinkronisasi dengan peraturan daerah APBD, serta penyusunan petunjuk teknis yang dapat diaudit secara terbuka oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi bukti penting bahwa sebuah kebijakan publik yang sehat harus berani diuji di hadapan hukum tata negara dan perwakilan rakyat.

Audit Kebijakan: Menguji Dampak Kausal versus Pertumbuhan Alami

Dalam disiplin administrasi publik modern dan kerangka evaluasi pasca-implementasi (ex-post impact measurement) BSKDN Kemendagri, keberhasilan Program Berani Cerdas dilarang keras berhenti pada laporan administratif pencairan anggaran atau angka klaim jumlah pendaftar di portal internet.

Pemerintah daerah tidak boleh terjebak pada sesat pikir evaluasi: mengklaim bahwa naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah atau turunnya angka kemiskinan makro daerah adalah dampak kausal sepihak dari program beasiswa ini. IPM dan angka kemiskinan dipengaruhi oleh puluhan faktor perancu (*confounding factors*), seperti lonjakan harga komoditas tambang global, belanja perlindungan sosial nasional, dan iklim panen pertanian lokal.

Untuk membuktikan bahwa



Program Berani Cerdas Sulteng
gambar : sulteng.disway.id

"Berani Cerdas" adalah sebuah inovasi kebijakan yang berdaya guna secara ilmiah, jajaran perumus kebijakan daerah harus mampu menjawab lima pertanyaan audit kausalitas:

Pertama, **apakah bantuan ini mengubah kurva mobilitas ekonomi keluarga miskin?** Riset kebijakan harus mampu membuktikan secara empiris bahwa proporsi terbesar penerima beasiswa berasal dari desil satu dan dua kemiskinan daerah, bukan keluarga kelas menengah yang secara mandiri memang sanggup membiayai kuliah anak-anak mereka.

Kedua, **bagaimana tingkat penyelesaian studi (*completion rate*) para penerima manfaat?** Menyalurkan beasiswa di awal semester adalah capaian keluaran (*output*), namun memastikan mahasiswa prasejahtera tersebut lulus tepat waktu dengan indeks prestasi kumulatif yang kompetitif dan terhindar dari putus kuliah di tengah jalan adalah capaian hasil (*outcome*).

Ketiga, **bagaimana kesiapan serapan perguruan tinggi lokal?** Lonjakan kuota puluhan ribu mahasiswa menuntut kesiapan rasio dosen, laboratorium sains, dan fasilitas perpustakaan di kampus-kampus lokal di Palu, Luwuk, Poso, dan Toli-Toli. Jika perguruan tinggi lokal tidak diimbangi penguatan mutu akademik, maka penambahan mahasiswa massal berisiko menurunkan standar lulusan.

Keempat, **apa indikator keterserapan kerja pasca-kelulusan?** Apakah alumni beasiswa teknik pertambangan dan kimia industri berhasil menduduki pos manajerial di kawasan industri

Morowali dan sekitarnya, ataukah mereka tetap menjadi penonton di luar pagar pabrik?

Kelima, dan yang paling krusial: bagaimana skema ketahanan fiskal daerah jangka panjang?

Menghadapi Jebakan Kerentanan Fiskal: Pelajaran untuk Daerah Lain

Ketergantungan program beasiswa berskala Rp351 miliar pada postur APBD tahunan menghadirkan risiko likuiditas yang tidak ringan. Jika di masa depan penerimaan bagi hasil migas dan royalti mineral anjlok, atau transfer dana dari pemerintah pusat mengalami penge-tatan akibat dinamika fiskal makro nasional, pos belanja beasiswa ratusan miliar ini rentan menjadi sasaran efisiensi anggaran.

Apabila anggaran beasiswa dipangkas mendadak di tengah jalan, ribuan mahasiswa yang sedang menjalani semester akhir terancam terlantar pendidikannya.

Oleh karena itu, keberlanjutan Program "Berani Cerdas" menuntut evolusi tata kelola dari sekadar alokasi belanja tahunan biasa menuju pembentukan Dana Abadi Pendidikan Daerah (*Regional Education Endow-ment Fund*). Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu segera mengunci sebagian surplus pendapatan asli daerah dan bagi hasil tambang pada masa-masa panen komoditas ke dalam instrumen dana abadi yang dipayungi peraturan daerah inisiatif. Hasil imbal hasil (*yield*) dari pengelolaan dana abadi yang dikelola secara profesional dan bebas risiko inilah yang akan menjamin bahwa ribuan anak buruh dan nelayan di pelosok kepulauan tetap dapat berkuliah secara gratis, terlepas dari pasang surut APBD tahunan maupun pergantian tampuk kepemimpinan gubernur di masa depan.

Bagi pemerintah daerah lain di Indonesia, khususnya yang dipimpin oleh kepala daerah dan fraksi parlemen binaan Partai Keadilan Sejahtera, studi kasus "Berani Cerdas" di Sulawesi Tengah memberikan preseden pembelajaran yang sangat berharga:

- Inovasi kebijakan publik tidak lahir dari retorika pencitraan di media sosial, melainkan dari keberanian politik merealokasikan pos-pos belanja birokrasi yang boros menjadi investasi modal manusia bernilai ratusan miliar rupiah.

Inovasi kebijakan publik tidak lahir dari retorika pencitraan di media sosial, melainkan dari keberanian politik merealokasikan pos-pos belanja birokrasi yang boros menjadi investasi modal manusia bernilai ratusan miliar rupiah.

- Membangun sumber daya manusia menuntut keberanian berpikir holistik: memadukan pembiayaan biaya kuliah di hulu dengan penguatan sertifikasi kompetensi industri dan infrastruktur konektivitas internet satelit di hilir.
- Perlindungan hukum dan verifikasi data tunggal yang transparan adalah vaksin terbaik untuk melindungi kebijakan kerakyatan dari jerat manipulasi politik dan pembusukan klientelisme.

Ketika kekuasaan daerah diperlakan bukan sebagai tahta kenikmatan melainkan sebagai tuas keadilan distributif, maka APBD bukan lagi sekadar susunan angka akuntansi yang kering. Di tangan para pemimpin yang berjiwa negarawan, APBD menjelma menjadi tangan negara yang bekerja nyata: mengangkat derajat anak-anak kaum dhuafa dari lumpur keputusasaan, memerdekakan nalar intelektual mereka, dan meletakkan batu fondasi yang kokoh bagi tegaknya martabat peradaban Indonesia.



Gambar : www.faktasulteng.id
Bank Sulteng Tuntaskan Penyaluran
Beasiswa 'Berani Cerdas' untuk 15.663 Siswa

Analisis Sektoral Daerah II:

Infrastruktur dan Konektivitas Rakyat

Menyambung Urat Nadi Ekonomi Desa: Realitas Fiskal, Mutu Teknis, dan Uji Dampak Program *"Alus Dalane"* Purbalingga

"Jalan raya di pedesaan bukan sekadar bentangan agregat batu dan aspal hitam; ia adalah garis hidup yang menentukan apakah panen sayur mayur petani sempat sampai ke pasar kota sebelum membusuk, dan apakah seorang anak sekolah tiba di kelasnya dengan seragam yang kering dan rasa percaya diri yang utuh."

Menembus Kabut Kaki Gunung Slamet: Krisis Aksesibilitas dan Realitas Geografis

Kabupaten Purbalingga, yang membentang di lereng tenggara Gunung Slamet, menyimpan bentang lanskap yang subur sekaligus menantang secara geomorfologis. Jaringan perbukitan vulkanik, kelembapan udara yang tinggi, dan curah hujan tahunan yang melimpah menjadikan kawasan ini lumbung potensial bagi komoditas hortikultura, perkebunan sayur-mayur, serta industri manufaktur kerakyatan seperti bulu mata palsu dan knalpot rumahan.

Namun, karunia geografis tersebut kerap berhadapan dengan kerentanan infrastruktur transportasi yang kronis. Jalan-jalan kabupaten yang melintasi kecamatan-kecamatan lereng—seperti Karangjambu, Karangmoncol, Bojongsari, hingga Rembang—secara berkala didera kerusakan parah. Struktur tanah yang labil bercampur

gerusan air limpasan hujan ekstrem membuat lapisan perkerasan aspal mudah terkelupas, menyisakan kubangan-kubangan lumpur yang memutus isolasi geografis warga desa.

Dampak dari kerusakan jalan pedesaan tidak pernah bersifat tunggal; ia memicu efek domino yang melumpuhkan sendi-sendi perekonomian rakyat jelata. Truk-truk bak terbuka dan pikap pengangkut kubis, cabai, dan daun bawang milik kelompok tani terperosok berjam-jam di tanjakan berlumpur. Keterlambatan distribusi logistik mengakibatkan penurunan kesegaran hasil panen, yang seketika menjatuhkan harga jual di tangan tengkulak. Di saat yang sama, para pemilik armada angkutan pedesaan dan pengendara motor warga harus menanggung lonjakan biaya pemeliharaan suku cadang kendaraan akibat suspensi yang patah dan ban yang cepat aus.

Lebih getir lagi, jalan rusak adalah ancaman nyata bagi keselamatan jiwa (*hifdzun nafs*). Ibu hamil yang mengalami kegawatdaruratan persalinan harus bertaruh nyawa di dalam mobil ambulans desa yang terguncang hebat melintasi lubang-lubang jalan yang menganga, sementara anak-anak sekolah dasar kerap terjatuh dari sepeda ontel mereka karena menghin-dari ceruk aspal yang tergenang air hujan.

Di tengah lanskap problematik inilah, kepemimpinan Bupati Fahmi Muhammad Hanif dan Wakil Bupati



Proyek *"Alus Dalane"* Purbalingga
gambar : www.purbalinggakab.go.id

Dimas Prasetyahani meluncurkan program prioritas rekonstruksi jalan bertajuk *"Alus Dalane"*. Slogan bahasa Jawa yang berarti "Mulus Jalannya" ini diikhtiarkan sebagai manifestasi negara yang hadir secara fisik di depan pintu gerbang rumah warga desa.

Kontraksi Fiskal dan Keberanian Realokasi Anggaran

Dalam diskursus administrasi publik, mengumbar janji pembangunan jalan mantap adalah retorika politik yang paling mudah diobral. Namun, membuktikan janji tersebut di atas meja neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tengah keterbatasan ruang fiskal adalah ujian kenegarawanan yang sesungguhnya.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga diperhadapkan pada kalkulasi teknokratis yang berat. Berdasarkan estimasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), total kebutuhan anggaran riil untuk menuntaskan seluruh ruas jalan kabupaten yang berkondisi rusak berat dan rusak sedang mencapai tidak kurang dari Rp400 miliar. Sementara itu, postur keuangan daerah Purbalingga mengalami tekanan yang tidak ringan. Pada Perubahan APBD tahun 2026, total plafon anggaran daerah justru mengalami kontraksi fiskal, menyusut dari Rp2,107 triliun menjadi Rp2,052 triliun akibat penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat dan terbatasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

> "Jalan raya di pedesaan bukan sekadar bentangan agregat batu dan aspal hitam; ia adalah garis hidup yang menentukan apakah panen sayur mayur petani sempat sampai ke pasar kota..."

Menghadapi celah pendanaan yang menganga, kepemimpinan daerah menolak menyerah pada alasan ketiadaan uang. Alih-alih membiarkan proyek jalan mangkrak, pemerintah daerah mengambil langkah berani: melakukan realokasi dan efisiensi radikal pada pos-pos belanja birokrasi yang bersifat seremonial, perjalanan dinas aparatur yang berlebihan, serta proyek fisik non-esensial. Dari pengetatan pos belanja tersebut, dipadukan dengan optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan advokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi maupun pusat, pemerintah daerah berhasil mengunci alokasi anggaran infrastruktur jalan berkisar antara Rp90 miliar hingga Rp122 miliar.

Anggaran puluhan miliar rupiah ini difokuskan secara presisi untuk merekonstruksi lebih dari seratus ruas jalan prioritas yang menjadi tulang punggung mobilitas warga. Skema penganggaran ini memperlihatkan

kecakapan membedah skala prioritas: jalan poros antar-kecamatan yang menghubungkan kantong produksi pertanian menuju pasar induk kabupaten didahulukan ketimbang jalan-jalan perkotaan yang tingkat urgensinya lebih rendah.

Rekayasa Teknis: Menolak Kosmetika Tambal Sulam

Kelemahan paling fatal dari proyek jalan daerah di Indonesia di masa lalu adalah mentalitas "proyek tambal sulam". Lubang jalan hanya ditutup dengan adukan semen sekadarnya atau lapisan aspal tipis tanpa pemadatan yang benar, sekadar untuk meredam kemarahan warga atau melayani sorotan kamera pejabat yang sedang melakukan inspeksi mendadak. Tatkala musim penghujan tiba beberapa bulan kemudian, lapisan tambalan tersebut hanyut tersapu banjir, dan anggaran daerah terbuang sia-sia.

Program "Alus Dalane" berupaya memutus siklus pemborosan tersebut dengan menegakkan disiplin rekayasa teknik sipil (civil engineering standards):

Pertama, **Spesifikasi Material Berlapis.** DPUPR Purbalingga mewajibkan kontraktor pelaksana menerapkan standar perkerasan aspal beton berkualitas tinggi. Pada ruas-ruas jalan bertonase berat, struktur perkerasan menggunakan kombinasi dua lapis: lapisan pondasi perata (*Asphalt Concrete-Binder Course* atau AC-BC) yang dipadatkan secara mekanis guna meredam beban dinamis gandar kendaraan, dilapisi di atasnya oleh lapisan aus (*Asphalt Concrete-Wearing Course* atau AC-WC) dengan butiran agregat padat dan kadar aspal yang teruji laboratorium agar kedap air serta memiliki cengkeraman ban yang optimal.

> "Ibu hamil yang mengalami kegawatdaruratan persalinan harus bertaruh nyawa di dalam mobil ambulans desa yang terguncang hebat melintasi lubang-lubang jalan yang menganga."

Kedua, **Penguncian Sistem Drainase Beton.** Kerusakan aspal di wilayah tropis bercurah hujan tinggi hampir selalu bermula dari air yang menggenangi bahu jalan (water ponding). Dalam "*Alus Dalane*", setiap kontrak rekonstruksi jalan diwajibkan menyertakan pekerjaan saluran drainase samping (*side ditches*) berbahan beton cetak (*u-ditch* atau pasangan batu kali) yang terkoneksi langsung ke badan air alami. Dengan menjauhkan air limpasan dari tepi badan aspal, usia pakai jalan (*pavement lifetime*) dapat diperpanjang secara signifikan melampaui lima hingga delapan tahun.



Proyek *"Alus Dalane"* Purbalingga
gambar : jateng.tribunnews.com

Ketiga, **Inspeksi Kepatuhan Lapangan** dan Manajemen Waktu. Bupati dan Wakil Bupati secara berkala melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pengaspalan bersama tim laboratorium penguji bahan, memeriksa ketebalan hamparan (*core drill test*), serta meng-audit suhu pemadatan aspal panas (*hotmix*). Manajemen waktu kerja juga dipacu secara ketat agar penuntasan ruas-ruas utama diselesaikan pada jendela musim kemarau, menghindari kegagalan ikatan aspal akibat terpaan air hujan saat penghamparan.

Evaluasi Dampak Ekonomi Mikro: Memulihkan Daya Beli Desa

Dalam kerangka Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) LAN RI dan pedoman evaluasi dampak pasca-implementasi (*ex-post measurement*) BSKDN Kemendagri, keberhasilan sebuah proyek infrastruktur dilarang keras diukur hanya dari volume serapan anggaran atau panjang kilometer jalan yang telah diresmikan.

Ukuran keberhasilan substantif jalan raya terletak pada efek limpasan (*spillover effect*) terhadap denyut

> “Seratus pasang sepatu dari kantong pribadi bupati adalah karitatif mikro; puluhan kilometer aspal adalah kebijakan publik terlembaga.”

ekonomi masyarakat terbawah:

1. **Pemangkasan Biaya Logistik Pertanian:** Mulusnya ruas-ruas penghubung sentra sayuran di lereng pegunungan Purbalingga memotong waktu tempuh armada pengangkut hasil bumi hingga 40–50 persen. Penurunan waktu tempuh ini secara langsung mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan menekan tingkat kerusakan sayur mayur yang mudah busuk (perishable goods), sehingga margin keuntungan yang diterima petani desa meningkat secara riil.
2. **Efisiensi Armada Angkutan dan Daya Beli**: Bagi para sopir angkutan pedesaan, ojek pangkalan, dan buruh harian yang melintasi jalan kabupaten setiap hari, jalan yang bebas lubang memperpanjang usia suku cadang kendaraan mereka. Biaya rutin untuk mengganti shockbreaker, lahar roda, dan ban luar yang biasanya membengkak ratusan ribu rupiah per bulan dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan biaya sekolah anak-anak mereka.
3. **Akselerasi Layanan Publik Dasar: Ruas** jalan yang mantap memungkinkan ambulans puskesmas keliling menjangkau dusun-dusun terpencil dalam hitungan menit pada masa-masa kritis darurat medis. Guru-guru sekolah dapat tiba di ruang kelas tepat waktu tanpa risiko terjatuh di jalanan licin, dan anak-anak dapat bersepeda ke sekolah dengan rasa aman.

Pelajaran Demarkasi: Sepasang Sepatu versus Puluhan Kilometer Aspal

Dinamika kepemimpinan di Purbalingga memberikan laboratorium pembelajaran yang amat berharga bagi studi administrasi publik modern, khususnya terkait garis batas antara aksi filantropi personal pejabat dan mandat kebijakan publik terlembaga.

Di satu sisi, publik disuguhi aksi humanis Bupati Fahmi Muhammad Hanif yang menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangan jabatannya untuk membagikan sepatu sekolah secara langsung kepada ratusan anak-anak keluarga prasejahtera melalui gerakan pembagian sepatu. Aksi ini memicu gelombang pujian emosional di media sosial dan memperlihatkan keluhuran budi pekerti personal sang pemimpin muda.

Namun, telaah kebijakan publik menuntut kejernihan nalar: seratus atau dua ratus pasang sepatu dari kantong pribadi bupati adalah tindakan karitatif

mikro (*individual charity*). Berapa pun besarnya pengorbanan gaji pokok seorang kepala daerah, volume dana tersebut secara matematis tidak akan pernah sanggup mengentaskan puluhan ribu anak prasejahtera di selu-ruh penjuru kabupaten dari jerat kemiskinan ekstrem. Tindakan tersebut tidak mengikat secara hukum dalam dokumen perencanaan daerah, tidak membebankan indikator kinerja pada dinas teknis, dan rentan musnah seketika begitu masa jabatan sang figur berakhir.

Sebaliknya, program "Alus Dalane" adalah kebijakan publik sejati (*genuine public policy*). Program ini tidak bersandar pada dompet pribadi pejabat, melainkan mengerahkan mesin birokrasi, mengikatkan diri pada persetujuan parlemen daerah, dan menggerakkan anggaran resmi negara senilai lebih dari Rp90 miliar di dalam APBD.

Dua ratus pasang sepatu yang dibagikan dari gaji pribadi tidak akan mampu menyelamatkan masa depan seorang anak petani jika jalan penghubung desanya tetap hancur, membuat hasil panen orang tuanya busuk di jalan dan memiskinkan keluarganya. Namun, puluhan kilometer jalan aspal berkualtas tinggi yang dibangun melalui sistem negara akan mengalirkan rezeki ratusan miliar rupiah ke kantong-kantong keluarga desa, memungkinkan para orang tua petani membeli sepatu, buku, dan makanan bergizi untuk anak-anak mereka secara mandiri dan bermartabat tanpa perlu menanti belas kasihan penguasa.

Studi Pembanding dan Cetak Biru Ketahanan Aset Jalan Masa Depan

Sebagai studi pembanding atas inovasi konektivitas layanan di Jawa Tengah, inisiatif Program Dokter Spesialis Keliling *(Speling)* yang digagas pemerintah provinsi menghadirkan komplementaritas yang menarik: jika "Speling" mengubah paradigma dengan mendekatkan dokter spesialis ke desa-desa terpencil, maka program "*Alus Dalane*" di Purbalingga menyediakan landasan fisik jalan raya yang memungkinkan armada medis bergerak cepat tanpa kendala medan.

Menatap masa depan, keberlanjutan program perbaikan jalan di Purbalingga menuntut evolusi tata kelola dari sekadar proyek fisik menuju sistem Manajemen Aset Jalan Daerah Berbasis Digital (*Geographic Information System/GIS Road Asset Management*).

> "Mengumbar janji pembangunan jalan mantap adalah retorika politik yang paling mudah diobral. Namun, membuktikan janji tersebut di atas meja neraca APBD adalah ujian kenegarawanan."



Purbalingga
Gambar: detik.com

Pemerintah daerah perlu membangun basis data geospasial terbuka yang memetakan kondisi setiap meter ruas jalan kabupaten secara real-time. Dengan algoritma pemeringkatan objektif—yang menghitung kepadatan arus kendaraan, keterhubungan sentra pangan, serta tingkat kemiskinan wilayah—penentuan ruas jalan yang diprioritaskan untuk diaspal murni didasarkan pada data kebutuhan masyarakat (*evidence-based planning*), bukan atas dasar desakan lobi politik anggota dewan atau popularitas wilayah di media sosial.

Melalui keberanian merealokasi pos APBD di tengah keterbatasan fiskal, penegakan mutu teknik sipil yang kedap kompromi, serta pemahaman yang jernih mengenai perbedaan antara sedekah pribadi dan mandat anggaran negara, Kabupaten Purbalingga membuktikan sebuah tesis kepemimpinan publik:

Ketika seorang pejabat menolak terpukau oleh popularitas instan di dunia maya dan memilih bekerja tekun di ruang sidang anggaran serta medan jalanan berdebu, ia sedang meletakkan batu fondasi bagi hadirnya keadilan distributif yang nyata. Jalan yang mulus dan mantap bukan sekadar karya beton di atas tanah, melainkan jembatan peradaban yang mengangkat harkat kaum mustadh'afin menuju kemandirian hidup yang bermartabat.

Analisis Sektoral Daerah III:

Inklusi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Mendobrak Paradigma Karitatif: Terobosan Perda Inisiatif Disabilitas Jawa Timur dan Intervensi Padat Karya Surabaya

"Ukuran peradaban sebuah masyarakat tidak dinilai dari seberapa megah gedung-gedung pencakar langit yang menjulang di pusat kota, melainkan dari seberapa adil dan bermartabat ia memperlakukan warganya yang paling rentan. Menjamin hak penyandang disabilitas bukan amal belas kasihan penguasa, melainkan pelunasan hutang konstitusi atas harkat kemanusiaan yang setara."

Dari Belas Kasih Menuju Hak Asasi: Dekonstruksi Paradigma Disabilitas

Selama puluhan tahun pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, penanganan kelompok penyandang disabilitas kerap terperangkap dalam jebakan paradigma belas kasihan (*charity-based approach*). Dalam cara pandang karitatif yang sempit ini, penyandang disabilitas hanya diposisikan sebagai objek penderita yang pasif: sasaran empati musiman yang menanti paket sembako menjelang hari raya, penerima kursi roda di depan sorotan kamera seremonial dinas sosial, atau kelompok marjinal yang dianggap sebagai beban keluarga dan tanggungan negara.

Pendekatan karitatif semacam ini secara sistemik mereduksi kedaulatan warga negara merdeka. Ia melanggengkan jurang segregasi sosial dan menutup mata terhadap hambatan struktural yang sesungguhnya membelenggu kaum difabel. Hambatan tersebut



gambar : Antara

bukan terletak pada keterbatasan fisik atau sensorik yang mereka miliki, melainkan pada rancang bangun fasilitas publik yang diskriminatif, pintu pasar kerja formal yang terkunci rapat, serta sistem hukum yang abai terhadap hak-hak dasar mereka.

Di Provinsi Jawa Timur, urgensi perubahan paradigma ini terasa kian mendesak tatkala dihadapkan pada realitas demografis yang masif. Berdasarkan pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pendataan sosial daerah, populasi penyandang disabilitas di Jawa Timur tercatat berkisar antara 1,86 juta jiwa hingga menembus 3,42 juta jiwa bila memperhitungkan spektrum disabilitas psikososial dan ragam disabilitas ganda. Jutaan anak bangsa ini hidup berdampingan dengan tantangan aksesibilitas: trotoar yang tidak ramah tongkat pemandu, gedung pelayanan publik bertingkat tanpa lift landai, instansi pemerintah yang menolak pelamar tunarungu, serta ketiadaan juru bahasa isyarat di ruang pengadilan dan fasilitas medis.

Kebuntuan peradaban ini menuntut koreksi struktural. Menjawab panggilan keadilan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur memprakarsai per-ombakan paradigma total dari model belas kasih menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia (*rights-based approach*).

> “Ukuran peradaban sebuah masyarakat tidak dinilai dari gedung pencakar langit, melainkan dari seberapa adil dan bermartabat ia memperlakukan warganya yang paling rentan.”

Melalui fungsi legislasi daerah, parlemen menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah subjek hukum yang berdaulat, mandiri, dan berhak atas pemenuhan hak-hak kewargaan yang setara di hadapan negara.

Arsitektur Yuridis Perda Inisiatif DPRD Jawa Timur: Kuota Kerja dan Aksesibilitas

Lompatan kelembagaan di Jawa Timur bermula dari keberanian politik DPRD Jawa Timur bersama jajaran Komisi E dalam menginisiasi dan mengesahkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas.

Berbeda dari regulasi masa lalu yang kerap dipenuhi norma-norma imbauan yang ompong (*soft law*), Perda Inisiatif ini memancangkan klausul afirmatif yang mengikat secara hukum (*hard law*) dengan sanksi administratif yang terang:

Pertama, **Penguncian Kuota Tenaga Kerja Sektor Formal.** Salah satu akar kemiskinan penyandang disabilitas adalah diskriminasi dalam rekruitmen kerja. Menghadapi tembok eksklusi ini, Perda mewajibkan instansi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan instansi vertikal di wilayah Jawa Timur mempekerjakan sedikitnya 2 persen penyandang disabilitas dari total formasi pegawai. Sementara itu, bagi entitas perusahaan swasta skala menengah dan besar, regulasi mengunci kuota wajib sekurang-kurangnya 1 persen. Penguncian kuota ini diiringi kewajiban penyediaan fasilitas akomodasi yang layak di lingkungan kerja, memastikan pekerja difabel dapat berproduksi secara aman dan nyaman tanpa intimidasi.

Kedua, **Standardisasi Aksesibilitas Lingkungan Terbangun.** Perda mewa-jibkan seluruh fasilitas publik baru maupun revitalisasi infrastruktur lama—mulai dari terminal bus, stasiun kereta api, rumah sakit, puskesmas, hingga gedung sekolah dan kantor perizinan—menerapkan standar desain universal (*universal accessibility design*). Penyediaan bidang miring landai *(ramp),* ubin pemandu bertekstur (*guiding block*), toilet khusus pengguna kursi roda, serta perangkat informasi visual dan audio dwibahasa bukan lagi pilihan pelengkap estetika, melainkan syarat mutlak dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ketiga, **Jaminan Bantuan Hukum Pro Bono dan Perlindungan**

Peradilan. Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum kerap mengalami viktimisasi ganda akibat kesulitan berkomunikasi atau kerentanan psikologis. Perda menggariskan kewajiban bagi pemerintah provinsi untuk menyediakan pendampingan hukum cuma-cuma (*pro bono legal aid*) serta meng-hadirkan saksi ahli dan penerjemah bahasa isyarat bersertifikat di setiap tingkatan peradilan dan kepolisian.

Keberanian DPRD Jawa Timur melahirkan regulasi inisiatif ini memperlihatkan fungsi representasi parlemen yang sesungguhnya: parlemen bukan sekadar tukang stempel kebijakan gubernur (rubber stamp), melainkan pabrik hukum progresif yang mendengarkan rintihan kaum terpinggirkan dan mengonversinya menjadi Sperlindungan hukum permanen.

Pelembagaan *"Nothing About Us Without Us":* Mandat Komisi Disabilitas Daerah

Kelemahan paling fatal dari banyak regulasi perlindungan kelompok rentan di Indonesia adalah fenomena paternalisme birokrasi: pejabat non-difabel merasa paling tahu apa yang terbaik bagi kaum difabel, merumuskan aturan di balik pintu kantor dinas yang tertutup, lalu meluncurkan program yang sama sekali tidak menjawab kebutuhan di lapangan.

Untuk meruntuhkan mentalitas paternalistik tersebut, Perda Inisiatif Disabilitas Jawa Timur memancangkan sebuah terobosan kelembagaan yang revolusioner: memandatkan pembentukan Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Jawa Timur sebagai lembaga pemantau independen.

Berdasarkan mandat Perda, KDD dirancang beranggotakan sembilan orang komisioner dengan satu syarat afirmatif mutlak yang mengunci: sedikitnya 50 persen dari komposisi komisioner wajib berasal dari unsur penyandang disabilitas itu sendiri.

Klausul ini merupakan perwujudan konkret dari adagium perjuangan hak asasi manusia internasional: *Nothing about us without us* (Tiada keputusan tentang kami tanpa keterlibatan kami)—atau dalam khazanah hukum klasik dikenal sebagai nihil de nobis, sine nobis.

Dengan mendudukkan perwakilan difabel sebagai pengambil keputusan di tubuh komisi, KDD memiliki legitimasi moral dan kapasitas substantif untuk menjalankan tiga fungsi pengawasan strategis:

1. **Audit Kepatuhan Kebijakan:** Me-

> "Menjamin hak penyandang disabilitas bukan amal belas kasihan penguasa, melainkan pelunasan hutang konstitusi atas harkat kemanusiaan yang setara sebagai warga negara."

mantau apakah instansi pemda dan swasta benar-benar memenuhi kuota kerja formal 2 persen dan 1 persen, serta mempublikasikan hasil audit kepatuhan tersebut secara terbuka kepada publik tahunan.

2. **Kanal Pengaduan dan Advokasi Korban:** Menerima laporan warga atas praktik diskriminasi layanan publik, penolakan siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler inklusi, atau penolakan fasilitas perbankan terhadap warga tunanetra.
3. **Kawal Regulasi Pelaksana:** Menyadari bahaya mandeknya peraturan daerah di meja eksekutif, parlemen mengultimatum Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk merampungkan sedikitnya tiga Peraturan Gubernur (Pergub) pelaksana paling lambat dalam tempo enam bulan sejak Perda diundangkan. KDD bertindak sebagai mitra kritis yang memastikan draf Pergub teknis tersebut tidak melenceng atau memperlemah norma dasar yang telah ditetapkan dewan.

Rekayasa Belanja Publik Kota Surabaya: Intervensi Padat Karya dan Satu Data

Bila di tingkat Provinsi Jawa Timur pembaruan ditopang melalui instrumen hukum legislasi, maka di tingkat pemerintah kota kita menyaksikan inovasi eksekutif dalam merekayasa anggaran belanja daerah guna menyerap tenaga kerja rentan. Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi



Kegiatan padat Karya | gambar : Kompas.com

menghadirkan terobosan tata kelola melalui Program Padat Karya Terpadu yang diintegrasikan dengan sistem Satu Data Surabaya.

Paradigma konvensional penanggulangan kemiskinan perkotaan di Indonesia umumnya bertumpu pada penyaluran bantuan sosial tunai. Pendekatan ini terbukti tidak berdaya mengangkat keluarga miskin dari jurang ketergantungan, menyedot kas daerah tanpa melahirkan nilai tambah ekonomi, serta rentan disalahgunakan sebagai komoditas politik klientelisme.

Pemerintah Kota Surabaya mengubah haluan tersebut dengan memanfaatkan kekuatan APBD secara cerdas: menggunakan belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja bagi warga prasejahtera.

Intervensi ini beroperasi melalui mekanisme yang terstruktur rapi:
Pertama, **Pemanfaatan Aset Tidur Pemkot.** Lahan-lahan kosong milik pemerintah kota yang selama ini terbengkalai disulap menjadi sentra-sentra ekonomi produktif: rumah potong unggas, bengkel cuci mobil terpadu, tambak budidaya lele dan udang vaname, lahan pertanian hidroponik perkotaan, kafe rakyat, hingga bengkel jahit konveksi seragam dinas.

> “Pendekatan karitatif mereduksi kedaulatan warga negara merdeka, melanggengkan segregasi sosial, dan menutup mata terhadap hambatan struktural yang membelenggu kaum difabel.”

Kedua, **Integrasi Basis Data Tunggal Kemiskinan.** Melalui portal Satu Data Surabaya, intervensi penempatan tenaga kerja tidak lagi bersandar pada memo rekomendasi lurah atau calo politik lokal. Data penerima dipilah secara transparan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) keluarga miskin ekstrem, menyaring warga yang kehilangan mata pencaharian, lansia mandiri, dan anggota keluarga prasejahtera yang menganggur.

Ketiga, **Jaminan Penyerapan Pasar Internal APBD.** Salah satu penyebab runtuhnya program pemberdayaan UMKM adalah kegagalan memasarkan produk. Surabaya memecahkan masalah ini dengan mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalihkan belanja pengadaannya ke sentra padat karya: pengadaan paving blok untuk pembenahan saluran drainase kampung dibeli dari unit padat karya warga miskin, makan siang rapat dinas dipasok dari katering ibu-ibu prasejahtera, dan seragam sekolah siswa digarap oleh bengkel jahit padat karya.

Melalui integrasi hulu-hilir belanja negara ini, laporan pemerintah daerah

mencatat lompatan pendapatan bagi sebagian warga binaan hingga mencapai kisaran Rp4 juta hingga Rp6 juta per bulan—sebuah lompatan luar biasa bagi keluarga yang sebelumnya berpenghasilan di bawah upah minimum kota.

Audit Kausalitas dan Uji Keberlanjutan Pasca-Kontrak

Sekalipun kedua inisiatif di Jawa Timur dan Surabaya menghadirkan optimisme baru, pisau evaluasi kebijakan publik modern—sebagaimana digariskan dalam kerangka Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) LAN RI dan pedoman ex-post measurement BSKDN Kemendagri—menuntut audit kausalitas yang jernih.

Kita tidak boleh terjebak dalam euforia statistik sesaat. Keberhasilan program afirmatif harus diuji melalui telaah risiko dan keberlanjutan struktural jangka panjang:

Pertama, **Uji Ketahanan Pasca-Kontrak Pemerintah (Exit Strategy Challenge).** Pada kasus Program Padat Karya Surabaya, ketergantungan unit-unit usaha warga terhadap belanja dinas pemerintah menyimpan kerentanan pasar yang serius. Angka pendapatan hingga Rp6 juta per bulan sebagian besar bersandar pada suntikan pesanan APBD. Pertanyaan auditnya adalah: apakah unit usaha padat karya ini mampu bertahan secara mandiri dan bersaing secara kompetitif di pasar bebas tatkala masa kontrak pengadaan pemerintah telah selesai, atau ketika kas daerah mengalami efisiensi?

> "Perda Inisiatif Disabilitas Jawa Timur mengunci kuota kerja 2 persen di pemda/BUMD dan 1 persen di perusahaan swasta sebagai afirmasi hukum atas hak kerja difabel."

Tanpa adanya peningkatan kapabilitas manajerial, efisiensi rantai pasok mandiri, dan penetrasi ke konsumen swasta, sentra padat karya berisiko bubar seketika begitu pesanan dinas terhenti. Pemerintah daerah tidak boleh sekadar menciptakan "pasar buatan" (*artificial market*), melainkan wajib melatih para pekerja menuju kemandirian korporasi usaha mikro yang tahan banting.

Kedua, **Uji Kepatuhan Kuota Tenaga Kerja Difabel Lapangan.** Pada implementasi Perda Disabilitas Jawa Timur, tantangan terberat terletak pada penegakan hukum di meja perusahaan swasta dan instansi pemerintah daerah itu sendiri. Memasukkan angka kuota 2 persen dan 1 persen ke dalam naskah hukum perda adalah langkah awal yang mudah. Namun, membuktikan bahwa angka kuota tersebut benar-benar terserap menuntut audit ketat terhadap



gambar : Antara

syarat kualifikasi kerja. Banyak lowongan pekerjaan sektor formal yang secara terselubung masih mencantumkan syarat diskriminatif seperti "sehat jasmani dan rohani tanpa cacat fisik", yang seketika menggugurkan berkas lamaran sarjana difabel. Dinas Ketenagakerjaan dan KDD diuji integritasnya untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan atau dinas yang memanipulasi pemenuhan kuota tersebut.

Ketiga, **Uji Kausalitas Penurunan Angka Kemiskinan Makro.** Pemerintah daerah sering kali mengklaim bahwa penurunan angka pengangguran terbuka atau perbaikan indeks pembangunan manusia daerah adalah dampak kausal langsung dari inisiatif padat karya. Secara metodologis, riset kebijakan menuntut pemisahan antara dampak langsung intervensi lokal dengan faktor perancu eksternal (*confounding factors*), seperti stabilitas upah minimum regional, pertumbuhan investasi swasta, dan kucuran bansos pemerintah pusat. Evaluasi berkala berbasis data longitudinal mutlak diperlukan untuk membuktikan berapa persentase keluarga miskin yang benar-benar lepas permanen dari status desil kemiskinan berkat intervensi ini.

Cetak Biru Replikasi Kebijakan Afirmatif bagi Parlemen Daerah

Bagi jajaran pimpinan daerah dan fraksi parlemen di berbagai penjuru nusantara, khususnya para legislator dan kepala daerah yang mengemban panji

> “Keberhasilan program afirmatif harus diuji melalui telaah risiko dan keberlanjutan struktural jangka panjang, bukan euforia statistik sesaat dalam kebijakan publik.”

perkhidmatan Partai Keadilan Sejahtera, dialektika kebijakan di Jawa Timur dan Surabaya menyajikan cetak biru (*policy blueprint*) yang sangat berharga:

- **Legislasi Harus Melompat Menjadi Pembongkar Struktur Ketimpangan.** Fraksi partai di dewan tidak boleh terjebak dalam rutinitas rapat formalitas yang mandul. Anggota legislatif harus proaktif melahirkan Peraturan Daerah Inisiatif yang berani mendobrak *status quo* diskriminasi sosial. Mengadopsi klausul kuota afirmasi kerja formal, mewajibkan Komisi Disabilitas Daerah independen, dan mengultimatum batas waktu peraturan kepala daerah adalah model nyata dari fungsi legislasi yang membela kaum *mustadh'afin.*
- **APBD Harus Dialirkan Sebagai Tuas Kemandirian,** Bukan Candu Santunan. Pengentasan kemiskinan perkotaan menuntut keberanian merekayasa pos belanja modal dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Alih-alih menghamburkan anggaran untuk paket bansos konsumtif yang habis dalam hitungan hari, alirkan anggaran tersebut untuk membangun sarana kerja produktif, membeli hasil keringat rakyat kecil, dan mengangkat harkat keluarga miskin menjadi pekerja berdaya yang menerima upah bermartabat.
- **Keberpihakan Ideologis Berpijak pada Data Tunggal yang Sahih.** Kebijakan afirmatif hanya akan berhasil jika ia bersih dari manipulasi politik dan favoritisme relawan elektoral. Penguncian data sasaran berbasis Nomor Induk Kependudukan, verifikasi silang DTSEN dan Dapodik, serta keterbukaan informasi publik adalah dinding pertahanan terbaik yang menjaga agar hak-hak kaum marjinal tidak dibajak oleh kepentingan kroni penguasa.

Ketika parlemen daerah berani menggunakan hak inisiatifnya untuk membela kaum disabilitas dan eksekutif daerah cakap mengalirkan belanja negara demi memberdayakan warga prasejahtera, kita sedang menyaksikan pertautan agung antara etika moral dan kecakapan teknokratis. Di titik itulah negara hadir dalam wujudnya yang paling luhur: negara yang tidak membiarkan satu pun anak bangsanya tertinggal di belakang, melainkan merangkul dan mengangkat martabat seluruh warganya menuju kehidupan yang adil, setara, dan sejahtera.

Analisis Sektoral Multi-wilayah:

Transparansi Parlemen Dan Reformasi Pokir

Menyapu Ruang Gelap Anggaran: Menguji Efektivitas E-Pokir, Reviu Tata Kelola, dan Partisipasi Bermakna Parlemen Daerah

"Parlemen adalah jantung deliberasi kedaulatan rakyat, bukan bursa transaksi proyek kedinasan. Menjaga kemurnian pokok pikiran dewan adalah ikhtiar menyapu ruang gelap anggaran dengan cahaya integritas data, memastikan setiap rupiah kas daerah kembali sebagai pemenuhan hak kaum yang diwakili."

Anatomi Stigma Pokir: Dari Mandat Representasi Menuju Ancaman Rente Anggaran

Dalam bentang ketatanegaraan daerah di era otonomi, fungsi anggaran (budgeting) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu instrumen paling vital dalam mendistribusikan keadilan. Melalui agenda reses dan serap aspirasi konstituen, setiap wakil rakyat mengemban mandat konstitusional untuk menangkap rintihan warga di daerah pemilihan: jembatan desa yang terputus, jalan usaha tani yang berlumpur, gedung posyandu yang bocor, hingga ketiadaan peralatan bagi kelompok perajin mikro. Usulan-usulan masyarakat akar rumput inilah yang secara formal diadministrasikan ke dalam dokumen resmi yang dikenal sebagai Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

Secara konseptual dan yuridis, Pokir adalah manifestasi sah dari fungsi



Anggota DPR RI **Abdul Kharis Almasyhari** secara simbolis menyerahkan wayang kepada dalang Ki Tatut Sutanto. dalam Pentas wayang semalam suntuk digelar di Lapangan Kaplingan, Kecamatan Jebres Kota Solo pada Senin (28/8) | Foto : solo.kilat.com

representasi. Ia dirancang sebagai jembatan koreksi atas kelemahan perencanaan birokrasi teknokratis eksekutif yang kerap kali mengidap rabun jauh terhadap kantong-kantong persoalan di pedalaman desa. Melalui Pokir, anggota legislatif memastikan anggaran belanja daerah tidak hanya terkonsentrasi di lingkar kantor bupati atau kawasan elit perkotaan, melainkan menjangkau warga di pinggiran.

Namun demikian, sejarah panjang tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia mencatat paradoks yang getir. Dalam praktiknya, Pokir kerap mengalami distorsi peran yang parah dan terstigma sebagai sarana korupsi yang sistemik. Di banyak daerah, Pokir berubah watak menjadi "dana aspirasi transaksional" atau bancakan proyek di bawah meja.

Penyimpangan ini terjadi melalui berbagai modus operandi: usulan Pokir diselundupkan secara mendadak pada malam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa melalui verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); proyek-proyek fisik dipecah menjadi paket-paket kecil guna menghindari tender terbuka; penentuan rekanan kontraktor pelaksana dikendalikan secara rahasia oleh oknum anggota dewan atau jejaring tim sukses elektoralnya; hingga alokasi anggaran yang dialirkan jauh di luar daerah pemilihan demi merawat patronase politik pribadi.

Stigma ruang gelap inilah yang

menjadikan Pokir sebagai titik paling rawan intervensi penegakan hukum dan sorotan publik. Menghadapi krisis legitimasi representasi ini, sejumlah pimpinan parlemen daerah di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara menghadirkan inovasi pembenahan tata kelola: Daerah Istimewa Yogyakarta melalui digitalisasi verifikasi E-Pokir, Kabupaten Grobogan melalui penataan reviu lintas instansi, serta Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui inovasi korektif pasca-supervisi komisi antirasuah.

Digitalisasi E-Pokir DIY: Memutus Mata Rantai Usulan Siluman

Pemberian teladan tata kelola legislasi bermula dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Nuryadi. Menyadari bahwa ruang gelap anggaran bersumber dari ketiadaan jejak audit dokumen usulan fisik yang rentan dimanipulasi, Sekretariat DPRD DIY bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengembangkan dan mengoperasionalkan sistem aplikasi E-Pokir.

Inovasi digital ini dirancang bukan sekadar sebagai aplikasi pencatat surat masuk, melainkan sebagai instrumen rekayasa alur kerja (workflow system) yang mengikat secara ketat dan transparan: Pertama, **Penguncian Garis Waktu Perencanaan (Timeline Locking).** Sistem E-Pokir diintegrasikan langsung dengan arsitektur Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Usulan aspirasi warga hasil reses anggota dewan diwajibkan masuk ke dalam peladen sistem pada jendela waktu yang telah ditentukan sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD diketok palu. Begitu batas waktu penutupan sistem tiba, sistem secara otomatis terkunci rapat. Mekanisme ini secara mutlak mematikan praktik purba penyisipan anggaran "siluman" di tengah malam saat rapat paripurna pengesahan APBD menjelang fajar.

Kedua, **Audit Jejak Dokumen dan Geotagging.** Setiap usulan aspirasi yang diunggah oleh wakil rakyat ke dalam E-Pokir wajib melampirkan berkas bukti autentik: berita acara reses yang ditandatangani pengurus rukun warga atau kelompok masyarakat, daftar hadir warga peserta reses, foto kondisi fisik sarana yang rusak, serta koordinat titik lokasi geospasial yang akurat. Lampiran data primer ini menghalangi munculnya proposal bantuan fiktif atau kegiatan rekaan calo anggaran.

Ketiga, **Penyaringan Berlapis Lintas Instansi.** Alur E-Pokir mewajib-

> “Pokir adalah manifestasi sah dari fungsi representasi; jembatan koreksi atas kelemahan perencanaan birokrasi teknokratis eksekutif.”

kan tiga tahapan verifikasi yang bertingkat: verifikasi administratif oleh Sekretariat DPRD guna memastikan kelengkapan berkas, verifikasi substansi teknis oleh dinas teknis terkait (seperti Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Pertanian) untuk menguji kelayakan konstruksi dan kesesuaian harga satuan, serta verifikasi pagu anggaran oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bila suatu usulan dinilai tidak layak secara teknis atau menabrak rencana tata ruang wilayah, dinas teknis berhak menolak usulan tersebut dengan memberikan catatan formal yang terekam dalam sistem.

Kendati digitalisasi E-Pokir DIY telah menertibkan administrasi birokrasi parlemen, pisau analisis kebijakan mencatat satu tantangan kualitatif yang fundamental: sistem ini masih beroperasi dominan sebagai transparansi administratif internal aparatur. Lompatan pembaruan berikutnya menuntut pembukaan portal E-Pokir ini ke hadapan mata publik luas. Masyarakat sipil, akademisi, dan warga pengusul berhak mengakses dasbor pelacak *(tracking dashboard*) guna memantau secara mandiri apakah usulan jembatan desa mereka disetujui, dipangkas, atau direalisasikan di lapangan.

Reviu Lintas Sektor Grobogan: Menegakkan Filter Kelayakan Teknis

Bila DPRD DIY memelopori penguncian sistem melalui platform perangkat lunak, maka di tingkat pemerintah kabupaten kita menyaksikan keberanian kepemimpinan legislatif dalam menata ulang tata krama prosedural pembahasan anggaran. Hal ini terlihat di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Lusia Indah Artani.

> "Stigma ruang gelap inilah yang menjadikan Pokir sebagai titik paling rawan intervensi penegakan hukum dan sorotan publik."

Penyakit menahun penganggaran di tingkat kabupaten adalah terjadinya tabrakan kepentingan antara usulan pokok pikiran dewan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun dinas teknis. Banyak usulan anggota dewan yang dipaksakan masuk ke dalam dokumen anggaran tanpa mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah atau tanpa memiliki *Detail Engineering Design* (DED) yang memadai, sehingga proyek fisik berakhir mangkrak atau berkualitas buruk.

Menjawab kebuntuan komunikasi tersebut, pimpinan DPRD Grobogan memprakarsai tradisi kelembagaan baru: Rapat Konsultasi Khusus dan Reviu Pokir Lintas Sektor Terpadu. Inisiatif ini mendudukkan pimpinan dewan, seluruh ketua komisi parlemen,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), serta Inspektorat Daerah dalam satu meja audit bersama sebelum draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) disepakati.

Dimensi pembaruan dari reviu lintas sektor ini mencakup tiga penegasan prinsip: **Pertama, Uji Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah.** Seluruh usulan Pokir diperiksa satu demi satu di hadapan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Usulan kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan penuntasan target makro daerah—seperti penurunan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, atau pemulihan jalan sentra pertanian pangan—secara otomatis didegradasi prioritasnya atau dialihkan ke pos lain.

Kedua, **Penegakan Kewenangan Mutlak Dinas Teknis.** Melalui forum reviu ini, pimpinan dewan memberikan legitimasi perlindungan politik bagi kepala dinas teknis untuk menolak usulan proyek dari anggota parlemen yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan teknis. Anggota dewan dilarang memaksakan program hibah barang kepada kelompok masyarakat yang belum berbadan hukum atau belum terdaftar resmi di dinas terkait.

Ketiga, **Pelibatan Pengawasan Internal Inspektorat.** Menghadirkan aparat pengawasan intern pemerintah



Jakarta (20/08) – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, **Mardani Ali Sera** menerima kunjungan aspirasi dari forum guru honorer K2 Kecamatan Ciomas di Ruang Rapat Fraksi PKS Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Selasa (20/08). | foto : fraksi.pks.id

> “Inovasi korektif adalah pembenahan sistem yang lahir dari keberanian merespons evaluasi eksternal dan rekomendasi lembaga pengawas hukum.”

(APIP) sejak tahap awal penyusunan Pokir berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*). Inspektorat memetakan potensi risiko benturan kepentingan dan celah hukum pada rancangan usulan belanja hibah dan bantuan sosial, sehingga mencegah potensi tindak pidana korupsi jauh sebelum anggaran dicairkan.

Langkah di Grobogan membuktikan bahwa pembaharuan parlemen tidak selalu membutuhkan biaya pengadaan teknologi informasi yang mahal. Keberanian politik pimpinan dewan untuk mendisiplinkan anggotanya sendiri dan membuka ruang dialog teknokratis yang setara dengan eksekutif merupakan fondasi utama perbaikan mutu belanja daerah.

Inovasi Korektif NTB: Menertibkan Wilayah Aspirasi Pasca-Supervisi KPK

Dinamika di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyajikan laboratorium pembelajaran yang sangat berbeda namun krusial mengenai apa yang disebut dalam disiplin kebijakan sebagai inovasi korektif (*corrective institutional reform*)—yakni pembenahan sistem yang lahir dari keberanian merespons evaluasi eksternal dan rekomendasi lembaga pengawas hukum.

Selama bertahun-tahun, tata kelola Pokir di DPRD Provinsi NTB diwarnai oleh anomali geografis: sejumlah anggota dewan mengalokasikan program Pokir miliknya ke kabupaten atau kota yang berada di luar Daerah Pemilihan (Dapil) tempat ia terpilih. Praktik ini memicu kecemburuan antarwilayah, merusak peta prioritas pembangunan dinas teknis provinsi, dan terindikasi kuat sebagai komoditas transaksi politik antartokoh atau pengumpulan modal logistik politik untuk kontestasi pemilihan kepala daerah.

Anomali ini memuncak manakala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi melakukan penelaahan mendalam atas tata kelola keuangan daerah di NTB. Menghadapi peringatan keras dari komisi antirasuah, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengambil langkah korektif yang sangat berani dan tidak populer di kalangan internal dewan: mengumumkan pembatalan dan pelarangan mutlak pelaksanaan Pokir anggota dewan di luar dapil.

Inisiatif korektif ini melahirkan perombakan norma yang substantif:

Pertama, **Restorasi Asas Akuntabilitas Representasi Konstituen.** Mengembalikan alokasi Pokir murni ke dalam batas teritorial dapil masing-masing anggota dewan adalah pemulihan mandat moral demokrasi. Setiap anggota dewan digaji dan dipilih oleh warga di dapilnya untuk memperjuangkan nasib mereka; menyalurkan anggaran ke luar wilayah pemilihan adalah bentuk pengkhianatan amanah terhadap konstituen yang telah menitipkan suara.

Kedua, **Kepatuhan Terhadap Norma Penganggaran Vertikal.** Kebijakan penertiban ini menyelaraskan tata kelola DPRD NTB dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah, yang menegaskan bahwa belanja daerah harus berorientasi pada pencapaian prioritas sasaran pembangunan yang terukur dan tertib spasial.

Ketiga, **Penguatan Legitimasi Kelembagaan Parlemen.** Dengan secara terbuka mematuhi arahan supervisi KPK dan berani mengoreksi kebijakan internal yang keliru, pimpinan DPRD NTB menyelamatkan wibawa institusi legislatif dari jurang skandal hukum massal yang berpotensi meruntuhkan marwah dewan perwakilan.

Tindakan di NTB membuktikan bahwa kepemimpinan parlemen yang berjiwa negarawan diuji bukan saat situasi nyaman, melainkan saat ia memiliki ketegasan untuk memangkas privilese rekan-rekan sejawatnya demi mematuhi hukum negara dan menyelamatkan kehormatan lembaga perwakilan rakyat.

> "Doktrin Partisipasi Bermakna: hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan."

Doktrin Partisipasi Bermakna dan Kerangka Pencegahan Terpadu KPK

Membedah pembaruan di tiga wilayah di atas menuntut penelusuran landasan yuridis ketatanegaraan yang lebih tinggi. Pembaharuan tata kelola parlemen daerah hari ini berada di bawah payung dua pilar hukum nasional yang sangat mengikat:

Pilar pertama adalah **Doktrin Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation).** Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang kemudian diadopsi ke dalam pembaharuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memancangkan yurisprudensi bersejarah. Setiap proses perumusan kebijakan publik—baik legislasi daerah maupun pengesahan anggaran daerah—wajib memenuhi tiga hak konstitusional masyarakat secara kumulatif:

1. **Hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*):** Reses anggota



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dapil DKI Jakarta II **Kurniasih Mufidayati,** saat Reses di dapil bersama Warga Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Foto : pks.id)

dewan dilarang keras menjadi panggung monolog atau sosialisasi sepihak. Anggota legislatif wajib mendengar secara tulus keluhan kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan: kaum miskin kota, buruh tani, difabel, dan perempuan kepala rumah tangga.

2. **Hak untuk dipertimbangkan pandangannya (*right to be considered*)**: Setiap proposal aspirasi yang diajukan warga dalam agenda reses wajib dipertimbangkan dan didebatkan secara substantif dalam rapat-rapat komisi dewan, bukan dibuang ke tempat sampah sesampainya di gedung parlemen.
3. **Hak untuk mendapatkan penjelasan (*right to be explained*):** Lembaga dewan berutang penjelasan resmi kepada publik mengenai alasan mengapa suatu usulan warga dapat diakomodasi ke dalam pos APBD, atau mengapa usulan lainnya harus ditunda atau ditolak.

Pilar kedua adalah **Kerangka Kerja Pencegahan Terpadu (*Monitoring Center for Prevention*/MCP KPK).** KPK menempatkan area perencanaan dan penganggaran APBD sebagai salah satu dari delapan sektor intervensi paling rawan korupsi di tingkat pemerintah daerah.

Melalui indikator keberhasilan MCP KPK, setiap parlemen daerah diwajibkan:

- Menghilangkan seluruh usulan anggaran yang tidak tercatat dalam dokumen perencanaan awal.
- Mempublikasikan rekam jejak digital usulan pokok pikiran dewan yang ditautkan langsung dengan hasil musrenbang desa dan kecamatan.
- Menegakkan pakta integritas bagi seluruh pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk

tidak mengintervensi proses penentuan penyedia barang dan jasa pada proyek-proyek yang bersumber dari Pokir mereka.

Ketika doktrin partisipasi bermakna disandingkan dengan kerangka instrumen MCP KPK, pokok pikiran dewan mengalami transformasi martabat: dari stigma sarana rente menjadi instrumen redistribusi keadilan yang sah dan terlindungi secara hukum.

Audit Kausalitas dan Uji Keberlanjutan Tata Kelola Parlemen

Menguji maturitas pembaruan fungsi anggaran parlemen melalui parameter Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) LAN RI dan arahan evaluasi pasca-implementasi BSKDN Kemendagri menuntut ketajaman nalar kritis. Kita tidak boleh silau oleh klaim keberhasilan digitalisasi aplikasi atau deklarasi komitmen di hadapan awak media semata.

Ada sejumlah pertanyaan audit kausalitas yang harus dijawab guna membuktikan bahwa reformasi tata kelola Pokir benar-benar mengubah kualitas belanja negara:

> "Anggota dewan digaji dan dipilih oleh warga di dapilnya; menyalurkan anggaran ke luar wilayah adalah pengkhianatan amanah."

Pertama, **Uji Pembersihan Praktik Penunjukan Rekanan Di Balik Meja.** Penerapan sistem aplikasi E-Pokir dan pembatasan zonasi dapil secara administratif berhasil mengunci nomenklatur kegiatan. Namun, pertanyaan audit substantifnya adalah: apakah anggota legislatif benar-benar telah melepaskan kendali atas penentuan pihak ketiga yang mengerjakan proyek tersebut di lapangan?

Jika paket-paket pekerjaan pengaspalan jalan lingkungan, pemasangan lampu penerangan, atau pengadaan bibit pertanian hasil Pokir dewan tetap diserahkan kepada perusahaan kontraktor milik keluarga anggota dewan atau titipan tim sukses elektoral, maka reformasi digital hanyalah kamuflase atas oligarki proyek lokal. Di sinilah aparat pengawas internal dan aparat penegak hukum diuji integritasnya untuk mengaudit penerima manfaat akhir (beneficial ownership) dari perusahaan-perusahaan pelaksana proyek Pokir.

Kedua, **Uji Proporsionalitas Alokasi Anggaran Berbasis** Desil Kemiskinan. Apakah sebaran geografis dari paket-paket Pokir anggota dewan benar-benar mengalir ke kantong-kantong desa dengan desil kemiskinan tertinggi, ataukah anggaran tersebut hanya terkonsentrasi di lumbung-lumbung suara pendukung fanatik sang wakil rakyat? Penganggaran berbasis keadilan distributif menuntut wakil rakyat berjiwa kenegarawanan: mem-

prioritaskan bantuan kepada warga yang paling membutuhkan bantuan dasar, terlepas dari apakah warga di wilayah tersebut memilih dirinya atau tidak dalam pemilu lalu.

Ketiga, Uji Ketahanan Pasca-Implementasi Sarana Fisik Pokir. Keberhasilan Pokir dilarang keras diukur hanya dari selesainya serah terima pekerjaan *(output)*. Evaluasi pasca-pelaksanaan menuntut pengukuran dampak pemeliharaan: apakah saluran drainase kampung yang dibangun melalui Pokir berfungsi mengalirkan air dan terawat dengan baik setelah dua tahun berlalu, ataukah rusak terbengkalai karena tidak adanya alokasi biaya pemeliharaan dari dinas terkait? Usulan Pokir dewan wajib menyertakan skema keberlanjutan pemeliharaan sarana bersama masyarakat lokal.

Menguji maturitas pembaruan fungsi anggaran parlemen melalui parameter Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) LAN RI dan arahan evaluasi pasca-implementasi BSKDN Kemendagri menuntut ketajaman nalar kritis. Kita tidak boleh silau oleh klaim keberhasilan digitalisasi aplikasi atau deklarasi komitmen di hadapan awak media semata.

Ada sejumlah pertanyaan audit kausalitas yang harus dijawab guna membuktikan bahwa reformasi tata kelola Pokir benar-benar mengubah kualitas belanja negara:

Pertama, **Uji Pembersihan Praktik Penunjukan Rekanan Di Balik Meja.** Penerapan sistem aplikasi E-Pokir dan pembatasan zonasi dapil secara administratif berhasil mengunci nomenklatur kegiatan. Namun, pertanyaan audit substantifnya adalah: apakah anggota legislatif benar-benar telah melepaskan kendali atas penentuan pihak ketiga yang mengerjakan proyek tersebut di lapangan?

> "Inovasi korektif adalah pembenahan sistem yang lahir dari keberanian merespons evaluasi eksternal dan rekomendasi lembaga pengawas hukum."

Jika paket-paket pekerjaan pengaspalan jalan lingkungan, pemasangan lampu penerangan, atau pengadaan bibit pertanian hasil Pokir dewan tetap diserahkan kepada perusahaan kontraktor milik keluarga anggota dewan atau titipan tim sukses elektoral, maka reformasi digital hanyalah kamuflase atas oligarki proyek lokal. Di sinilah aparat pengawas internal dan aparat penegak hukum diuji integritasnya untuk mengaudit penerima manfaat akhir (beneficial ownership) dari perusahaan-perusahaan pelaksana proyek Pokir.

Kedua, **Uji Proporsionalitas Alokasi Anggaran Berbasis** Desil Kemiskinan. Apakah sebaran geografis dari paket-paket Pokir anggota dewan

benar-benar mengalir ke kantong-kantong desa dengan desil kemiskinan tertinggi, ataukah anggaran tersebut hanya terkonsentrasi di lumbung-lumbung suara pendukung fanatik sang wakil rakyat? Penganggaran berbasis keadilan distributif menuntut wakil rakyat berjiwa kenegarawanan: memprioritaskan bantuan kepada warga yang paling membutuhkan bantuan dasar, terlepas dari apakah warga di wilayah tersebut memilih dirinya atau tidak dalam pemilu lalu.

Ketiga, **Uji Ketahanan Pasca-Implementasi Sarana Fisik Pokir.** Keberhasilan Pokir dilarang keras diukur hanya dari selesainya serah terima pekerjaan (*output*). Evaluasi pasca-pelaksanaan menuntut pengukuran dampak pemeliharaan: apakah saluran drainase kampung yang dibangun melalui Pokir berfungsi mengalirkan air dan terawat dengan baik setelah dua tahun berlalu, ataukah rusak terbengkalai karena tidak adanya alokasi biaya pemeliharaan dari dinas terkait? Usulan Pokir dewan wajib menyertakan skema keberlanjutan pemeliharaan sarana bersama masyarakat lokal.

Cetak Biru Integritas Legislatif bagi Fraksi Rakyat

Bagi jajaran pimpinan dan anggota fraksi dewan perwakilan rakyat daerah di seluruh pelosok tanah air, khususnya para legislator yang mengemban panji perkhidmatan Partai Keadilan Sejahtera, dialektika pembaruan tata kelola Pokir di DIY, Grobogan, dan NTB memberikan cetak biru integritas yang sangat



Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyerahkan bantuan pengeras suara kepada Komunitas Rumah Keluarga Indonesia (RKI) dan rumah baca.(Foto: Tim NZ)

> “Inovasi korektif adalah pembenahan sistem yang lahir dari keberanian merespons evaluasi eksternal dan rekomendasi lembaga pengawas hukum.”

berharga:

- **Tolak Mentalitas Makelar Anggaran.** Anggota dewan terpilih adalah pengemban amanah suci rakyat, bukan makelar proyek pemerintah (*budget broker*). Fraksi partai di dewan harus menegakkan aturan disiplin internal tanpa kompromi: anggota legislatif dilarang keras meminta komisi *(fee),* mengintimidasi kepala dinas untuk meloloskan proyek kerabat, atau memperdagangkan pokok pikiran demi keuntungan pribadi. Uang kas daerah adalah titipan keringat rakyat yang haram disentuh oleh motif serakah rente kekuasaan.
- **Jadikan Pokir Sebagai Tuas Pembebasan Kaum Terpinggirkan.** Arahkan seratus persen alokasi pokok pikiran dewan untuk program-program yang memiliki daya ungkit sosial-ekonomi nyata: merevitalisasi sarana belajar madrasah dan pesantren rakyat, membangun jalan poros usaha tani kelompok petani kecil, menyediakan instalasi air bersih dusun terpencil, serta mengalirkan bantuan sarana usaha bagi ibu-ibu prasejahtera. Biarkan rakyat di pelosok desa menyaksikan bahwa kehadiran anggota dewan membawa berkah fisik yang memartabatkan hidup mereka.
- Buka Akses Informasi dan Pertanggungjawaban Publik. Fraksi legislatif binaan partai dakwah harus memelopori tradisi akuntabilitas publik yang radikal: mempublikasikan seluruh daftar usulan Pokir yang diperjuangkan ke laman terbuka, menyelenggarakan forum dengar pendapat warga secara berkala untuk mempertanggungjawabkan hasil reses, serta mengundang tokoh masyarakat sipil untuk mengaudit realisasi fisik di lapangan.

Ketika dewan perwakilan rakyat daerah berani menanggalkan transaksi gelap di balik meja rapat anggaran, ketika teknologi digital didayagunakan untuk menyinari setiap sudut pos belanja daerah, dan ketika anggota legislatif teguh memegang amanah kaum yang tertindas, kita sedang menyaksikan parlemen yang kembali kepada hakikat kelahirannya yang agung. Di sanalah wakil rakyat berdiri tegak sebagai benteng moral peradaban: memimpin dengan kejujuran nurani, merumuskan anggaran dengan ketajaman ilmu, dan mengalirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

4

Laporan Utama

Negara yang Bekerja

Menguji Janji Pejabat di Bawah Audit Nasib Rakyat

"Kualitas tata kelola pemerintahan pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa sering nama seorang pejabat disebut di linimasa media sosial, melainkan oleh perubahan riil yang dapat dibuktikan dalam peri kehidupan masyarakat—terutama ketika lensa kamera telah dimatikan dan masa jabatan politik telah lama berakhir."

Menolak Tirani Humas: Anatomi Investigasi Pasca-Implementasi

Di panggung politik lokal kontemporer, jarak antara realitas dan pencitraan kian hari kian mengaburkan batas kebenaran. Brosur-brosur hubungan masyarakat (humas) pemerintah daerah berhamburan dengan angka serapan anggaran yang nyaris sempurna, rilis pers dipenuhi piagam penghargaan berbingkai emas, dan algoritma media sosial membanjiri ruang publik dengan potongan video pendek para pemimpin daerah yang tampak sigap menyapa warga di tengah kubangan jalan atau membagikan bantuan di depan kilatan lampu blitz.

Namun, ketika tirai seremoni ditutup, pertanyaan paling mendasar bagi sebuah riset kebijakan publik justru baru saja dimulai: apakah seluruh riuh rendah tersebut benar-benar mengubah nasib rakyat jelata?

Laporan utama ini menolak bersikap naif. Kami menolak memperlakukan dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) atau siaran pers humas sebagai kebenaran empiris



Program Rekonstruksi Jalan *"Alus Dalane"*

yang tak terbantahkan. Menilai keberhasilan sebuah rezim pemerintahan menuntut metodologi audit yang ketat, independen, dan berjarak dari kepongahan kekuasaan.

Mengadopsi arahan strategis Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri mengenai pengukuran dampak pasca-implementasi (*ex-post impact measurement*), investigasi ini merumuskan empat tahapan audit metodologis guna membedah anatomi klaim inovasi daerah:

Pertama, **Verifikasi Landasan Yuridis dan Perencanaan Formal.** Kami melacak apakah sebuah program unggulan kepala daerah atau pimpinan legislatif berakar pada instrumen hukum yang sah—berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta tertuang eksplisit dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)—ataukah hanya sekadar diskresi lisan insidental yang rawan musnah saat nahkoda politik berganti.

Kedua, **Audit Silang Data Sekunder Independen.** Angka klaim keberhasilan dinas teknis dikonfrontasikan secara kritis dengan data statistik Badan Pusat Statistik (BPS), laporan hasil pemeriksaan kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), catatan pengawasan maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia, serta indikator kerentanan korupsi Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pembe-

rantasan Korupsi (KPK).

Ketiga, **Uji Petik Lapangan Penerima Manfaat.** Meneliti denyut nadi di akar rumput secara langsung. Kebijakan publik yang efektif tidak cukup diukur dari berapa lembar kartu bantuan yang dicetak, melainkan harus dibuktikan melalui wawancara menda-lam bersama para penerima manfaat, kelompok masyarakat yang terabaikan (*the unserved*), hingga asosiasi pelaku usaha mikro dan serikat buruh tani.

Keempat, **Audit Ketahanan Fiskal Jangka Panjang.** Membedah rasio biaya per satuan hasil (unit cost), struktur alokasi belanja modal terhadap belanja operasional birokrasi, serta menguji apakah suatu intervensi memiliki bantalan likuiditas yang cukup tatkala transfer dana dari pemerintah pusat mengalami kontraksi.

Komparasi Delapan Lokus: Memisahkan Data Realisasi dari Kesenjangan Bukti

"Dalam arena advokasi kebijakan publik, kita kerap menyaksikan sesat pikir evaluasi (*evaluative fallacy*) yang dilakukan secara sengaja oleh tim kampanye petahana."

Meneropong delapan laboratorium kebijakan di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara memperlihatkan spektrum intervensi yang sangat beragam. Namun, pisau bedah investigasi menemukan fakta bahwa tidak semua klaim inovasi berdiri di atas bobot pembuktian yang setara. Ada program yang telah memiliki data pelaksanaan riil di lapangan, namun ada pula inisiatif yang sejauh ini baru membuktikan adanya komitmen prosedural di atas kertas meja rapat.

Berikut adalah matriks komparasi analitis yang membedah delapan figur kepemimpinan daerah beserta kesenjangan pembuktian dampak (evidence gap) yang masih harus diuji:



1. Anwar Hafid Sulawesi Tengah
(Program Beasiswa "Berani Cerdas")

- Intervensi Teridentifikasi: Rekayasa fiskal beasiswa kuliah bebas biaya jenjang diploma hingga doktoral/ spesialis, afirmasi perlengkapan sekolah, vokasi SMK, beasiswa guru terpencil, dan konektivitas internet satelit 3T.
- Bukti Formal Tersedia: Alokasi APBD

melonjak dari Rp84,93 miliar (2025) menjadi Rp351 miliar (2026), menjangkau puluhan ribu mahasiswa terverifikasi portal resmi, serta draf peraturan gubernur tentang ikatan dinas dokter spesialis per desa.

- Kesenjangan Bukti Dampak (*Evidence Gap*): Belum tersedianya data longitudinal mengenai tingkat kelulusan tepat waktu (*completion rate*), rasio sebaran penerima berbasis desil kemiskinan ekstrem riil, serta kepastian serapan lulusan teknik pertambangan di kawasan industri hilirisasi nikel regional.



2. **Fahmi Muhammad Hanif —** Purbalingga (Program Rekonstruksi Jalan *"Alus Dalane"*)

- Intervensi Teridentifikasi: Rekonstruksi perkerasan jalan poros antar-kecamatan dan perbaikan saluran drainase samping beton di sentra produksi pertanian pegunungan.
- Bukti Formal Tersedia: Realokasi APBD infrastruktur sebesar Rp90 miliar hingga Rp122 miliar di tengah penyusutan total postur anggaran daerah, dokumen kontrak pengadaan jalan terstandarisasi, dan penanganan lebih dari 100 ruas jalan kabupaten.
- Kesenjangan Bukti Dampak (*Evidence Gap*): Perlu pembuktian independen mengenai persentase kenaikan jalan berkondisi mantap secara kabupaten, data penurunan ongkos angkut logistik komoditas kubis dan sayuran petani, serta ketahanan perkerasan aspal pasca-terpaan musim hujan lebat. Aksi filantropi pembagian sepatu dari gaji pribadi bupati belum terverifikasi sistem kelembagaan dan keberlanjutannya.

> "Menilai keberhasilan sebuah rezim pemerintahan menuntut metodologi audit yang ketat, independen, dan berjarak dari kepongahan kekuasaan."

3. **Ahmad Luthfi — Jawa Tengah** (Program Dokter Spesialis Keliling / Speling)

- Intervensi Teridentifikasi: Pelayanan medis bergerak dokter spesialis yang menjangkau balai-balai desa terpencil guna pemeriksaan penyakit degeneratif, skrining kanker, dan kesehatan jiwa tanpa pungutan biaya.
- Bukti Formal Tersedia: Laporan seratus hari kerja pemerintah provinsi, data volume kunjungan ribuan warga



di berbagai desa sasaran, dan pengerahan armada medis keliling.

- Kesenjangan Bukti Dampak (*Evidence Gap*): Angka kunjungan medis belum membuktikan pemulihan kesehatan warga. Kesenjangan bukti terletak pada sistem rujukan lanjutan: berapa persen pasien berisiko tinggi yang terdeteksi di desa benar-benar mendapatkan perawatan kuratif berkesinambungan di rumah sakit rujukan daerah.

4. **Eri Cahyadi – Surabaya** (Padat Karya Terpadu dan Satu Data Surabaya)
   - Intervensi Teridentifikasi: Pemanfaatan aset tidur lahan pemerintah kota untuk unit usaha produktif warga miskin (paving, bengkel jahit, kafe rakyat, tambak lele) yang diserap langsung oleh belanja pengadaan APBD.
   - Bukti Formal Tersedia: Paparan resmi strategi pengentasan kemiskinan terintegrasi Bappenas, basis data kemiskinan tunggal berbasis NIK, dan laporan lonjakan pendapatan peserta





> “Di sanalah kemuliaan kepemimpinan publik diuji—bukan di hadapan lensa kamera yang fana, melainkan di hadapan hisab nasib rakyat dan pengadilan sejarah peradaban.”

hingga kisaran Rp4–6 juta per bulan.

- Kesenjangan Bukti Dampak (*Evidence Gap*): Ketergantungan unit padat karya pada pasar buatan pengadaan pemerintah. Belum teruji apakah unit usaha warga binaan mampu bertahan secara mandiri di pasar bebas tatkala masa kontrak belanja dinas pemkot berakhir (*exit strategy vulnerability*).

5. **Munafri Arifuddin — Makassar** (Subsidi Iuran Sampah dan Pemilahan Berbasis Rumah)

- Intervensi Teridentifikasi: Pembebasan retribusi pelayanan persampahan yang diperluas hingga pelanggan daya listrik 1.300 VA yang diimbangi kewajiban pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah tangga.



- Bukti Formal Tersedia: Keputusan kepala daerah mengenai pembebasan retribusi dan penetapan ribuan rumah tangga penerima manfaat awal di Kecamatan Mariso.
- Kesenjangan Bukti Dampak (*Evidence Gap*): Daya listrik PLN tidak berkorelasi sempurna dengan garis kemiskinan riil. Kesenjangan audit mencakup data timbulan sampah terpilah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta efisiensi riil biaya pengangkutan dinas kebersihan lingkungan hidup.



6. **Nuryadi — DIY** (Digitalisasi Aspirasi Konstituen Melalui E-Pokir)

- Intervensi Teridentifikasi: Penguncian jendela waktu usulan aspirasi reses dewan ke dalam sistem aplikasi E-Pokir yang terintegrasi dengan SIPD, wajib lampiran geotagging dan berkas autentik warga.
- Bukti Formal Tersedia: Dokumen Indikator Kinerja Kunci (LAKIP) Sekretariat DPRD DIY, regulasi petunjuk teknis alur verifikasi bertingkat bersama dinas teknis dan Bappeda.
- Kesenjangan Bukti Dampak (*Evidence Gap*): Sistem informasi masih

dominan beroperasi sebagai arsip administrasi internal birokrasi dewan. Belum dibukanya dasbor akses pelacak bagi warga sipil guna memantau realisasi fisik di lapangan serta memastikan hilangnya kendali penunjukan kontraktor rekanan oleh oknum dewan.

7. **Lusia Indah Artani** – Grobogan (Reviu Pokir Terpadu Lintas Sektor)
   Intervensi Teridentifikasi: Rapat konsultasi gabungan pimpinan dewan, seluruh ketua komisi, Bappeda, BPPKAD, dan Inspektorat untuk menguji kelayakan teknis usulan anggota dewan sebelum KUA-PPAS disepakati.

- Bukti Formal Tersedia: Agenda dokumentasi rapat koordinasi lintas instansi dan komitmen prosedural penyaringan usulan berbasis RPJMD.
- Kesenjangan Bukti Dampak (*Evidence Gap*): Keberadaan forum rapat adalah bukti adanya proses, bukan bukti berkurangnya kebocoran anggaran. Kesenjangan data mencakup publikasi daftar usulan yang ditolak oleh dinas teknis, argumentasi penolakan, serta kepatuhan anggota legislatif pasca-reviu.



8. **Baiq Isvie Rupaeda – NTB**
   (Penertiban Spasial Pokir Pasca-Supervisi KPK)



- Intervensi Teridentifikasi: Langkah korektif kelembagaan berupa pembatalan dan pelarangan mutlak alokasi program pokok pikiran dewan di luar batas teritorial Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing anggota.
- Bukti Formal Tersedia: Pernyataan formal pimpinan dewan dan dokumen tindak lanjut koordinasi supervisi pencegahan korupsi KPK.
- Kesenjangan Bukti Dampak (*Evidence Gap*): Pembatasan geografis di dalam dapil belum otomatis memati-

> "Hubungan antara penguasa dan rakyat bergeser: dari relasi peminta belas kasihan menjadi relasi warga negara merdeka yang menuntut pemenuhan hak konstitusional."



Bupati Halmahera Selatan (Halsel), **Hasan Ali Bassam Kasuba,** menyerahkan secara simbolis 50 unit bantuan armada tangkap melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Halsel di galangan fiber, Pantai Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Rabu (14/10/26). (habarindonesia.id)

kan potensi konflik kepentingan pembagian proyek. Kesenjangan pembuktian terletak pada ada tidaknya audit penerima manfaat akhir (*beneficial ownership*) pada perusahaan rekanan pelaksana proyek di dalam dapil.

Membaca Efek Rambatan Poleksos-bud: Ketika Satu Pos Anggaran Mengubah Peradaban

Kebijakan publik yang inovatif tidak pernah bekerja di dalam tabung hampa yang terisolasi. Sebuah intervensi fiskal atau regulasi di satu sektor akan memicu efek getar atau efek limpasan (*spillover effect*) yang merambat ke seluruh dimensi kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya (poleksos-bud) masyarakat:

Pertama, **Dimensi Politik dan Tata Kelola Kekuasaan.** Reformasi kebijakan yang mengikat prosedur penganggaran ke dalam data tunggal—sebagaimana beasiswa digital Sulteng atau E-Pokir di parlemen—secara langsung membong-kar tradisi klientelisme dan politik patronase. Ketika hak-hak warga negara didistribusikan berdasarkan algoritma kelayakan objektif dan verifikasi kemiskinan, ketergantungan warga pada perantara politik (*political broker*) terkikis seketika. Hubungan antara penguasa dan rakyat bergeser: dari relasi peminta belas kasihan menjadi relasi warga negara merdeka yang menuntut pemenuhan hak konstitusional.

Kedua, **Dimensi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.** Realokasi belanja daerah ke pos-pos produktif mendisrupsi ketimpangan distribusi kekayaan daerah. Anggaran infrastruk-tur jalan poros desa di Purbalingga

secara konkret memangkas ongkos bahan bakar angkutan hasil tani dan memperpanjang usia pakai kendaraan roda dua warga desa. Sementara itu, kebijakan pembebasan biaya kuliah ratusan miliar rupiah di Sulawesi Tengah membebaskan likuiditas keluarga buruh dan nelayan dari jerat utang rentenir, memungkinkan penghasilan harian mereka dialihkan untuk perbaikan gizi balita dan investasi ketahanan pangan keluarga.

Ketiga, **Dimensi Sosial dan Pemulihan Martabat Warga.** Terobosan kebijakan afirmatif meruntuhkan tembok segregasi sosial yang telah mengakar berabad-abad. Perda Inisiatif Disabilitas Jawa Timur dan program padat karya Surabaya mengangkat harkat kelompok marjinal: mereka tidak lagi diasingkan di sudut-sudut sempit keputusasaan sebagai beban keluarga, melainkan menjelma menjadi tenaga kerja mandiri yang berkontribusi pada pendapatan daerah. Demikian pula di kepulauan terluar, pemasangan stasiun internet satelit di ruang kelas sekolah terpencil mengembalikan rasa percaya diri anak-anak nelayan bahwa mereka diperlakukan setara oleh republik ini.

Keempat, **Dimensi Budaya dan Perilaku Birokrasi.** Kebijakan publik yang progresif menjadi kurikulum pendidikan budaya bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Menempatkan kantor pelayanan administrasi kependudukan di tengah beceknya pasar tradisional di Banyuwangi merevolusi watak birokrasi feodal menjadi birokrasi yang rendah hati dan melayani. Di Kulon Progo, perlindungan pasar rakyat lewat ToMiRa melahirkan patriotisme ekonomi daerah (l*ocal pride*), di mana membeli beras dan makanan kemasan produksi tetangga sendiri dipandang sebagai kehormatan kolektif masyarakat beradab.

> “Transparansi atas kelemahan internal adalah ujian tertinggi integritas kepemimpinan. Pejabat yang antikritik tidak layak menyandang predikat pemimpin inovatif.”

Jebakan Metodologis: Memisahkan Dampak Kausal dari Pertumbuhan Alami

Dalam arena advokasi kebijakan publik, kita kerap menyaksikan sesat pikir evaluasi (*evaluative fallacy*) yang dilakukan secara sengaja oleh tim kampanye petahana. Setiap kali angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah naik, angka kemiskinan makro menurun, atau produk domestik regional bruto (PDRB) tumbuh positif, peristiwa tersebut serta-merta diklaim sebagai buah karya langsung dari satu program unggulan sang kepala daerah.

Riset investigatif menolak penye-

derhanaan yang manipulatif semacam itu.

Dalam disiplin ekonometrika dan evaluasi kebijakan modern, peningkatan IPM atau penurunan angka kemiskinan adalah hasil resultan dari puluhan faktor perancu (*confounding factors*). Angka kemiskinan di sebuah provinsi tambang bisa saja turun murni karena lonjakan harga komoditas nikel global di bursa London, guyuran program bantuan sosial terpadu dari kementerian sosial pusat, atau stabilitas iklim panen raya pertanian nusantara—bukan karena program beasiswa daerah yang baru seumur jagung.

Untuk membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal impact*) antara inovasi daerah dengan perubahan nasib rakyat, riset kebijakan menuntut pembuktian metode ilmiah:

1. **Uji Kontrafaktual (*Counterfactual Analysis*):** Peneliti harus mampu menjawab: apa yang akan terjadi pada kelompok warga miskin tersebut seandainya program beasiswa atau rekonstruksi jalan tersebut tidak pernah diluncurkan? Evaluasi membutuhkan kelompok pembanding (*control group*) yang memiliki karakteristik sosio-ekonomi identik namun belum menerima intervensi, guna melihat apakah laju perbaikan hidup kelompok penerima benar-benar melesat lebih tinggi.
2. **Pelacakan Data Longitudinal Jangka Panjang:** Dampak nyata dari investasi modal manusia (seperti program "Berani Cerdas") baru dapat dibuktikan secara empiris lima hingga sepuluh tahun mendatang. Apakah anak-anak keluarga nelayan yang dibiayai kuliah kedokteran benar-benar kembali mengabdi di puskesmas pelosok pulau kelahirannya? Apakah mereka berhasil mengangkat derajat desil ekonomi orang tuanya keluar permanen dari garis kemiskinan? Tanpa pelacakan data longitudinal, klaim peningkatan IPM sepihak hanyalah kesimpulan prematur yang cacat metodologi.
3. **Isolasi Biaya Riil per Satuan Hasil (*Unit-Cost Efficiency*):** Kebijakan publik yang bermutu membuktikan efisiensi belanja negara. Jika pembangunan satu kilometer jalan mantap di daerah A menelan biaya APBD tiga kali lipat lebih mahal dibanding rata-rata standar Kementerian PUPR tanpa adanya kendala geologis ekstrem, maka klaim keberhasilan program tersebut tercemar oleh potensi inefisiensi pengadaan atau kebocoran fiskal terselubung.

> "Kebijakan publik yang progresif menjadi kurikulum pendidikan budaya bagi masyarakat dan aparatur sipil negara."

Lima Pertanyaan Kunci Audit Wawancara Pejabat Publik

Sebagai instrumen operasional bagi jurnalis data, aktivis masyarakat sipil, akademisi, dan anggota dewan perwakilan rakyat dalam menguji setiap gubernur, bupati, wali kota, maupun pimpinan dewan, laporan investigasi ini merumuskan Lima Pertanyaan Kunci Audit Kebijakan:

Pertanyaan 1: Masalah Konkret Apa yang Berubah Secara Terukur Dibanding Kondisi Awal?

"Tuan Gubernur atau Puan Bupati, tolong paparkan kepada publik data kondisi dasar (baseline data) sebelum program Anda dijalankan, lalu sandingkan dengan data capaian hari ini. Tolong tunjukkan bukti bahwa perbaikan yang terjadi bukan sekadar pertumbuhan alami ekonomi makro nasional."

Pertanyaan ini menyaring retorika politik. Pejabat yang bermutu akan menyajikan data numerik yang presisi: berapa jam waktu tempuh logistik terpangkas, berapa persen angka putus kuliah turun di kalangan keluarga desil termiskin, dan berapa banyak desa terisolasi yang kini terkoneksi jaringan distribusi pangan.

Pertanyaan 2: Siapa Kelompok Paling Rentan yang Masih Tercecer dan Belum Terjangkau?

"Kebijakan Anda mungkin tampak memukau secara agregat statistik. Namun, siapa warga paling miskin di



Serahkan 6 Ambulans untuk 6 Puskesmas | Bupati Kutim **Ardiansyah Sulaiman** Menyerahkan langsung 6 Unit Ambulans untuk 6 Puskesmas di Kecamatan Sangatta dan Bengalon Kutim. (Foto: inspirasa.co)

> “Sudahi politik tontonan. Masuklah ke ruang kerja, buka lembaran neraca anggaran daerah, bedah naskah akademik peraturan daerah.”

pelosok terpencil, anak-anak difabel terlantar, atau kelompok buruh harian yang sistem Anda akui masih gagal menjangkau mereka? Apa rencana korektif Anda untuk melunasi ketertinggalan tersebut?"

Pejabat populis akan selalu mengklaim programnya telah sempurna seratus persen. Sebaliknya, seorang negarawan yang jujur akan mengakui keterbatasan jangkauan sistemnya dan membeberkan secara transparan kelompok-kelompok mustadh'afin mana yang masih menjadi pekerjaan rumah birokrasinya.

Pertanyaan 3: Berapa Biaya Riil Kas Daerah untuk Setiap Satuan Hasil yang Dicapai?

"Jangan hanya membacakan total triliunan rupiah APBD yang telah diserap. Berapa biaya riil per satu kilometer jalan beraspal mantap? Berapa biaya fiskal untuk meluluskan satu sarjana kedokteran desa? Dan apakah biaya tersebut sepadan dengan manfaat ekonomi jangka panjang yang dinikmati masyarakat?"

Pertanyaan ini menguji kepatuhan akuntansi dan efisiensi belanja publik, membongkar potensi pembengkakan biaya administrasi pendukung yang kerap menelan porsi lebih besar daripada pokok bantuan yang diterima warga.

Pertanyaan 4: Catatan Kritis dan Temuan Audit Independen Apa yang Telah Ditindaklanjuti Terbuka?

"Apa temuan ketidakpatuhan dari BPK, Ombudsman, atau masukan kritis dari fraksi parlemen dan media massa yang menyoroti program ini? Bagaimana bukti dokumen tindak lanjut perbaikan tata kelola yang telah Anda eksekusi di lapangan?"

Transparansi atas kelemahan internal adalah ujian tertinggi integritas kepemimpinan. Pejabat yang antikritik atau menyembunyikan laporan audit BPK di bawah karpet kekuasaan tidak layak menyandang predikat pemimpin inovatif.

Pertanyaan 5: Apakah Sistem Kebijakan Ini Dijamin Tetap Hidup dan Berjalan Ketika Masa Jabatan Anda Berakhir?

"Apakah program unggulan ini hanya bersandar pada instruksi pribadi Anda, ataukah telah dikunci secara permanen ke dalam Peraturan Daerah inisiatif, dialokasikan dalam dokumen RPJMD lintas dekade, dan dibentengi oleh skema Dana Abadi Daerah? Dapatkah Anda menjamin bahwa rakyat miskin tetap

menerima manfaat yang sama tatkala Anda tak lagi memegang kendali kekuasaan?"-

Pertanyaan pamungkas ini meruntuhkan sindrom ketergantungan figur. Inovasi sejati adalah pelembagaan sistem hukum dan anggaran yang bekerja secara otomatis melintasi generasi suksesi kepemimpinan politik.

Editorial Kebijakan: Menilai Keberhasilan di Balik Sunyinya Panggung

Ketika seluruh data dikonfrontasikan dan seluruh dalih politik ditanggalkan, kita tiba pada sebuah kesimpulan jernih mengenai hakikat "Negara yang Bekerja".

Negara yang bekerja bukanlah negara yang sibuk memproduksi konten viral di media sosial. Negara yang bekerja tidak diukur dari riuh tepuk tangan hadirin di ruang sidang penganugerahan penghargaan birokrasi, bukan pula dari tetesan air mata pejabat di hadapan sorotan kamera saat menyerahkan bantuan sepatu dari dompet pribadinya.

Negara yang bekerja adalah negara yang hadir secara hening di bilik-bilik kehidupan rakyat yang paling sunyi.

Ia hadir tatkala seorang ibu hamil di pelosok desa pegunungan dapat melahirkan dengan selamat di puskesmas karena mobil ambulans melaju mulus di atas jalan poros kabupaten tanpa terperosok kubangan lumpur.

Ia hadir tatkala seorang anak nelayan miskin di kepulauan terluar melangkah tegak memasuki fakultas kedokteran dengan jaminan pembiayaan penuh APBD, memutus mata rantai kemiskinan keluarganya tanpa rasa rendah diri dan tanpa perlu berhutang budi pada kebaikan personal politisi.

Ia hadir tatkala seorang pemuda tunarungu diterima bekerja secara bermartabat di kantor pelayanan publik daerah karena undang-undang memaksakan hak inklusinya, dan tatkala seorang pedagang jamu gendong di pasar tradisional terlindungi nafkah hariannya dari serbuan ritel raksasa modern berkat benteng hukum peraturan daerah.

Bagi seluruh pemangku kekuasaan di ranah eksekutif maupun legislatif, khususnya para pengemban amanah perkhidmatan Partai Keadilan Sejahtera di seluruh penjuru tanah air, laporan investigasi ini memancangkan sebuah cermin kejujuran:

Sudahi politik tontonan. Masuklah ke ruang kerja, buka lembaran neraca anggaran daerah, bedah naskah akademik peraturan daerah, periksa kepatuhan hukum kelembagaan, dan pastikan setiap rupiah uang rakyat kembali sebagai pembebasan bagi mereka yang tertindas. Di sanalah kemuliaan kepemimpinan publik diuji—bukan di hadapan lensa kamera yang fana, melainkan di hadapan hisab nasib rakyat dan pengadilan sejarah peradaban.

KONDISI KIAN DARURAT

PKS DESAK PEMERINTAH TANGANI KARHUTLA HINGGA TUNTAS!

PKS



Ini soal perlindungan Warga negara

"Keberhasilan menangani karhutla adalah makin kecilnya api yang dipadamkan berkat pencegahan panjang. Jangan beraksi atau cari konten; ini bukan ajang konten, melainkan perlindungan warga negara}.

Johan Rosihan
Anggota Komisi IV DPR RI



Mitigasi perlu Lebih Terukur

Mitigasi perlu lebih terukur usai musim kemarau. Kesiapsiagaan dini penting untuk menekan risiko kebakaran sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, termasuk hutan dan lahan gambut yang berfungsi ekologis penting.

Jalal Abdul Nasir
Anggota Komisi XII DPR RI



Penanganan Perlu dipercepat

"Kabut asap telah mengganggu kesehatan, pendidikan, kegiatan ekonomi, dan hubungan dengan negara tetangga. Penanganan harus segera dipercepat."

Muhammad Kholid,
Sekjen DPP PKS



Jaga Perasaan Warga Terdampak

Jaga komentar, jaga perasaan masyarakat yang tiap hari mereka bertarung dengan asap."

Riyono
Anggota Komisi IV DPR RI



Pertimbangkan dampak lintas wilayah

Asap dapat menyebar ke wilayah lain dan mengganggu kesehatan, pendidikan, serta ekonomi. Karena itu, penanganannya harus mempertimbang-kan dampak lintas wilayah, bukan hanya daerah kebakaran.

Aus Hidayat Nur
Anggota DPR RI Dapil Kalimantan



Pastikan warga Terlindungi

Ketika kabut asap semakin pekat dan kualitas udara memburuk, yang paling penting adalah memastikan masyarakat terlindungi

Netty Prasetiyani,
Anggota Komisi IX DPR RI

Pilar Domestik Penegak Amanah Publik:

Menjaga Integritas, Mengelola Krisis, dan Membangun Ketahanan Keluarga di Pusaran Kekuasaan

"Kekuasaan seorang pemimpin publik tidak pernah diuji di panggung parade orasi atau di bawah gemerlap kilatan blitz media massa. Ujian sesungguhnya atas integritas kekuasaan berlangsung di bilik-bilik sunyi ruang privat: di atas meja makan keluarga yang bersahaja, di balik tutur kata anak-anaknya di ruang digital, dan di dalam keheningan doa seorang pendamping hidup yang teguh menolak godaan materi dan privilese jabatan."

Menyingkap Tabir Panggung Belakang: Realitas Kekuasaan di Ruang Privat

Dalam kajian sosiologi politik dan filsafat kekuasaan, ruang domestik keluarga pejabat publik kerap kali diperlakukan laksana sebuah *terra incognita*—wilayah tak bertuan yang luput dari radar telaah kebijakan publik formal. Analisis administrasi negara konvensional cenderung membatasi ruang pandangannya hanya pada aspek-aspek legal-formal di ranah birokrasi: regulasi penganggaran, kepatuhan audit perbendaharaan, serta perdebatan di ruang sidang parlemen. Keluarga dianggap sebagai entitas terpisah yang murni bersifat privat, otonom, dan berada di luar yurisdiksi tata kelola kenegaraan.

Namun, di era hegemoni teknologi informasi digital dan jurnalisme warga saat ini, ilusi pemisahan absolut tersebut telah runtuh berkeping-keping.

Realitas memperlihatkan fakta sosiologis yang tak terbantahkan: keluarga pejabat publik bukanlah bagian

dari struktur kekuasaan formal, namun ia merupakan ekosistem terdekat yang paling rentan sekaligus paling menentukan kelangsungan integritas kepemimpinan publik. Tidak sedikit karier politik seorang pejabat publik yang dibangun dengan rekam jejak pengabdian puluhan tahun hancur seketika hanya karena skandal pamer harta kemewahan oleh anak remajanya di linimasa media sosial, atau karena keterlibatan pasangannya dalam jejaring pengadaan barang dan jasa di balik meja kekuasaan daerah.

Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Pembinaan Keluarga Pejabat Publik oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (BP3U) DPP PKS memancangkan tonggak kesadaran baru: semakin besar mandat kekuasaan yang diemban seorang kader di ranah eksekutif dan legislatif, semakin mendesak pula kebutuhan untuk membangun arsitektur pembinaan keluarga yang sistemik, terpadu, dan berkesinambungan.

Laporan mendalam ini membedah anatomi ekosistem domestik pejabat publik ke dalam tiga segmen strategis yang saling mengunci: fondasi etika dan sosiologi ruang privat, arsitektur tata kelola kelembagaan dan protokol penanganan krisis, serta pedagogi ketahanan keluarga dan disiplin ruang digital.



gambar : tribuintimur.com

Segmen 1: Etika Panggung Belakang dan Imunitas Domestik

Menjaga Integritas, Mitigasi Hedonisme, dan Menangkal Sindrom "Aristokrasi Politik Baru



gambar : keprionline.co.id

Singkapan Dramaturgi: Mengurai Batas Panggung Erving Goffman

Sosiolog kenamaan Erving Goffman dalam karya monumentalnya mengenai dramaturgi sosial memperkenalkan konsep pembagian ruang interaksi manusia ke dalam panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*). Panggung depan adalah panggung pertunjukan formal di mana seorang aktor menampilkan peran sosial yang diharapkan oleh publik: di sinilah seorang bupati, wali kota, gubernur, atau anggota legislatif menampilkan sosok pemimpin yang santun, bersahaja, fasih mengutip dalil keadilan, serta tampak gigih memperjuangkan nasib rakyat jelata. Sebaliknya, panggung belakang adalah ruang santai domestik di mana atribut formalitas ditanggalkan, topeng kepura-puraan dilepas, dan dinamika relasi emosional yang autentik berlangsung tanpa pengawasan langsung dari audiens luar.

Bagi pejabat publik di era analog masa lalu, dinding pemisah antara panggung depan dan panggung belakang terbilang tebal dan kedap.

> “Panggung belakang adalah ruang santai domestik di mana atribut formalitas ditanggalkan, topeng kepura-puraan dilepas, dan dinamika relasi emosional yang autentik berlangsung tanpa pengawasan audiens luar.”

Seorang pejabat dapat mengisolasi kehidupan pribadinya dari tatapan mata rakyat pemilihnya. Namun, di era digital kontemporer di mana setiap ponsel pintar milik warga berfungsi sebagai stasiun pemancar informasi dan kamera pengintai, dinding pemisah panggung tersebut telah runtuh menjadi lembaran kaca transparan (*transparent glass house*).

Panggung belakang keluarga pejabat publik kini sangat mudah tersingkap (*abruptly unveiled*) ke panggung depan. Sebuah video pendek berdurasi lima belas detik yang memperlihatkan pasangan pejabat menenteng tas mewah berharga ratusan juta rupiah saat kunjungan kerja dinas, atau rekaman anak pejabat yang memperlihatkan konvoi kendaraan eksklusif dengan sirine pengawal di jalan raya, seketika menyingkap seluruh orasi kerakyatan sang pejabat di panggung depan sebagai kepalsuan yang telanjang.

Kesenjangan antara panggung depan dan panggung belakang inilah yang melahirkan fenomena disonansi narasi (*narrative dissonance*). Ketika citra panggung depan yang dibangun sebagai figur pejuang rakyat miskin bertabrakan secara diametral dengan kenyataan gaya hidup konsumtif keluarganya di panggung belakang, publik tidak hanya meragukan moralitas pribadi sang pejabat, melainkan menjatuhkan vonis ketidakpercayaan massal (*public distrust*) kepada institusi partai politik yang menaunginya.

Menjawab tantangan dramaturgi ini, kebijakan pembinaan keluarga pejabat publik PKS tidak bertumpu pada instruksi dangkal untuk sekadar "menyembunyikan" panggung belakang dari sorotan kamera. Pembinaan sejati menuntut pelembagaan penyelarasan narasi (*narrative alignment*): membangun kesucian, kesederhanaan, dan kejujuran di panggung belakang keluarga sedemikian rupa, sehingga tatkala panggung belakang tersebut sewaktu-waktu tersingkap oleh dinamika keterbukaan informasi, apa yang disaksikan publik adalah keaslian nilai hidup yang selaras dan memperkuat martabat kepemimpinannya.

Teori Ranah Pierre Bourdieu: Menjinakkan Habitus Elit dan Modal Simbolik

Lonjakan posisi seorang kader dari warga biasa menjadi pejabat publik

eksekutif atau pimpinan dewan secara sosiologis memicu ledakan kepemilikan modal (*capital accumulation*). Mengacu pada kerangka konseptual sosiolog Prancis Pierre Bourdieu, terpilihnya seorang kader tidak hanya memberikannya wewenang hukum, melainkan melipatgandakan modal sosial (*social capital*) dan modal simbolik (*symbolic capital*) keluarganya: penghormatan protokoler dari aparat keamanan, undangan menghadiri perjamuan elit, fasilitas kendaraan dinas berplat istimewa, hingga pujian berlebihan dari lingkar relasi kekuasaan.

Ledakan modal yang terjadi secara mendadak ini menyimpan risiko sosiologis yang sangat destruktif apabila tidak diimbangi oleh kematangan kapasitas spiritual dan kultural: lahirnya disonansi habitus (*dissonance habitus*).

Habitus adalah disposisi batiniah, sistem nilai, dan pola tindakan bawah sadar yang diperoleh seseorang melalui pengalaman hidup panjangnya. Pasangan dan anak pejabat publik yang tidak dibekali imunitas kultural sangat rentan mengalami keterkejutan kelas. Mereka tergoda untuk mengadopsi habitus elit borjuis: merasa diri memiliki kasta sosial yang lebih mulia dibanding warga biasa, menuntut perlakuan istimewa di ruang-ruang publik, gemar mengoleksi simbol-simbol status materialistis, dan perlahan-lahan membangun jarak emosional yang dingin dari realitas penderitaan kaum fakir miskin (*al-mustadh'afin*).

Dalam level yang paling akut, disonansi habitus ini bermutasi menjadi apa yang diidentifikasi oleh para sosiolog sebagai sindrom "Aristokrasi Politik Baru". Sindrom ini mencerminkan mentalitas feodalistik di mana kekuasaan negara yang diamanahkan rakyat diperlakukan sebagai warisan privilese dinasti keluarga. Pasangan pejabat mulai ikut campur mengatur mutasi jabatan aparatur sipil negara di kantor dinas, anak-anak pejabat merasa berhak mendapatkan konsesi proyek pemerintah daerah tanpa proses lelang, dan kerabat keluarga memosisikan diri sebagai calo perizinan investasi lokal.

Arsitektur pembinaan keluarga pejabat publik PKS dirancang secara tegas untuk membedah dan menjinakkan benih-benih aristokrasi politik baru tersebut. Seluruh akumulasi modal sosial dan modal simbolik yang melekat pada jabatan publik dilarang keras dikonversi menjadi privilese konsumtif

> “Ketika citra panggung depan sebagai pejuang rakyat miskin bertabrakan dengan gaya hidup konsumtif keluarganya di panggung belakang, publik menjatuhkan vonis ketidakpercayaan massal.”

pribadi. Sebaliknya, modal tersebut diredireksi (*re-directed*) melalui rekayasa kelembagaan menjadi sarana perkhidmatan publik (*social khidmah*):

Pasangan kepala daerah didorong untuk mendayagunakan jaringan sosialnya guna memelopori gerakan advokasi gizi balita pedesaan, pemberdayaan ekonomi perempuan kelompok prasejahtera melalui Rumah Keluarga Indonesia (RKI), serta mengawal perlindungan hak-hak anak terlantar. Melalui pembiasaan interaksi sosiologis bersama masyarakat akar rumput ini, habitus keluarga pejabat senantiasa terjangkar pada kerendahan hati, empati sosial, dan kesadaran bahwa mereka hanyalah pelayan bagi rakyatnya.

Internalisasi Delapan Nilai Islam dan Penghormatan atas Otonomi Privat

Kerangka filosofis Naskah Akademik BP3U DPP PKS menempatkan nilai-nilai Islam bukan sekadar sebagai ornamen teks keagamaan, melainkan sebagai fondasi operasional yang memandu perilaku harian keluarga pejabat publik. Terdapat delapan nilai inti yang diinternalisasikan secara terpadu:

Pertama, ***Amanah*** **(Integritas Kepercayaan).** Menumbuhkan kesadaran bahwa jabatan publik adalah titipan Tuhan yang diawasi oleh hisab akhirat. Amanah menuntut anggota keluarga untuk tidak memanfaatkan nama besar, kedekatan relasi, fasilitas kantor, atau pengaruh dinas pejabat demi memperoleh kemudahan bisnis dan materi yang tidak sah.

Kedua, ***Sidq*** **(Kejujuran Autentik).** Keselarasan mutlak antara ucapan, sikap, dan tindakan. Sidq diwujudkan melalui budaya keterbukaan di dalam rumah, menolak klaim status palsu, berani mengakui keterbatasan, serta bertindak sebagai benteng kejujuran yang mengingatkan pejabat publik tatkala tergoda melakukan kompromi etika kekuasaan.

Ketiga, ***'Adl*** **(Keadilan Proporsional).** Menegakkan garis batas yang tegas antara hak keluarga dan kepentingan umum. Prinsip keadilan melarang keras keluarga menuntut fasilitas yang melampaui haknya atau mendesak pejabat memberikan perlakuan khusus kepada kerabat dalam kebijakan publik.

Keempat, ***Ihsan*** **(Kualitas Keunggulan dan Kepekaan Etis).** Orientasi untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik dengan kesadaran muraqabatullah—merasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Dalam dimensi integritas, ihsan melahirkan kepekaan terhadap kepantasan publik (appearance of impropriety): kehati-hatian untuk menolak suatu tindakan yang secara formal hukum mungkin tidak melanggar aturan tertulis, namun mencederai rasa keadilan dan kepantasan etika masyarakat.

Kelima, ***Mas'uliyyah*** **(Tanggung Jawab Sadar Konsekuensi).** Pemahaman mendalam bahwa setiap ucapan, unggahan di ruang digital, dan

interaksi sosial anggota keluarga membawa konsekuensi moral terhadap reputasi pejabat dan kehormatan dakwah.

Keenam, ***Basathah dan Qana'ah*** **(Kesederhanaan yang Memartabatkan).** Sikap batin yang merasa cukup dengan rezeki yang halal dan sah, mengendalikan nafsu konsumerisme, serta menjaga jarak yang sehat dari pamer kemewahan (flexing). Kesederhanaan di meja makan keluarga adalah benteng terdepan yang mencegah pejabat terdorong mencari tambahan pendapatan haram demi membiayai gaya hidup mewah rumah tangganya.

Ketujuh, *Uswah Hasanah* (Keteladanan Hidup). Kemampuan menghadirkan nilai-nilai kebajikan melalui perbuatan nyata sehari-hari, menjadi rujukan moralitas bagi masyarakat sekitar tanpa kepura-puraan pencitraan.

Kedelapan, *Khidmah* (Pengabdian Tulus). Menjadikan kehadiran di ruang publik sebagai sarana melipatgandakan manfaat bagi sesama, merangkul kaum mustadh'afin, dan merawat kepekaan nurani terhadap beban penderitaan rakyat.

Kendati delapan nilai tersebut dipancangkan sebagai standar etika yang mengikat, Naskah Akademik BP3U meletakkan klausul pembatas yang sangat fundamental: pembinaan keluarga berbasis standardisasi nilai (value standardization), bukan penyeragaman pola kehidupan (*life uniformization*).


gambar : tirto.id

Keluarga pejabat publik bukan pejabat publik. Anggota keluarga—baik pasangan maupun anak-anak—tetap merupakan individu merdeka yang memiliki hak konstitusional atas ruang privat, kebebasan menjalankan profesi profesionalnya masing-masing, hak berekspresi, serta otonomi dalam menata rumah tangganya. Kebijakan partai tidak boleh berubah menjadi instrumen koersif yang memata-matai atau mencampuri urusan domestik keluarga secara berlebihan. Yang distandarkan adalah komitmen integritas, kejujuran sumber rezeki, dan ketaatan hukum; sementara pilihan karier, minat akademis, dan ekspresi budaya keluarga tetap dihormati sepenuhnya dalam bingkai kemandirian yang bermartabat.

Segmen 1: Arsitektur Kelembagaan dan Manajemen Krisis

Sinergi BP3U, Forum ISPIMDA, Rumah Keluarga Indonesia, dan Protokol Penanganan Krisis Reputasi Empat Tahap

Ekosistem Multipihak Pendukung Pejabat Publik

Membangun ketahanan keluarga pejabat publik mustahil diserahkan semata-mata pada inisiatif individual masing-masing rumah tangga yang terisolasi. Tekanan kekuasaan di era modern teramat kompleks untuk dipikul sendirian. Oleh karena itu, Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS merancang arsitektur kelembagaan terintegrasi di mana Badan Pembinaan dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (BP3U) bertindak sebagai poros utama perumusan kebijakan (*standard setter*) dan pengawalan pembinaan pejabat daerah secara nasional.

Di dalam struktur BP3U DPP PKS, dibentuk unit operasional khusus bertajuk Deputi Pembinaan Keluarga Pejabat Publik. Deputi ini memegang mandat eksekutif untuk merancang kurikulum pembinaan terpadu, menyelenggarakan bimbingan teknis berkala, menyediakan fasilitas konsultasi psikososial, serta mengkoordinasikan ekosistem multipihak internal partai yang melibatkan organ-organ strategis:

Pertama, **Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK).** Bertindak sebagai mitra strategis di tingkat basis melalui jaringan Rumah Keluarga Indonesia (RKI). RKI menyediakan instrumen konseling ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi komunitas, serta mengelola program edukasi kepemimpinan perempuan yang terstruktur.

Kedua, **Ikatan Suami/Istri Pejabat dan Kepala Daerah (ISPIMDA).** Forum ini menjadi wadah konsolidasi sosiologis dan emosional bagi para

"Membangun ketahanan keluarga pejabat publik mustahil diserahkan semata-mata pada inisiatif individual masing-masing rumah tangga yang terisolasi. Tekanan kekuasaan di era modern teramat kompleks untuk dipikul sendirian."



pendamping kepala daerah dan pimpinan legislatif. Melalui ISPIMDA, para pasangan peja-bat dapat saling berbagi pengalaman (*peer-sharing*), mendiskusikan dilema etika protokoler yang dihadapi di lapangan, serta menyatukan langkah dalam memelopori program-program sosial kerakyatan tanpa terjebak dalam pusaran persaingan status sosial.

Ketiga, **Dewan Syariah Pusat (DSP).** Berperan sebagai penjaga garis batas syariat, etika moral, dan keharmonisan organisasi. Melalui Komisi Penegakan Disiplin Syar'i, Organisasi, dan Etik serta Komisi Ketahanan Keluarga, DSP merumuskan fatwa panduan hukum Islam terkait isu-isu kontemporer kepatuhan keluarga pejabat (seperti batasan penerimaan hadiah/hibah keluarga, pengelolaan aset, dan hukum *fikih siyasah domestik*).

Keempat, **Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO).** Bertanggung jawab dalam penegakan kepatuhan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, melakukan fungsi penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran hukum dan etika yang melibatkan pejabat publik maupun keluarganya, demi menjaga murwah partai tanpa pandang bulu.

Kelima, **Fraksi PKS di DPR RI dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.** Bertindak sebagai pengawas operasional harian yang menyediakan ruang kerja parlemen ramah keluarga (*family-friendly workspace*), memantau kepatuhan kode etik anggota legislatif, serta mengawal keseimbangan beban kerja kader antara tugas-tugas deliberasi komisi dan waktu interaksi keluarga di

> "Partai dakwah pantang mengorbankan kebenaran demi melindungi oknum pejabat yang bersalah. Apabila investigasi membuktikan pelanggaran hukum, berkas perkara segera dilimpahkan ke Komisi Penegakan Disiplin DSP."

rumah.

Pendekatan Sistem Ganda: Harmonisasi Supportif dan Koersif

Arsitektur tata kelola pembinaan keluarga yang dirumuskan BP3U PKS beroperasi melalui mekanisme Pendekatan Sistem Ganda (*Dual-System Approach*)—sebuah perpaduan yang harmonis antara tangan kasih sayang yang merangkul (*supportive hand*) dan tangan disiplin yang tegas (*coercive hand*):

1. Pendekatan Supportif (*Perlindungan dan Penguatan Fasilitatif*)

Pendekatan ini berlandaskan pemahaman bahwa keluarga pejabat publik adalah manusia biasa yang menghadapi beban psikologis dan sosial yang luar biasa berat. Tekanan sorotan publik yang tiada henti, ancaman pembunuhan karakter dari lawan politik, kelelahan fisik akibat agenda protokoler, serta rasa kesepian akibat ketidakhadiran fisik pejabat di rumah dapat memicu stres perkawinan dan kecemasan mental anak.

Melalui sinergi Deputi Pembinaan Keluarga BP3U, BPKK, dan RKI, partai menghadirkan sistem pendampingan psikososial yang komprehensif:

- Layanan Hotline *Family Care:* Kanal konseling rahasia (confidential crisis line) yang diasuh oleh para psikolog keluarga profesional dan konselor syariah independen. Layanan ini dapat diakses setiap saat oleh pasangan maupun anak pejabat yang membutuhkan ruang aman (safe space) untuk berkonsultasi mengenai masalah relasi perkawinan, trauma perundungan politik, stres akademis, atau krisis kepercayaan diri tanpa khawatir privasinya bocor ke ranah publik politik.
- Bimbingan Teknis dan Retret Ketahanan Keluarga: Agenda berkala yang dirancang khusus untuk mempertemukan keluarga pejabat publik dalam suasana rileks, hangat, dan jauh dari hiruk-pikuk protokoler kedinasan. Forum ini menjadi sarana pengisian kembali energi spiritual (*recharging ruhani*), pelatihan manajemen stres, serta penguatan kembali komitmen perkawinan sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalizha*).

2. Pendekatan Koersif (Pengawasan Kepatuhan dan Penegakan Disiplin)

Pendekatan pendampingan supportif harus diimbangi oleh ketegasan penga-

wasan etika guna memastikan target kepemimpinan *Zero Case* (nihil pelanggaran hukum, etik, dan moral) benar-benar terwujud di lapangan. Partai dakwah tidak boleh bersikap permisif terhadap bibit-bibit penyimpangan yang tumbuh di lingkungan keluarga pejabatnya.

Instrumen pengawasan koersif ini mencakup:

- **Audit Keselarasan Gaya Hidup (*Lifestyle Audit*):** Mekanisme pemantauan objektif yang mencocokkan profil pengeluaran dan aset keluarga dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) resmi pejabat publik. Bila terdeteksi anomali kepemilikan aset mewah atau pola konsumsi keluarga yang tidak sebanding dengan profil pendapatan resmi yang sah, organ pengawas internal berwenang meminta klarifikasi tertutup.
- **Audit Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest Audit*):** Penegakan larangan mutlak bagi anggota keluarga untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam rantai pasok pengadaan barang dan jasa, tender proyek pemerintah daerah, penunjukan jabatan publik, serta penerimaan fasilitas dari pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan pejabat yang bersangkutan.
- **Penegakan Disiplin Syar'i DSP:** Penegakan standar kepatutan syariat Islam yang mengikat seluruh keluarga kader di ruang publik, memastikan tidak ada tindakan anggota keluarga yang melanggar hukum agama, mencederai etika kepantasan, atau meruntuhkan kehormatan dakwah.
- **Uji Kelayakan Keluarga Pra-Pencalonan (*Family Due Diligence*):** Langkah preventif mutlak yang diintegrasikan ke dalam sistem rekrutmen politik partai. Sebelum seorang kader ditetapkan secara resmi sebagai calon kepala daerah atau calon anggota legislatif pada pemilu, BP3U bersama BPKK melakukan asesmen komprehensif atas kesiapan mental, ketahanan relasi domestik, serta komitmen etika pasangan dan keluarga. Kader yang memiliki potensi krisis domestik akut atau rekam jejak benturan kepentingan keluarga yang belum terselesaikan tidak akan direkomendasikan untuk menduduki pos jabatan publik berisiko tinggi.

Protokol Pengendalian Krisis Etika

> "Pendekatan supportif berlandaskan pemahaman bahwa keluarga pejabat publik adalah manusia biasa yang menghadapi beban psikologis dan sosial yang luar biasa berat."

dan Reputasi Empat Tahap

Dalam dinamika politik yang keras, badai krisis etika atau serangan reputasi yang menargetkan keluarga pejabat publik dapat meledak sewaktu-waktu. Sebuah insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak pejabat, pertengkaran di tempat umum, atau tuduhan korupsi keluarga yang diviralkan di media sosial menuntut manajemen respons yang cepat, terukur, dan kedap panik.

Naskah Akademik BP3U DPP PKS merumuskan Protokol Penanganan Krisis Etika dan Reputasi Keluarga Empat Tahap:

Tahap 1: Triase Cepat dan Verifikasi Fakta Tertutup (*Tabayyun Protocol*)

Dalam tempo maksimal satu kali dua puluh empat jam sejak suatu isu mencederai ruang publik, satuan tugas tanggap darurat yang terdiri atas pimpinan BP3U, BPDO, dan BPKK segera menggelar rapat triase tertutup. Langkah pertama adalah melakukan verifikasi fakta secara objektif (fact-checking), memisahkan antara fakta riil di lapangan, kesalahpahaman informasi, atau kampanye hitam rekayasa lawan politik (*black campaign*). Satgas memetakan tingkat keparahan risiko: apakah isu tersebut berskala pelanggaran pidana murni, pelanggaran kode etik organisasi, atau sekadar krisis komunikasi media sosial.

Tahap 2: Perlindungan Psikososial dan Rehabilitasi Korban

Apabila krisis yang terjadi menyerang kondisi psikologis atau mengancam keselamatan fisik anggota keluarga—terutama anak-anak yang rentan mengalami trauma akibat perundungan siber (*cyberbullying*) massal—fokus utama partai seketika diarahkan untuk menyelamatkan kejiwaan keluarga. Deputi Pembinaan Keluarga BP3U bersama tim ahli Rumah Keluarga Indonesia langsung menerjunkan konselor trauma dan pendamping psikologis tertutup. Anak dan pasangan dijauhkan sementara waktu dari paparan layar gawai dan diselamatkan ke lingkungan aman guna mencegah depresi mental berkepanjangan.

Tahap 3: Pengendalian Komunikasi Publik Satu Pintu

Di arena komunikasi massa, pintu spekulasi harus segera dikunci rapat. Begitu krisis mencuat, seluruh wewenang rilis media, klarifikasi, dan respons publik ditarik penuh di bawah komando Bidang Humas DPP atau DPW PKS. Pejabat publik yang bersangkutan,

> "Uji Kelayakan Keluarga Pra-Pencalonan: langkah preventif mutlak yang diintegrasikan ke dalam sistem rekrutmen partai. Kader dengan potensi krisis domestik akut tidak direkomendasikan menduduki jabatan berisiko tinggi."



pasangan, maupun anak-anaknya dilarang keras membuat pernyataan reaktif, klarifikasi emosional, atau perdebatan terbuka di media sosial pribadi yang berisiko memperkeruh suasana dan memperpanjang siklus krisis. Seluruh narasi respons disusun secara terukur, berbasis fakta hukum yang jujur, serta disampaikan dengan nada empati, rendah hati, dan bermartabat ke hadapan publik.

Tahap 4: Penegakan Disiplin Organisasi dan Sidang Etik Objektif

Partai dakwah pantang mengorbankan kebenaran demi melindungi oknum pejabat yang bersalah. Apabila hasil investigasi internal membuktikan bahwa krisis reputasi tersebut berakar dari kesengajaan pembiaran, pelanggaran hukum, atau kesembronoan etika yang melibatkan pejabat publik dan keluarganya, berkas perkara segera dilimpahkan ke hadapan Komisi Penegakan Disiplin Dewan Syariah Pusat. DSP menggelar sidang etik secara independen dan menjatuhkan sanksi disiplin yang proporsional: mulai dari teguran tertulis, pencopotan dari pimpinan alat kelengkapan dewan, penonaktifan jabatan publik, hingga rekomendasi pemecatan dari keanggo-taan partai. Keadilan ditegakkan secara terang benderang demi menjaga kesucian amanah dan kepercayaan rakyat.

Segmen 3: Pedagogi Ketahanan dan Literasi Digital

Model Pengasuhan Politisi, Kurikulum Tarbiyah Usriyah Sepuluh Muwashofat, dan Imunitas Siber Generasi Muda



Menjawab Dilema Absenteisme Fisik: Model Pengasuhan Politisi (*Political-Family Parenting*)

Tantangan paling universal yang dihadapi oleh setiap keluarga pejabat publik adalah kelangkaan waktu bersama. Ritme kerja kenegaraan yang menuntut mobilitas tinggi—rapat paripurna hingga dini hari, inspeksi bencana di pelosok daerah, kunjungan kerja luar wilayah, hingga kewajiban menyapa konstituen di akar rumput— sering kali menciptakan fenomena ketidakhadiran fisik pejabat secara kronis di rumah (*physical absenteeism*).

Apabila tidak dikelola dengan kesadaran pedagogis yang matang, ketidakhadiran fisik orang tua dapat memicu kerentanan psikologis yang mendalam pada anak: anak merasa ditelantarkan demi kepentingan politik orang tua, kehilangan figur lekat (*attachment figure*), serta rentan mencari kompensasi kasih sayang yang keliru di luar rumah. Kondisi ini diperberat oleh ancaman trauma politik sekunder (*secondary political trauma*), di mana anak-anak pejabat publik menjadi sasaran empuk cemoohan, perundungan verbal dari teman sebaya di sekolah, atau serangan ujaran kebencian di jagat maya setiap kali kebijakan orang tuanya menuai kontroversi di ruang publik.

> "Ketika anak menyaksikan orang tuanya tetap shalat tepat waktu, mencium tangan orang tua dengan takzim, serta hidup bersahaja di tengah kekuasaan, anak menyerap nilai integritas tersebut ke dalam sanubarinya secara permanen."

Menjawab krisis pengasuhan ini, BP3U PKS memelopori pendekatan Model Pengasuhan Politisi (*Political-Family Parenting*) yang bertumpu pada tiga pilar pendidikan karakter:

Pertama, **Mengutamakan Kualitas Kehadiran *(Quality over Quantity Time*).** Menyadari keterbatasan kuantitas waktu, setiap momen kebersamaan yang tersedia di dalam rumah harus dirancang secara intensif dan bermakna. Pejabat publik dilatih untuk mempraktikkan kehadiran sadar penuh (*mindful presence*): saat melangkah melintasi pintu rumah, letakkan telepon genggam dinas, tanggalkan atribut protokoler, dan curahkan perhatian utuh untuk mendengar cerita keseharian anak dan pasangan. Sediakan ruang dialog yang egaliter dan santai di meja makan tanpa intimidasi otoritas kedinasan.

Kedua, **Keteladanan Konkret yang Hidup *(Living the Values*).** Anak-anak tidak belajar dari pidato politik orang tuanya di layar televisi; mereka belajar dari apa yang mereka saksikan langsung di dalam rumah. Narasi kepedulian sosial yang disuarakan sang ayah atau ibu di gedung parlemen harus tampak nyata dalam perlakuannya terhadap asisten rumah tangga, sopir dinas, dan tetangga terdekat di sekitar kediaman. Ketika anak menyaksikan orang tuanya tetap shalat tepat waktu, mencium tangan orang tua dengan takzim, serta hidup bersahaja di tengah kekuasaan, anak menyerap nilai integritas tersebut ke dalam sanubarinya secara permanen.

Ketiga, **Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Kasih Sayang (*Civic Education of Compassion*).** Melibatkan anak secara proporsional dan bijaksana dalam memahami hakikat tugas orang tuanya. Jelaskan kepada anak dengan bahasa yang hangat bahwa kesibukan orang tua di luar rumah bukanlah karena melupakan mereka, melainkan bagian dari jihad pengabdian untuk menolong jutaan anak-anak lain di pelosok negeri agar dapat bersekolah dan berobat secara layak. Dengan menanamkan pemahaman ini sejak dini, anak tidak tumbuh dengan rasa dendam terhadap profesi

orang tua, melainkan bertransformasi menjadi anak yang bangga dan memiliki kesadaran kepedulian sosial yang tinggi bagi bangsanya.

Adaptasi Sepuluh *Muwashofat Tarbawiyah* ke dalam Kurikulum Tarbiyah Usriyah

Dalam manhaj kaderisasi PKS, sepuluh indikator karakter Islami (*Muwashofat Tarbawiyah*) merupakan standar pembentukan pribadi muslim ideal. Di bawah arahan Naskah Akademik BP3U yang bersinergi dengan Bidang Kaderisasi dan DSP, sepuluh karakter tersebut diadaptasikan secara kontekstual menjadi Kurikulum *Tarbiyah Usriyah* (Pendidikan Keluarga) yang wajib dijalankan di rumah tangga setiap pejabat publik:

1. ***Salimul Aqidah* (Akidah yang Bersih dan Lurus):** Membebaskan jiwa anak dan pasangan dari segala bentuk pemujaan terhadap materi, tahta kekuasaan, dan popularitas duniawi. Menanamkan keyakinan mutlak bahwa kekuasaan hanyalah ujian fana, dan kemuliaan sejati manusia hanya terletak pada ketakwaannya di hadapan Allah SWT.
2. ***Shahihul Ibadah* (Ibadah yang Benar dan Disiplin):** Menjaga kontinuitas ibadah wajib dan sunnah di tengah padatnya jadwal protokoler kenegaraan. Shalat berjamaah di rumah saat pejabat sedang berada di kediaman menjadi jangkar ketenangan batin yang merekatkan ikatan emosional keluarga.
3. ***Matinul Khuluq* (Akhlak yang Kokoh dan Mulia):** Menumbuhkan karakter rendah hati (*tawadhu'*), sopan santun dalam bertutur kata, menghargai setiap orang tanpa memandang status sosial ekonominya, serta menjauhi tabiat angkuh dan merasa diri lebih tinggi dari orang lain.
4. ***Qadirun 'alal Kasbi* (Kemandirian Finansial):** Mendidik anak-anak pejabat publik sejak dini untuk memiliki etos kerja mandiri, berwirausaha, dan mengejar prestasi profesional berdasarkan keringat dan keahlian sendiri. Anak dilarang keras menumpang fasilitas jabatan dinas orang tua atau menjadi benalu proyek kekuasaan.
5. ***Mutsaqqajul Fikri* (Keluasan Wawasan dan Literasi Kebangsaan):** Membekali keluarga dengan wawasan geopolitik, sejarah kebangsaan, konsensus Pancasila dan UUD 1945,

> "Fasilitas dinas adalah instrumen kerja negara yang dibiayai dari keringat pajak rakyat, bukan properti mainan untuk memuaskan narsisme pribadi."

serta pemahaman atas kemajemukan bangsa, sehingga anak mampu memposisikan diri sebagai agen pemersatu bangsa yang berpikiran terbuka.

6. ***Qawiyyul Jismi* (Kebugaran Fisik dan Gaya Hidup Sehat):** Mengatur pola istirahat, kebersihan asupan makanan, dan olahraga teratur di tengah rutinitas dinas pejabat yang rentan memicu penyakit degeneratif akibat kelelahan fisik dan stres mental.
7. ***Mujahidun linafsihi* (Kekuatan Pengendalian Diri):** Imunitas mental tertinggi bagi keluarga pejabat. Membangun kemampuan batin anak dan pasangan untuk menahan diri dari dorongan konsumerisme kompensatoris, godaan pamer kekayaan (*flexing*), serta menolak pergaulan sosialita yang hedonistik dan nirfaedah.
8. ***Munazhamun fi Syu'unihi* (Keteraturan dan Manajemen Waktu):** Membangun manajemen agenda keluarga yang tertib dan disiplin, memastikan agenda dinas publik tidak menabrak jadwal-jadwal sakral keluarga seperti perayaan kelulusan anak, hari ulang tahun perkawinan, dan waktu istirahat domestik.
9. ***Harisun 'ala Waqtihi* (Efisiensi Waktu dan Produktivitas):** Memanfaatkan waktu luang di rumah untuk kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan keakraban intelektual dan emosional, seperti membaca buku bersama, berdiskusi mengenai isu-isu kemanusiaan, dan tadabbur alam.

"Mujahidun linafsihi: Imunitas mental tertinggi bagi keluarga pejabat. Membangun kemampuan batin anak dan pasangan untuk menahan diri dari dorongan konsumerisme kompensatoris, godaan pamer kekayaan (flexing), serta menolak pergaulan sosialita yang hedonistik."

10. ***Nafi'un li Ghairihi* (Manfaat Nyata bagi Sesama):** Mengarahkan anak-anak pejabat untuk aktif terlibat dalam gerakan kerelawanan sosial—mengajar anak-anak jalanan di Rumah Keluarga Indonesia, membantu dapur umum bencana, dan menggalang bantuan kemanusiaan—sehingga mereka merasakan nikmatnya memberi manfaat bagi sesama tanpa pamrih politik.

Protokol Kebersihan Digital (*Digital Hygiene*) dan Ketahanan Siber Keluarga

Di era keterbukaan informasi publik kontemporer, layar telepon genggam di tangan pasangan dan anak pejabat publik adalah garis perbatasan pertahanan reputasi yang paling rentan

diterobos. Jebakan terbesar generasi digital adalah ilusi privasi di media sosial: menganggap unggahan di akun pribadi hanya disaksikan oleh teman dekat, padahal setiap detik tangkapan layar (*screenshot*) dapat diabadikan, dipelintir di luar konteks aslinya, dan disebarluaskan oleh aktor politik lawan menjadi amunisi penghancur elektoral.

Untuk memitigasi bahaya tersebut, BP3U PKS memberlakukan Protokol Kebersihan Digital (*Digital Hygiene Protocol*) yang memuat panduan perilaku siber secara ketat bagi seluruh keluarga pejabat publik:

Pertama, **Larangan Mutlak Perilaku Pamer Kemewahan (*Anti-Flexing Rule*).** Anggota keluarga dilarang keras mengunggah foto, video, atau konten yang menampilkan barang-barang bermerek mewah bernilai fantastis, fasilitas liburan eksklusif berbiaya mahal, pesta privat yang glamor, atau simbol-simbol status sosialita. Perilaku semacam ini tidak hanya mencederai empati rakyat miskin yang tengah berjuang memenuhi kebutuhan pokoknya, melainkan secara langsung meruntuhkan kredibilitas ideologis partai yang mengusung panji pembelaan kaum dhuafa.

Kedua, **Sterilisasi Aset Dinas dari Ruang Privat Media Sosial.** Anggota keluarga dilarang menjadikan kendaraan dinas berplat istimewa, interior ruang kerja pemerintahan, pengawalan kepolisian (*voorrijder*), atau fasilitas negara lainnya sebagai latar konten swafoto (*selfie*) demi mengejar decak kagum warganet. Fasilitas dinas adalah instrumen kerja negara yang dibiayai dari keringat pajak rakyat, bukan



properti mainan untuk memuaskan narsisme pribadi.

Ketiga, **Disiplin Pernyataan Politik dan Penyelarasan Garis Partai.** Mengingat statusnya sebagai keluarga figur publik, setiap opini pribadi yang ditulis anggota keluarga di ruang digital akan selalu dipersepsikan oleh warganet sebagai representasi sikap politik sang pejabat atau partainya. Oleh karena itu, anggota keluarga dibekali pemahaman literasi politik dasar agar menahan diri dari membuat pernyataan yang konfrontatif, menyerang kelompok masyarakat tertentu, atau bertentangan secara terbuka dengan sikap resmi par-tai. Jika menghadapi polemik di dunia maya, keluarga diarahkan untuk mengedepankan etika diam (*dignified silence*) dan menyerahkan pengelolaan narasi publik kepada juru bicara resmi partai.

Keempat, **Protokol Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi (*Cyber Security Awareness*).** Mengingat tingginya ancaman spionase politik dan serangan siber, keluarga pejabat dibekali keterampilan teknis mengamankan jejak digital: pengaktifan verifikasi dua langkah (*two-factor authentication*) pada seluruh akun media sosial dan perbankan, penolakan tautan internet mencurigakan (*phishing*), pengaturan privasi lokasi (*geotagging disable*), serta larangan keras memotret atau mengunggah dokumen-dokumen resmi kedinasan milik orang tua yang tercecer di atas meja kerja rumah. Rumah tinggal harus tetap menjadi benteng pertahanan informasi yang steril dari ancaman kebocoran rahasia negara.

Epilog Kebijakan: Kemenangan Sejati Bermula dari Rumah

Ketika lembaran-lembaran regulasi telah ditelaah, ketika matriks tata kelola telah dipetakan, dan ketika instrumen pengawasan telah dipancangkan, kita tiba pada satu muara kebenaran hakiki mengenai kepemimpinan peradaban: kekuasaan publik yang agung selalu berakar pada kesucian ruang domestik. Sebuah rezim pemerintahan dapat saja membangun jalan tol terpanjang, mendirikan gedung-gedung pencakar

> "Apabila para pemimpinnya gagal memimpin keluarganya sendiri; apabila anak-anaknya terbiasa hidup dari rezeki syubhat yang merampas hak fakir miskin; dan apabila pasangan hidupnya menjelma menjadi makelar proyek di balik megahnya meja kekuasaan, maka seluruh bangunan peradaban tersebut sejatinya tengah berdiri di atas fondasi pasir yang rapuh."

\“Dari kesahajaan meja makan keluarga, dari kehangatan dialog di ruang tengah rumah, dan dari kesucian rezeki yang dibawa pulang ke bilik privat, kita sedang membangun benteng moral kepemimpinan nasional yang tak tergoyahkan.”

langit yang megah, atau merumuskan undang-undang yang paling canggih di atas kertas. Namun, apabila para pemimpinnya gagal memimpin keluarganya sendiri; apabila anak-anaknya terbiasa hidup dari rezeki syubhat yang merampas hak fakir miskin; dan apabila pasangan hidupnya menjelma menjadi makelar proyek di balik megahnya meja kekuasaan, maka seluruh bangunan peradaban tersebut sejatinya tengah berdiri di atas fondasi pasir yang rapuh.

Bagi Partai Keadilan Sejahtera, jalan kekuasaan bukanlah jalan perburuan kenikmatan duniawi, melainkan jalan pendakian spiritual yang sarat ujian dan pengorbanan. Pejabat publik binaan partai dakwah tidak diutus ke ruang pemerintahan untuk membangun dinasti dinasti oligarki kecil di daerah pemilihannya. Mereka diutus untuk menjadi lentera keadilan yang menerangi kegelapan nasib rakyat jelata.

Dan lentera keadilan tersebut tidak akan pernah bersinar terang di ruang publik apabila sumbunya redup di dalam rumah.

Ia bersinar manakala seorang bupati atau anggota legislatif pulang ke rumah di larut malam, disambut oleh senyum tulus pasangannya yang tidak pernah menuntut tas mewah, melainkan menanyakan apakah ada hak orang miskin yang belum ia tunaikan hari itu.

Ia bersinar manakala anak-anak pejabat publik melangkah tegap di kampus dan sekolahnya dengan mengenakan sepatu sederhana hasil keringat halal orang tuanya, menolak seluruh perlakuan istimewa, dan memilih mengabdi dengan rendah hati di tengah masyarakat.

Di sanalah hakikat kemenangan dakwah bermula. Dari kesahajaan meja makan keluarga, dari kehangatan dialog di ruang tengah rumah, dan dari kesucian rezeki yang dibawa pulang ke bilik privat, kita sedang membangun benteng moral kepemimpinan nasional yang tak tergoyahkan. Dari panggung belakang yang terjaga itulah, para negarawan sejati akan lahir: memimpin dengan nurani yang bersih, menata negeri dengan kecakapan ilmu, dan mempersembahkan keadilan sosial yang abadi bagi seluruh rakyat Indonesia.

5

Kiprah Lapangan & Parlemen

Kiprah Lapangan & Parlemen

Seri Reportase Khusus: Menyusuri Jejak Air Mata, Merawat Nyala Harapan

ARTIKEL 1: KETUKAN PALU DAN JEJAK KAKI DI TANAH FLORES

Ketika Solidaritas Menembus Batas Kepulauan: Dari Pemotongan Gaji Parlemen Menuju Posko Sunyi Pedalaman Manggarai

Kabut tipis masih menggantung di perbukitan Barang Kolo, sebuah dusun berjarak puluhan kilometer dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di bawah tenda terpal biru yang diikat seadanya pada dahan pohon kemiri, Maria Goretti (48) duduk termenung memangku baskom alumunium penyok. Rumah panggungnya retak parah, luluh lantak diguncang gempa tektonik berkekuatan Magnitudo 7,7 yang mengoyak bumi Flobamora pada pertengahan Agustus 2026.

"Saat tanah bergetar hebat seperti ditumbuk dari bawah, kami hanya sempat menarik anak-anak keluar. Dinding batako runtuh dalam hitungan detik. Berhari-hari kami tidur beralas rumput kering, menanti kiriman beras dan terpal," tutur Maria dengan suara bergetar pelan.

Gempa dahsyat tersebut memicu

> "Bagi PKS, aksi di tanah Flores adalah pembuktian atas prinsip inklusivitas pelayanan publik: duka warga adalah duka bangsa, tanpa memandang sekat agama maupun pilihan politik."

krisis kemanusiaan yang masif, memaksa lebih dari 185.000 jiwa mengungsi di tenda-tenda darurat yang tersebar di tujuh kabupaten di Pulau Flores. Di tengah situasi ketika jalur logistik antarpulau terputus dan aparatur daerah kewalahan, sebuah ikhtiar kemanusiaan digerakkan dari ibu kota tanpa gembar-gembor seremonial.

Tepat pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengumumkan kebijakan pemotongan gaji seluruh anggotanya. Langkah pemotongan penghasilan parlemen ini berhasil menghimpun dana darurat tunai sebesar Rp1 miliar, yang langsung diserahkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana DPP PKS sebagai modal kerja awal penanganan tanggap darurat.

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menegaskan bahwa pemotongan gaji para wakil rakyat adalah kewajiban etis yang paling mendasar saat rakyat tertimpa kemalangan.

"Ketika saudara-saudara kita di NTT kehilangan tempat berteduh dan tidur beralas tanah dingin, pantang bagi wakil rakyat berdiam diri dalam kenyamanan. Pemotongan gaji aleg Fraksi PKS ini bukan soal angka, melainkan wujud takzim kami atas amanah rakyat. Bantuan ini adalah hak kemanusiaan yang harus segera tiba di tenda-tenda pengungsian sebelum



> “Ketika saudara-saudara kita di NTT kehilangan tempat berteduh dan tidur beralas tanah dingin, pantang bagi wakil rakyat berdiam diri dalam kenyamanan.”

mata rantai bantuan resmi negara terdistribusi merata," tegas Kholid.

Uang tunai tersebut tidak dibiarkan mengendap di rekening organisasi. Satgas Penanggulangan Bencana PKS segera menerjunkan Tim Aju (AJJU) ke zona gempa guna memetakan jalur-jalur tikus yang ter-isolasi serta mengidentifikasi kantong-kantong pengungsi rentan—terutama lansia, ibu hamil, dan balita. Secara bergelombang, sekitar 200 personel relawan terlatih, mencakup unit medis lapangan dan regu penyelamat (*search and rescue*), dikirimkan secara bergilir.

Mengingat keterbatasan trans-portasi antarpulau di kawasan timur, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Nusa Tenggara Barat (NTB) difungsikan sebagai pangkalan pendukung terde-kat. Bidang Kepanduan dan Bela Negara (BKBN) DPW PKS NTB mengirimkan regu relawan ke Mang-garai Barat untuk menjalankan tugas lapangan selama 14 hari penuh. Mereka menyortir bantuan logistik di dermaga penyeberangan, mengangkut tandon air, serta mendirikan dapur umum mandiri di kampung-kampung yang sulit ditembus kendaraan roda empat.

Pemandangan mengharukan terekam ketika pimpinan pusat PKS turun langsung menyusuri pedalaman Manggarai. Bersama pengurus daerah setempat, Sekjen Muhammad Kholid berjalan kaki menembus jalanan desa yang terbelah rekahan tanah untuk mengantarkan bantuan pangan ke Posko Barang Kolo. Di wilayah yang mayoritas warganya memeluk keyakin-an Katolik tersebut, kehadiran relawan berpakaian oranye dan rompi hitam disambut dengan pelukan hangat para tetua adat.

Bagi PKS, aksi di tanah Flores adalah pembuktian atas prinsip inklu-sivitas pelayanan publik: duka warga adalah duka bangsa, tanpa meman-dang sekat agama maupun pilihan politik.

"Di hadapan derita bencana, sekat-sekat perbedaan suku dan keyakinan runtuh seketika. Kemanusiaan adalah bahasa universal yang paling jujur. Kami datang ke Manggarai bukan untuk mencari panggung suara, melainkan menunaikan kewajiban moral sebagai sesama anak bangsa," ujar Kholid saat membagikan paket logistik di pelataran gereja paroki setempat.



“Bagi PKS, aksi di tanah Flores adalah pembuktian atas prinsip inklusivitas pelayanan publik: duka warga adalah duka bangsa, tanpa memandang sekat agama maupun pilihan politik.”

H. MUHAMMAD KHOLID, S.E., M.Si.
Sekjen DPP PKS



ARTIKEL 2: MEMPERJUANGKAN RUANG KELAS DARI SENAYAN

Nestapa 253 Sekolah di Flores: Desakan Dana Siap Pakai Rp5 Triliun dan Pemulihan Jiwa Anak Pengungsi

Di balik reruntuhan dinding semen SD Inpres Wae Jare, Manggarai Barat, tumpukan buku pelajaran bersampul plastik tampak basah terendam air hujan. Di sudut halaman sekolah yang retak, puluhan anak berseragam merah-putih duduk berjejal di bawah tenda darurat yang pengap. Papan tulis kayu disandarkan pada batang pohon asam, sementara debu putih kapur bercampur embusan angin pegunungan.

Laporan pemutakhiran data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat angka yang memilukan: guncangan gempa bumi di NTT telah merusak sedikitnya 253 bangunan sekolah di tujuh kabupaten. Kehancuran terparah terkonsentrasi di Kabupaten Manggarai dengan 104 sekolah rusak berat dan sedang, disusul Manggarai Timur 52 sekolah, Nagekeo 44 sekolah, Ende 39 sekolah, Ngada 35 sekolah, Sikka 27 sekolah, dan Manggarai Barat 23 sekolah.

Mendengar laporan faktual dari relawan lapangan di Flores, anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, langsung melancarkan interupsi kritis dalam rapat kerja bersama kementerian teknis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Fikri menyoroti lambannya birokrasi

> “Pemerintah harus segera mengucurkan Dana Siap Pakai BNPB sebesar Rp5 triliun untuk mendirikan ruang kelas darurat tahan gempa, membagikan modul ajar luring di wilayah tanpa internet, serta memulihkan fasilitas sanitasi sekolah.”

pendidikan pusat dalam menyediakan ruang belajar darurat, padahal kalender akademik anak-anak pedalaman tidak boleh terhenti berlarut-larut.

Fikri mendesak pemerintah untuk tidak menunda-nunda pencairan alokasi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan nasional sebesar Rp5 triliun yang bersiaga di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Ada 253 bangunan sekolah yang luluh lantak di NTT, dan di dalamnya ada puluhan ribu anak bangsa yang terancam putus belajar. Jangan biarkan mereka berbulan-bulan menghirup debu di bawah tenda bocor hanya karena urusan verifikasi administratif berbelit-belit. Pemerintah harus segera mengucurkan Dana Siap Pakai BNPB sebesar Rp5 triliun untuk mendirikan ruang kelas darurat tahan gempa, membagikan modul ajar luring di wilayah tanpa internet, serta memulihkan fasilitas sanitasi sekolah," tegas Abdul Fikri Faqih dengan nada bergetar di ruang sidang komisi.

Kekhawatiran senada diutarakan oleh rekan sefraksinya di Komisi X, Kurniasih Mufidayati. Legislator perempuan PKS ini menekankan bahwa pemulihan infrastruktur fisik ruang kelas harus berjalan beriringan dengan jaminan ketahanan mental anak-anak yang mengalami trauma pascabencana.

"Membangun kembali dinding sekolah yang roboh membutuhkan semen dan batu bata, namun menyembuhkan trauma batin anak-anak yang ketakutan melihat bumi berguncang menuntut kehadiran hati nurani. Revitalisasi fisik gedung dan program pendampingan psikososial (trauma healing) harus berjalan dalam satu tarikan napas. Anak-anak NTT harus merasa aman kembali untuk tersenyum dan bercita-cita," kata Kurniasih.

Tak hanya di sektor pendidikan, evaluasi menyeluruh atas peta jalan rehabilitasi pascagempa turut disuarakan oleh anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna. Ateng mengingatkan Badan Otorita dan Kementerian Pekerjaan Umum agar penanganan gempa NTT tidak berhenti pada penyaluran mi instan dan selimut pada fase tanggap darurat, melainkan harus diterjemahkan ke dalam cetak biru rekonstruksi terpadu yang transparan.



"Kerusakan di NTT mencakup sarana vital konektivitas kepulauan, mulai dari dermaga pelabuhan perintis hingga akses jalan menuju bandar udara lokal. Tanpa perbaikan infrastruktur konektivitas yang cepat dan pemutakhiran data korban yang dinamis, rantai pasok ekonomi warga NTT akan lumpuh permanen. Pemerintah wajib menyusun peta jalan rehabilitasi dan rekonstruksi terpadu yang akuntabel dan diawasi publik," ungkas Ateng Sutisna.

Langkah advokasi parlemen ini memperlihatkan sinergi yang utuh: keringat dan temuan relawan PKS di reruntuhan dusun Flores dikonversi secara presisi oleh para legislator di Senayan menjadi instrumen penekan kebijakan anggaran negara.



"Ada 253 bangunan sekolah yang luluh lantak di NTT, dan di dalamnya ada puluhan ribu anak bangsa yang teran-cam putus belajar. Jangan biarkan me-reka berbulan-bulan menghirup debu di bawah tenda bocor hanya karena urusan verifikasi administratif berbelit-belit

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.
Anggota Komisi X

ARTIKEL 3: DI BALIK KEPUNGAN ASAP PEKAT SUMATRA DAN KALIMANTAN

Dari Kedaruratan Napas di Ruang Perawatan Menuju Pertarungan Hukum Konsesi Gambut

Langit di atas Kota Palangkaraya dan Pontianak berubah tembaga. Sepanjang Agustus hingga

Oktober 2026, bau sangit vegetasi gambut yang hangus membakar rongga pernapasan jutaan warga. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luasan lahan terbakar di enam provinsi prioritas telah melampaui 72.008 hektare, sementara ribuan titik panas (hotspot) menyala merah di layar radar satelit BMKG. Sedikitnya 3 juta warga di 37 kabupaten dan kota menghirup partikel beracun setiap detik.

Di ruang instalasi gawat darurat rumah sakit daerah Kalimantan Tengah, tangisan bayi terdengar bersahut-sahutan di sela dengung mesin nebulizer. Dinas Kesehatan mencatat lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) meroket hingga 78,1 persen hanya dalam kurun waktu satu pekan, sementara di Kalimantan Barat angka akumulatif penderita ISPA menembus lebih dari 151 ribu kasus.

Melihat krisis ekologis yang mengancam keselamatan nyawa balita dan lansia, anggota Komisi IX DPR RI sekaligus penanggung jawab sektor kesehatan DPP PKS, Dr. Gamal Albinsaid, M.Biomed., bersuara lantang.



gambar : bbc.com

Gamal menolak sikap pasif otoritas yang memperlakukan karhutla sebagai ritual musim kemarau biasa. Baginya, bencana ini adalah kedaruratan kesehatan masyarakat skala penuh.

"Asap pekat karhutla bukan sekadar gangguan jarak pandang penerbangan, melainkan racun kimia yang mengendap di paru-paru anak-anak kita. Ketika angka ISPA melonjak hampir 80 persen dalam seminggu, negara tidak boleh bersikap bisnis seperti biasa. Kami menuntut pemerintah membuka data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan tren harian ISPA secara transparan per jam, menyiagakan klinik kesehatan bergerak (mobile health clinics) ke pelosok desa, serta membagikan masker medis berstandar filtrasi tinggi secara cuma-cuma," ujar Gamal dengan tegas.

Gamal turun langsung mengawal distribusi puluhan unit *oxygen concentrator* dan ratusan ribu masker medis bantuan kementerian teknis agar segera diterbangkan ke puskesmas-puskesmas terpencil di pedalaman Kalimantan dan Sumatra.

Pada saat yang sama, persoalan kabut asap yang terbawa angin melintasi perbatasan negara (*trans-boundary haze*) memicu perhatian serius di tingkat regional. Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mendesak pemerintah pusat mengambil inisiatif kepemimpinan dalam kerangka ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP).

"Indonesia adalah tuan rumah pusat koordinasi penanganan polusi asap ASEAN. Kita tidak boleh defensif saat negara tetangga mengeluhkan asap lintas batas. Pemerintah harus memimpin diplomasi lingkungan ini secara percaya diri, mengoordinasikan bantuan teknologi modifikasi cuaca lintas batas, sembari menegakkan kedaulatan komando penegakan hukum di tanah air," tegas Kholid.

Di ranah hulu penegakan hukum, dua anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan dan Hj. Nevi Zuairina, membongkar akar masalah di balik terus berulangnya titik api di kawasan konsesi korporasi perkebunan dan kehutanan komersial. Johan

“Kami menuntut pemerintah membuka data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan tren harian ISPA secara transparan per jam, menyiagakan klinik kesehatan bergerak ke pelosok desa, serta membagikan masker medis berstandar filtrasi tinggi secara cuma-cuma.”



gambar : bbc.com

mendesak dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Pengendalian Karhutla di DPR serta revisi radikal terhadap Undang-Undang Kehutanan.

"Selama korporasi pembakar lahan hanya dijatuhi sanksi administratif ringan atau denda yang jauh lebih murah dibanding biaya pembukaan lahan mekanis, hutan kita akan terus dibakar setiap tahun. Panja Karhutla DPR harus segera dibentuk. Cabut izin konsesi perusahaan yang terbukti membiarkan gambutnya terbakar berulang kali, dan umumkan nama-nama pemilik manfaat korporasi tersebut ke hadapan rakyat!" tuntut Johan Rosihan tanpa kompromi.

Sikap tegas legislasi tersebut diperkuat oleh anggota DPR RI Fraksi PKS Hamid Noor Yasin yang mendesak percepatan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berbasis citra satelit BMKG, serta legislator Jalal yang mengusulkan investasi infrastruktur jangka panjang berupa pembangunan "10.000 Titik Air Karhutla" guna mengunci kelembapan gambut secara permanen hingga tahun 2030.

Pengawasan ketat terhadap anggaran bencana turut merembet ke level daerah. Di Jambi, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jambi, Mustaharuddin, memasang badan mengawasi kucuran dana tanggap karhutla senilai Rp30 miliar dari pemerintah pusat agar tidak menguap di meja birokrasi.

"Dana Rp30 miliar ini uang rakyat, bukan bancakan dinas. Kami di Fraksi PKS Jambi mengawal alokasi ini per rupiah: Rp18 miliar di BPBD harus berwujud mesin pompa air apung dan selang pemadam gambut, Rp6,5 miliar di RSUD Raden Mattaher harus berwujud ruang isolasi beroksigen bagi warga miskin, dan dana di Dinas Kehutanan harus mengalir ke kantong Masyarakat Peduli Api (MPA) yang bertaruh nyawa di garis depan pemadaman," tandas Mustaharuddin dalam rapat paripurna dewan.



"Indonesia adalah tuan rumah pusat koordinasi penanganan polusi asap ASEAN. Kita tidak boleh defensif saat negara tetangga mengeluhkan asap lintas batas. Pemerintah harus memimpin diplomasi lingkungan ini secara percaya diri, mengoordinasikan bantuan teknologi modifikasi cuaca lintas batas, sembari menegakkan kedaulatan komando penegakan hukum di tanah air,

dr. GAMAL ALBINSAID

Anggota Komisi IX

ARTIKEL 4: KERINGAT DI CELAH BATU CANGKANG GUNUNG TALANG

Hari-Hari Panjang Relawan Menyingkirkan Galodo Solok: Menjaga Martabat Warga dari Bilik Bencana Nagari

Batu-batu cadas sebesar minibus dan gelondongan kayu gelondongan tumbang berserakan di hamparan sawah Nagari Koto Gadang dan Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Deru air bercampur endapan lumpur vulkanik pekat—yang oleh masyarakat Minang disebut galodo—menerjang lereng Gunung Talang pada pengujung September 2026.

Dalam sekejap, air bah meremukkan puluhan dinding rumah warga, melumpuhkan jembatan penghubung antarnagari, dan merendam fasilitas umum, termasuk Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagari (BPMN) Solok. Yang paling fatal, jaringan pipa air gravitasi yang menyuplai air bersih dari mata air perbukitan putus total diterjang batu gunung. Ribuan warga kebingungan mencari seteguk air bersih untuk memasak dan berwudhu.

Merespons jeritan duka warga Solok, struktur DPW PKS Sumatera Barat bersama DPD PKS Kabupaten dan Kota Solok bergerak cepat. Sejak jam-jam pertama pascabencana, posko



> “Ketika pipa air bersih warga putus dihantam batu galodo, kebutuhan paling mendesak adalah air minum dan sanitasi. Bila warga terpaksa meminum air sungai yang bercampur lumpur belerang, wabah penyakit kolera dan diare akan meledak di pengungsian.”

penanggulangan terpadu didirikan di Nagari Arosuka di bawah komando koordinator lapangan Elfit Gusrizal. Armada truk tangki air bersih PKS diterjunkan menyusuri jalanan sempit, menyuplai ribuan liter air layak konsumsi ke tandon-tandon darurat warga.

"Ketika pipa air bersih warga putus dihantam batu galodo, kebutuhan paling mendesak adalah air minum dan sanitasi. Bila warga terpaksa meminum air sungai yang bercampur lumpur belerang, wabah penyakit kolera dan diare akan meledak di pengungsian. Karena itu, armada tangki air bersih kami prioritaskan bergerak tanpa henti dari pagi hingga larut malam," ungkap Elfit Gusrizal di tengah desau angin dingin kaki Gunung Talang.

Ketahanan dapur umum mandiri di Posko Arosuka disokong penuh oleh anggota DPR RI Fraksi PKS dapil Sumatera Barat I, Rahmat Saleh. Menembus jalur darat yang dipenuhi material longsor, tim relawan Rahmat Saleh menyalurkan ratusan karung beras, minyak goreng, dan kardus mi instan guna menjamin pasokan logistik pangan ribuan porsi makanan hangat setiap hari.

"Di masa panik bencana, dapur umum tidak boleh padam sedetik pun. Para pengungsi, relawan evakuasi, hingga prajurit TNI dan personel Polri yang lelah menyisir sungai harus dipastikan makan kenyang dan hangat. Ini bukan soal politik elektoral; ini soal menyambung napas persaudaraan sesama anak nagari," tutur Rahmat Saleh saat menyerahkan bantuan logistik di posko pengungsian Kayu Aro.

Sentuhan kepedulian semakin lengkap tatkala tokoh penggerak perempuan PKS, Hj. Harneli Bahar, tiba di lokasi membawa pasokan logistik khusus dan peralatan kerja gotong royong warga. Harneli membagikan paket beras, susu balita, serta ratusan cangkul, sekop, dan gerobak dorong (angkong) agar warga dapat mulai membersihkan pekarangan rumah mereka secara mandiri.

"Ibu-ibu dan anak-anak di pengungsian membutuhkan kepastian bahwa hidup mereka akan pulih. Memberikan makanan adalah tanggap darurat, tetapi memberikan sekop dan

cangkul adalah ikhtiar membangkitkan kembali martabat dan semangat gotong royong warga untuk membangun kembali puing-puing nagari," tutur Harneli lembut saat berbincang dengan ibu-ibu pengungsi di teras surau.

Ketika sorotan kamera media massa mulai meninggalkan lokasi bencana seiring redanya fase tanggap darurat, relawan PKS memilih tetap bertahan di lapangan. Hingga hari ke-13 dan ke-14 pascagalodo pada awal Oktober 2026, regu relawan kepanduan PKS bergelut dengan lumpur setebal setengah meter yang menimbun Kantor BPMN Solok dan laboratorium daerah.

Pembersihan gedung pelayanan publik desa ini diprioritaskan agar administrasi pemerintahan nagari dan pengurusan dokumen warga tidak lumpuh. Dengan sepatu bot berlumpur dan tangan kapalan memegang sekop, para relawan bahu-membahu bersama perangkat nagari mencangkul sedimen pasir vulkanik dari ruang-ruang arsip.

Jejak kerja senyap serupa terekam di berbagai pelosok nusantara:

- Di Kabupaten Pasaman Barat, anggota Komisi IV DPR RI Hj. Nevi Zuairina bersama relawan DPD PKS menyusuri perbukitan terjal guna menyalurkan paket sembako secara *door-to-door* ke dusun-dusun yang terisolir akibat tanah longsor.
- Di hulu Aceh Tenggara, regu relawan kemanusiaan PKS menerobos arus banjir bandang yang deras demi membagikan ratusan bungkus nasi hangat dan selimut kepada warga yang terjebak di tanggul sungai.
- Di lingkar kawasan vulkanik yang berstatus siaga erupsi, seperti di sekitar Gunung Anak Krakatau, legislator PKS di Komisi IX (Gamal Albinsaid) dan Komisi IV (Johan Rosihan) mengawal kesiapsiagaan logistik obat ISPA serta proteksi lahan pangan dari hujan abu vulkanik.

Presiden PKS Dr. Al Muzzammil Yusuf, M.Si., dalam amanat arahannya menegaskan bahwa watak sejati seorang kader perkhidmatan diuji dari kesetiaannya menemani rakyat di palung terdalam penderitaan.

"Kiprah relawan PKS di medan bencana—dari bebatuan galodo di Solok, gempa di pedalaman Flores NTT, hingga kepungan kabut asap di

> “Memberikan makanan adalah tanggap darurat, tetapi memberikan sekop dan cangkul adalah ikhtiar membangkitkan kembali martabat dan semangat gotong royong warga untuk membangun kembali puing-puing nagari.”



Kalimantan—bukanlah aksi musiman yang dirancang untuk kalender lima tahunan pemilu. Khidmah kemanusiaan adalah detak jantung partai dakwah. Kami diajarkan untuk hadir paling awal saat bencana menyapa, dan pulang paling akhir ketika rakyat telah mampu tersenyum dan berdiri tegak kembali di atas tanahnya sendiri," pungkas Al Muzzammil Yusuf.

Di tengah dinginnya malam pengungsian di lereng Gunung Talang, aroma nasi liwet dari dapur umum PKS masih mengepul hangat. Di sanalah politik kembali ke fitrahnya yang paling hening: sebuah perjumpaan nurani yang membasuh air mata derita dan merajut kembali harapan peradaban bangsa.



Kami diajarkan untuk hadir paling awal saat bencana menyapa, dan pulang paling akhir ketika rakyat telah mampu tersenyum dan berdiri tegak kembali di atas tanahnya sendiri,"

Dr. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si.
PRESIDEN PKS

6

Penutup

Menanam Pohon Yang Menolak Mati

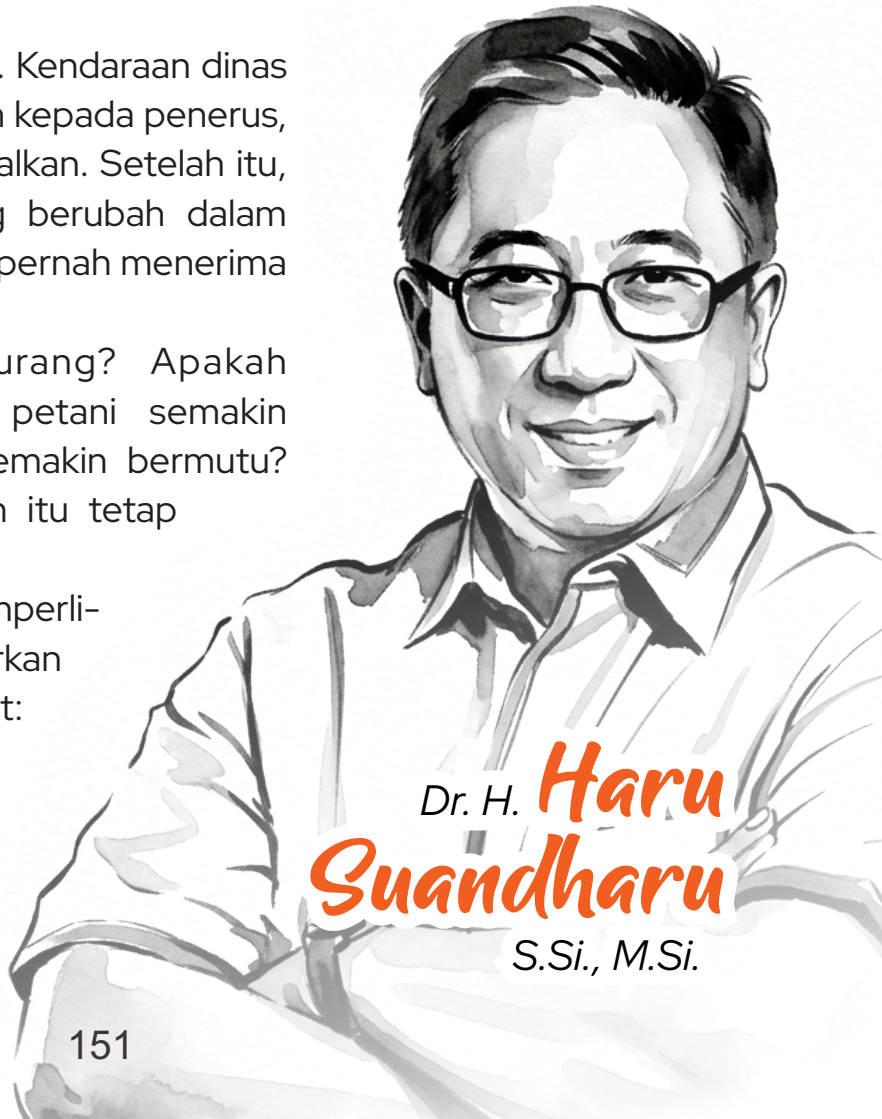
Warisan Kepemimpinan Melampaui Masa Jabatan

"Pemimpin yang baik menghadirkan perubahan. Negarawan yang besar memastikan perubahan itu tetap hidup bahkan setelah dirinya tiada."

Setiap jabatan memiliki batas waktu. Kendaraan dinas dikembalikan, ruang kerja diserahkan kepada penerus, dan fasilitas kekuasaan pun ditanggalkan. Setelah itu, tersisa satu pertanyaan: apa yang berubah dalam kehidupan rakyat karena seseorang pernah menerima amanah kekuasaan?

Apakah kemiskinan berkurang? Apakah pendidikan semakin terjangkau, petani semakin sejahtera, dan pelayanan publik semakin bermutu? Lebih jauh lagi, apakah perubahan itu tetap hidup ketika pemimpinnya berganti?

Majalah SINERGI Edisi 07 memperlihatkan beragam ikhtiar menghadirkan politik yang bekerja bagi rakyat: memperluas akses pendidikan tinggi di Sulawesi Tengah, membangun infrastruktur ekonomi pertanian di Purbalingga, memperkuat perlindung-



Dr. H. Haru Suandharu S.Si., M.Si.

an penyandang disabilitas di Jawa Timur, serta mengembangkan ekonomi lokal di Kulon Progo.

Semua itu menegaskan bahwa kekuasaan dapat menjadi instrumen keadilan dan kesejahteraan. Namun, keberhasilan program belum otomatis menjamin keberlanjutan manfaatnya.

Kita terlalu sering menyaksikan program unggulan tumbuh pesat selama seorang kepala daerah menjabat, lalu melemah ketika kepemimpinan berganti. Masalahnya bukan semata anggaran, melainkan perubahan yang masih bertumpu pada figur dan belum berakar sebagai sistem.

Di sinilah perbedaan antara pemimpin yang menjalankan program dan negarawan yang membangun peradaban.

Bagi Badan Pembinaan dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (BP3U) DPP Partai Keadilan Sejahtera, inovasi pemerintahan tidak boleh berhenti sebagai prestasi personal. Ia harus dilembagakan menjadi kebijakan publik yang terukur, adil, dan berkelanjutan.

Lima fondasi perlu ditegakkan: keberpihakan pada kebutuhan rakyat; pelembagaan melalui regulasi dan perencanaan pembangunan; penganggaran yang bertanggung jawab; birokrasi yang profesional; serta pengawasan dan evaluasi berdasarkan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Beasiswa, misalnya, tidak cukup diukur dari jumlah penerima, tetapi dari terbukanya kesempatan hidup. Jalan tidak cukup dihitung dari panjang ruasnya, melainkan dari manfaat



gambar : pinterest

ekonomi yang mengalir. Regulasi perlindungan sosial pun harus dinilai dari perubahan nyata dalam kehidupan kelompok rentan.

Keberhasilan pemerintahan bukan sekadar membelanjakan anggaran, melainkan mengubahnya menjadi kemaslahatan.

Namun, sistem yang baik hanya akan bermakna jika dijalankan oleh pemegang amanah yang berintegritas. Dalam hal ini, keluarga pejabat publik turut memikul tanggung jawab moral: menjaga kesederhanaan, menghormati batas, dan memastikan kepentingan pribadi tidak menyusup ke dalam urusan negara.

Kekuasaan bukan jalan menuju privilese keluarga. Fasilitas negara bukan milik pribadi, dan kedekatan dengan pejabat tidak boleh menjadi tiket memperoleh keuntungan yang tidak semestinya.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58 tentang kewajiban menunaikan amanah dan menegakkan keadilan. Rasulullah juga mengingatkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (HR. Bukhari dan Muslim).

Karena itu, politik perkhidmatan harus melampaui politik elektoral. Kemenangan pemilu bukan tujuan akhir, melainkan mandat untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, memberdayakan, dan memuliakan manusia.

PKS perlu terus menyiapkan pejabat publik yang bukan hanya mampu memenangkan kontestasi, tetapi juga cakap mengelola pemerintahan, teguh menjaga integritas, membangun kelembagaan, dan memastikan manfaat kebijakan melampaui masa jabatan.

Keberlanjutan bukan berarti mempertahankan semua program tanpa evaluasi. Kebijakan yang tidak efektif harus diperbaiki. Yang perlu dijaga bukan nama program atau figur penggagasnya, melainkan tujuan keadilan dan kemaslahatan yang hendak dicapai.

Ada kebijaksanaan lama tentang orang-orang yang menanam pohon meski tahu mungkin tidak akan pernah menikmati keteduhannya.

“Setiap jabatan memiliki batas waktu. Kendaraan dinas dikembalikan, ruang kerja diserahkan kepada penerus, dan fasilitas kekuasaan pun ditanggalkan. Setelah itu, tersisa satu pertanyaan: apa yang berubah dalam kehidupan rakyat karena seseorang pernah menerima amanah kekuasaan?”



Begitulah seorang negarawan bekerja.

Ia membangun pendidikan yang hasilnya baru tampak satu dekade kemudian, memperkuat layanan kesehatan bagi generasi berikutnya, menjaga lingkungan, membenahi birokrasi, dan menata sistem ekonomi yang manfaatnya melampaui masa jabatannya.

Keadilan adalah akar, regulasi dan kelembagaan adalah batang, sedangkan kesejahteraan rakyat adalah buahnya.

Tugas pemimpin bukan sekadar menanam pohon, melainkan memastikan pohon itu tetap tumbuh ketika musim politik berganti.

Kepemimpinan yang berhasil bukanlah yang membuat rakyat terus bergantung kepada pemimpinnya, melainkan yang menjadikan masyarakat semakin berdaya dan institusi negara semakin mampu melayani.

Ketika jabatan berakhir, semoga yang tertinggal bukan sekadar nama, melainkan kehidupan rakyat yang lebih baik, pemerintahan yang lebih adil, dan kemaslahatan yang terus mengalir lintas generasi.

Itulah hakikat legasi kepemimpinan: politik yang melampaui kekuasaan. Bagi pemimpin yang beriman, semoga setiap manfaat yang terus tumbuh menjadi amal jariyah di hadapan Allah SWT.

Kekuasaan akan berakhir, tetapi kemaslahatan yang dilembagakan dapat hidup melampaui zaman.

Tabik.

Dr. H. Haru Suandharu, S.Si., M.Si.
Ketua BP3U DPP Partai Keadilan Sejahtera

Selamat Hari TNI Ke-81

5 Oktober 2026

TENTARA NASIONAL INDONESIA & RAKYAT
81th
PRIMA

TNI Kuat
Bersama Rakyat
Indonesia Berdaulat
Adil dan Makmur



PKS

BIMTEKNAS

Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif

Jakarta, 19-21 Oktober 2026



Menghadirkan:

H. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D. (Ketua Majelis Syura PKS)

Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si. (Presiden PKS) | **H. Muhammad Kholid, S.E., M.Si.** (Sekretaris Jenderal PKS)

Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si (Ketua F-PKS DPR RI) | **Noerhadi, S.Pd., M.A.** (Bendahara Umum PKS)

Prof. Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri) | **Prof. Dr. Brian Yuliarto, Ph.D** (Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi)

Mayjen TNI (Purn.) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP (K), FIHA, M.M.R.S. (Direktur Utama BPJS Kesehatan) | **Dr. Muhammad Faisal** (Youth Lab Indonesia)

Silih Agung Wasesa, S.Psi., M.Si., MIPRA (Founder & Direktur Konner Advisory) | **Sherly Annavita** (Influencer) | **Eep Saefulloh Fatah, S.IP., M.A.** (CEO PolMark Indonesia)

Partai Keadilan Sejahtera @PKSejahtera @pk _sejahtera pksejahtera PKS TV www.pks.id